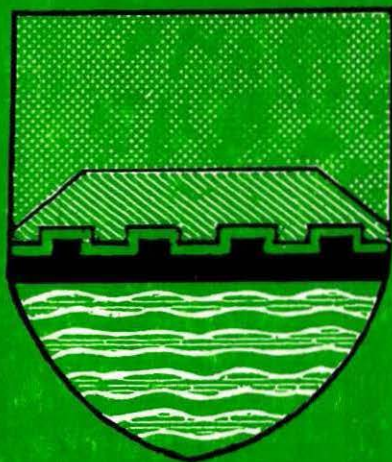


SEJARAH KOTA BANDUNG 1945 - 1979



GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI

.823 31

Direktorat
Kebudayaan

4

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1985

959.824

ED1

S

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH KOTA BANDUNG 1945 - 1979

Oleh

Edi S. Ekadjati

Sobana Hardjasaputra

Ietje Mardiana

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL

JAKARTA

1985

Penyunting :

1. **Djoko Suryo**
2. **Ayatrohaedi**

**Gambar kulit oleh :
M.S. Karta**

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerrbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam Proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang mendatang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk senantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan

untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Januari 1985

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130119123.

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional merupakan salah satu proyek dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang di antaranya mengerjakan penulisan Biografi Nasional.

Adapun pengertian Biografi Nasional ialah kumpulan informasi mengenai kehidupan tokoh dan kegiatannya dari berbagai bidang yang dianggap penting dan memegang peranan di dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia. Pada tahap pertama proyek menangani Biografi Nasional yang berisi kehidupan dan kegiatan para Guru Besar di seluruh Indonesia.

Dasar pemikiran penulisan Biografi Nasional ini ialah bahwa arah pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah, melainkan juga mengejar kepuasan batiniah, dengan jalan membina keselarasan dan keseimbangan antara keduanya.

Di samping itu penulisan Biografi Nasional bertujuan menyiapkan data informasi mengenai berbagai kegiatan pemikiran

serta karya tulis yang diperlukan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dipakai untuk berbagai kepentingan.

Penulisan Biografi Nasional khususnya bertujuan untuk merangsang dan membina pembangunan nasional budaya yang pada gilirannya akan menimbulkan perubahan yang bersifat membina serta meningkatkan mutu kehidupan yang bernilai tinggi berdasarkan Pancasila, dan membina serta memperkuat rasa harga diri, kebanggaan nasional dan kepribadian bangsa.

Jakarta, Januari 1985
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Masalah	6
1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	7
1.4. Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	8
1.5. Ruang Lingkup Isi	8
1.6. Organisasi Penulisan	9
Bab II. Lintasan Sejarah Kota Bandung sampai dengan 1950.	11
2.1. Lahirnya Kota Bandung	11
2.1.1. Bandung Sebagai Pemukiman	11
2.1.2. Kota Bandung Sebagai Kotapraja	23
2.2. Dinamika Pertumbuhan Kota	29
2.3. Komposisi, Mobilitas Penduduk dan Pemukiman .	38
2.4. Pola Pemukiman	45
2.5. Pemekaran Kota	48

Bab III. Kota Bandung Dan Lingkungannya	55
3.1. Perkembangan Transportasi dan Komunikasi	55
3.2. Tingkat Urbanisme	61
3.3. Mobilitas Penduduk.	64
Bab IV. Pemerintahan Dan Aspek Politik Kota Sampai 1950	68
4.1. Kedudukan dan Fungsi Administrasi Kota	68
4.2. Pembagian Administratif Kota	77
4.3. Pemekaran Kota	86
4.4. Kegiatan dan Kekuatan Sosial-Politik	92
Bab V. Peranan Ekonomi Kota	96
5.1. Keadaan, Fungsi dan Peranan Pasar, Pusat Pertokoan, dan Pusat Perbelanjaan	96
5.2. Masalah Pedagang Kaki Lima.	99
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	107

KATA PENGANTAR

Laporan penelitian Sejarah Kota Bandung (1945–1979) ini merupakan bagian dari salah satu tema penelitian Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) tahun kerja 1945/1985. Tema penelitian dimaksud ialah Sejarah Kota-kota Besar di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penelitiannya disamping beberapa kemudahan kami menghadapi pula beberapa kesulitan, berupa kelangkaan sumber terutama arsip tentang kebijaksanaan, perencanaan, dan kegiatan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung periode 1945–1970-an. Di samping itu kberangkatan tim penulis ke Negeri Belanda secara bergiliran (kecuali Ietje Marlina) telah memperlambat penyelesaian laporan penelitian ini.

Namun demikian, berkat bantuan beberapa pihak terutama petugas-petugas perpustakaan Universitas Padjadjaran di Bandung, Perpustakaan Nasional di Jakarta, Perpustakaan Museum Negeri Jawa Barat di Bandung, Arsip Nasional di Jakarta, *Universiteits- en Bibliotheek Leiden*, dan *KITLV Bibliotheek* di Negeri Belanda, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi sedikit banyak dapat diatasi.

Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemimpin Proyek IDSN yang telah mempercayai kami untuk mengerjakan penelitian ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para petugas perpustakaan-perpustakaan tersebut di atas dan berbagai pihak yang telah membantu kami dalam proses pengerjaan penelitian hingga terwujudnya laporan ini. Semoga amal bakti mereka mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Kami menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Beberapa keterbatasan yang ada pada kami memungkinkan hasil penelitian ini terwujud seperti yang sekarang ini. Karena itu kritik dan saran para pembaca kami terima dengan hati terbuka.

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

1.1 *Latar Belakang*

Kota adalah suatu pemukiman yang serba kompleks. Berbagai kepentingan, kesibukan, dan kehangatan bergelut di dalamnya. Keramaian penduduknya bukan saja karena banyaknya jumlah orang yang menghuninya dan lalu lintas yang hiruk pikuk, melainkan juga karena irama pertumbuhan kota itu sendiri. Keramaian itu merupakan gejala terjalannya sekian banyak kebutuhan dan peranan yang terdapat di dalam kota.

Pola hidup kota yang demikian kemudian berkembang dan memberikan dampak ke bagian-bagian tertentu dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tidak jarang kota-kota besar tertentu memberikan pengaruh pula kepada kota-kota lainnya.

Bandung adalah sebuah kota yang bermula sebagai kota kabupaten di wilayah Pegunungan Priangan. Kota ini didirikan di pinggir jalan raya pos pada tahun 1810 sebagai ganti ibu kota kabupaten Bandung yang terletak kira-kira 11 kilometer sebelah selatannya. Kurang lebih setengah abad kemudian (1864) kota ini berkedudukan pula sebagai ibukota Keresidenan Priangan dan setengah abad selanjutnya kota ini ditetapkan sebagai sebuah *gemeente* (1906), kemudian menjadi *stadgemeente* (1926), Bandungs, kota besar, haminte, kotapraja, dan

akhirnya menjadi kotamadya hingga sekarang. Di samping itu, sejak akhir tahun 1945 kota Bandung dijadikan pula sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat. Bahkan pada masa akhir revolusi kemerdekaan kota Bandung pernah disebut-sebut sebagai calon ibukota Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan kedudukan Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan berbagai tingkat (kabupaten, kotamadya, keresidenan, propinsi), dalam bidang lain peranan Kota Bandung makin meningkat pula, seperti bidang ekonomi, pemukiman penduduk, sosial, politik, pariwisata, pendidikan, kebudayaan.

Berkat tanahnya yang luas dan subur di sekitar Kota Bandung tumbuh dan berkembang perkebunan besar sejak pertengahan abad ke-19. Perkebunan-perkebunan besar dimaksud di antaranya perkebunan kopi, teh, kina, karet. Disusul kemudian dengan bermunculannya bermacam-macam industri, sekolah, jalur lalu lintas (jalan umum, jalan kereta api, lapangan terbang), sarana angkutan (mobil, kereta api, pesawat terbang).

Menjelang pecahnya Perang Dunia ke-2 Bandung telah menjadi salahsatu kota yang penting di Pulau Jawa melalui sarana komunikasi. Kota ini telah dihubungkan dengan Kota Batavia (Jakarta sekarang) melalui beberapa jalur lalu lintas, baik jalan darat (jalan umum dan jalan kereta api) maupun jalan udara. Kereta api dan pesawat terbang telah menghubungkan Bandung dengan Kota Yogyakarta di Jawa Tengah. Kereta api jalur ini menghubungkan pula Kota Bandung dengan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur sampai ke Surabaya dan hampir kota ujung timur Pulau Jawa. Dengan kota pelabuhan Cirebon di Utara Kota Bandung dihubungkan oleh jalan umum. Jalan umum dan jalan kereta api arah ke timur menghubungkan Kota Bandung dengan kota-kota kabupaten di wilayah Priangan Timur, seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis. Sementara itu, dengan kota-kota kecil dan tempat-tempat penting lainnya ditinjau dari sudut ekonomi di sekitar kota

Bandung dihubungkan dengan jalan umum dan jalan kereta api. Bahkan lewat Stasiun Radio Malabar dari Bandung dapat berhubungan dengan kota-kota penting di Pulau Jawa, luar Jawa, dan dunia luar.

Sebelum Perang Dunia ke-2 pabrik kina di Kota Bandung menghasilkan produksi terbesar di dunia. Produksi hasil perkebunan lainnya menempati posisi penting dalam perekonomian Indonesia waktu itu. Berbagai macam jenis sekolah, baik tingkat sekolah dasar, sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi telah ada di Kota Bandung pada waktu itu. Sekolah-sekolah lanjutan dan perguruan tinggi (*Technische Hogeschool*) itu didatangi oleh siswa dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Beberapa lembaga pemerintah tingkat pusat, misalnya *Department Van Oorlog* (Departemen Pertahanan dan Keamanan), *Department Van Verkeer en Waterstaat* (Departemen Pekerjaan Umum dan Pengairan), Pos Telegram dan Telepon (PTT), berkedudukan di Kota Bandung.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas memberi kemungkinan bagi berdatangannya orang-orang luar Bandung, termasuk luar Jawa Barat dan orang Eropa, untuk bertempat tinggal di kota ini. Tambahan pula letak Kota Bandung di daerah pegunungan yang udaranya sejuk dan pemandangannya indah karena dikelilingi oleh gunung-gunung makin menarik orang-orang Eropa untuk menetap di kota ini. Sehubungan dengan hal itu, maka pertambahan penduduk kota meningkat secara pesat sejak akhir abad ke-19. Dari 11.243 jiwa penduduk Kota Bandung pada tahun 1846, menjadi 29.384 jiwa pada tahun 1896, 112.800 jiwa pada tahun 1920, dan sekitar 400.000 jiwa pada tahun 1945. Padahal luas Kota Bandung hanya 1.922 hektar pada waktu diresmikan menjadi *gemeente* (1906), kemudian diperluas menjadi 2.871 hektar pada tahun 1917 dan 5.413 hektar pada tahun 1945. Untuk melihat tingkat kepadatan penduduk Kota Bandung pada suatu waktu, di halaman berikut tertera bandingan dengan kota-kota penting lainnya di Pulau Jawa pada tahun 1930.

Sementara itu, orang asing yang menetap di Kota Bandung makin lama makin meningkat pesat. Pada tahun 1846 hanya ada 9 orang Eropa, 13 orang Cina, dan 30 orang Arab yang bertempat tinggal di Kota Bandung, tetapi pada tahun 1896 jumlah orang asing telah meningkat menjadi 1.134 orang Eropa, 2.001 orang Cina dan Arab; tahun 1906 menjadi 2.199 orang Eropa, 3.704 orang Cina, 68 orang Arab; tahun 1920 menjadi 9.043 orang Eropa dan 7.740 orang Timur Asing; tahun 1934 jumlah penduduk orang Eropa di Kota Bandung sebesar 21.691 orang. Sedangkan penduduk Kota Bandung orang pribumi pun mengalami perkembangan dalam variasi rasnya serta komposisinya.

PERBANDINGAN KOTA BANDUNG DENGAN KOTA-KOTA PENTING LAINNYA DI PULAU JAWA PADA TAHUN 1930

Nama Kota	Luas Wilayah (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk rata-rata tiap hektar (Jiwa)
Bandung	2.871	165.888	57
Jakarta	18.410	534.770	29
Semarang	10.000	217.775	22
Surabaya	8.200	336.814	41

Sumber : Basoeni, 1956 : 172

Sejak awal perempatan kedua abad ini tampak adanya usaha mempromosikan Bandung sebagai kota pariwisata, karena memang selain alamnya indah, juga mempunyai potensi lain untuk dapat menjadi tempat rekreasi. Prasarana dan sarana pariwisata pun dibangun di kota dan sekitar kota ini, seperti hotel, rumah makan, gedung pertunjukan kesenian, taman

bunga, pertokoan, tempat hiburan lainnya. Meningkatnya jumlah penduduk orang Eropa di Kota Bandung memungkinkan dibangunnya prasarana dan sarana kehidupan yang memadai menurut standar orang Eropa, seperti listrik, air ledeng, gas, perumahan, jalan, tempat rekreasi. Demikian baiknya pengelolaan Kota Bandung sebagai kota pariwisata sehingga mendapat julukan Bandung Kota Kembang dan *Parijs van Java*.

Bandung sebagai kota yang indah dan nyaman agaknya hanya bertahan sampai pertengahan tahun 1950-an. Sejak itu Kota Bandung mengalami perubahan besar yang menuju kearah terciptanya kehidupan hiruk-pikuk dan semrawut. Juga *Bandung heurin ku tangtung* benar-benar menuju kenyataan. Pertambahan jumlah penduduk, kendaraan, dan bangunan di Kota Bandung berlangsung sangat menyolok sejak waktu itu. Demikialah sehingga pada tempat-tempat tertentu hampir setiap jengkal tanah di Kota Bandung digunakan untuk tempat pemukiman. Gambaran Kota Bandung seperti demikian keadaannya, mendorong lahirnya julukan sinis atas Kota Bandung sebagai kota brengsek.

Sesungguhnya bukan tidak ada perencanaan atas pengembangan Kota Bandung. Bahkan pada pertengahan abad yang lalu pun telah dibuat suatu rencana pembangunan Kota Bandung oleh Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah (1846-1874) yang disebut *Plan der Negorij Bandoeng*. Selanjutnya, pada tahun 1930 Prof. Ir. Thomas Karsten menyusun rencana pengembangan Kota Bandung dengan memperhatikan kebutuhan untuk masa 25 tahun. Menurut Rencana tersebut (Karsten Plan) Kota Bandung perlu diperluas wilayahnya sampai 12.758 hektar, berdasarkan perhitungan bahwa pada akhir tahun 1955 penduduknya akan mencapai jumlah sebanyak 750.000 jiwa. Tetapi rencana itu tak dapat dilaksanakan, karena perjalanan sejarah lain dari yang diduga semula (pendudukan tentara Jepang, proklamasi kemerdekaan, revolusi kemerdekaan). Pada tahun 1970-an muncul kembali gagasan untuk melaksanakan perluasan wilayah Kota Bandung. Namun gagasan tersebut be-

lum terwujud hingga sekarang karena sulit tercapainya kata sepakat antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

Sejak pertengahan tahun 1970-an, terutama sejak polusi lingkungan hidup sebagai efek sampingan dari pembangunan dimasalahkan, usaha ke arah terciptanya kembali citra Bandung sebagai kota yang indah, bersih, dan nyaman mulai digalakkan lagi. Beberapa konsep bagi pengembangan dan pembangunan Kota Bandung muncul, seperti Bandung sebagai kota pendidikan dan kebudayaan, Bandung Atlas (aman, tertib, lancar, dan sehat), Bandung Berhiber (bersih, hijau, dan berbunga). Sejauh ini usaha-usaha tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan.

Yang menarik perhatian adalah peranan Bandung sebagai kota perjuangan. Ternyata peranan ini terus bertahan sejak zaman pergerakan nasional hingga masa Orde Baru sekarang ini. Sebagai kota perjuangan, Bandung bukan hanya berperan di tingkat daerah dan nasional, melainkan juga berperan di tingkat internasional. Dalam hal ini muncul julukan dan istilah seperti Bandung Lautan Api, Bandung Kota Asia Afrika, Bandung Spirit, Konperensi Bandung, Dasasila Bandung, Unpad Berjuang.

1.2 *Ruang Lingkup Masalah*

Meskipun Bandung sebagai ibukota kabupaten didirikan pada tahun 1810, namun agaknya pada waktu itu barulah merupakan tempat kedudukan dan pemukiman bupati dan pejabat-pejabat tingkat kabupaten lainnya beserta keluarga dan sejumlah rakyat mereka. Pada saat diresmikan menjadi sebuah *gemeente* (1906), menurut ukuran sekarang kiranya Bandung belum menjadi kota dalam arti sebenarnya, melainkan baru merupakan sebuah kota kecil yang akan dikembangkan. Baru pada tahun 1926 Bandung dapat digolongkan sebagai sebuah kota dengan fasilitas-fasilitas yang memadai (*stadsgemeente*).

Menarik perhatian untuk diperhatikan dengan seksama bahwa lewat julukan yang diberikan kepadanya oleh masyarakat, ada gambaran yang bertolak belakang mengenai keadaan Kota Bandung antara masa sebelum Perang Dunia ke-2 dengan masa sesudahnya. Sebelum Perang gambaran keadaan Kota Bandung itu serba indah dan nyaman sebagai kota tempat pemukiman ataupun tempat dikunjungi orang. Sedangkan gambaran keadaan Kota Bandung sesudah Perang, terutama sesudah tahun 1950-an berakhir, menjadi tidak baik (semrawut). Benarkah gambaran-gambaran tersebut? Mengapa terjadi gambaran-gambaran demikian?

Dilihat dari kacamata politik, dapat dikatakan Bandung tetap sebagai kota perjuangan, baik sebelum Perang Dunia ke-2 maupun sesudahnya hingga masa Orde Baru sekarang ini. Faktor-faktor apa yang menunjang hal tersebut?

Sesuai dengan tugas yang diberikan (TOR), penelitian ini ditujukan untuk memberikan dan menguraikan dalam rangka memahami perkembangan kota Bandung sebagai sebuah kota pada periode 1945–1979. Pemerincian, tinjauan, dan analisisnya itu terutama menyangkut pertumbuhan yang bertalian dengan bidang ekonomi dan peranan politis kota itu selama masa demokrasi liberal (1950–1959), masa demokrasi terpimpin (1959–1965), dan masa pembangunan (1969–1979), termasuk masa perjuangan Orde Baru (1965–1969).

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami arti dan peranan Kota Bandung dalam periode 1945–1979 sebagai salah satu kota besar dan penting di Indonesia. Pemahaman tersebut sangat penting dan berguna dalam rangka memahami pertumbuhan kota-kota besar di Indonesia secara lebih luas. Pada gilirannya nanti pengetahuan tentang perkembangan kota-kota besar itu yang pengaruhnya sangat besar bagi keseluruhan wilayah Republik Indonesia sangat diperlukan bagi pemahaman sejarah bangsa Indonesia.

Adapun sasaran penelitian ini adalah terwujudnya sebuah laporan penelitian mengenai sejarah kota Bandung periode 1945–1979 yang diharapkan siap cetak untuk kemudian (setelah dicetak) disebar-luaskan kepada masyarakat.

1.4. *Metoda Penelitian dan Teknik Pengumpulan Bahan*

Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan metoda sejarah yang umum. Tinjauan dan analisis mengenai berbagai aspek masalah Kota Bandung, terutama yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan politik, dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan aspek masalahnya. Semua itu dimaksudkan agar Kota Bandung dapat dipahami secara lebih menyeluruh.

Dalam pengumpulan bahan dilakukan dua macam kegiatan. Pertama, penelitian kepustakaan yang dilakukan di Bandung (Perpustakaan Universitas Padjadjaran), Arsip Kantor Walikota Kotamadya Bandung, Perpustakaan Museum Negeri Jawa Barat, dan perpustakaan perorangan), Jakarta (Perpustakaan Nasional), dan Leiden, Negeri Belanda (*KITLV Bibliotheek* dan *Universiteits Bibliotheek Leiden*). Kedua, kerja lapangan, yaitu dengan mengunjungi beberapa tempat dan peninggalan sejarah yang berada di daerah Kotamadya Bandung dan sekitarnya.

1.5. *Ruang Lingkup Isi*

Bandung telah dikenal sebagai salahsatu kota penting di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia ke-2, terutama sejak tahun 1920-an. Kedudukan dan peranan itu terus berlanjut hingga dewasa ini, Walaupun terjadi pergeseran dalam kecenderungan arah perjalanannya.

Dengan latar belakang pertumbuhan kota Bandung sebelum perang, penulisan ini menguraikan berbagai segi keadaan dan perkembangan Kota Bandung pada tahun 1945–1979. Masalah-masalah apa yang dihadapi oleh Kota Bandung selama waktu

itu? Ke arah mana perkembangan Kota Bandung berjalan? Tindakan-tindakan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kota Bandung Dalam menghadapi masalah-masalah tersebut? Ada empat aspek yang menjadi titik perhatian dalam uraian ini. Keempat aspek itu ialah hubungan kota dengan lingkungannya, struktur kota, politik dan pemerintahan kota, dan peranan ekonomi kota.

1.6. *Organisasi Penulisan*

Sebagai latar belakang (Bab II) dikemukakan lintasan pertumbuhan Kota Bandung sejak mulai tercatat dalam sejarah (abad ke-18) hingga tahun 1950. Dalam hal ini diungkapkan pertumbuhan Kota Bandung ditinjau dari segi tempat pemukiman, kedudukan administratif, dinamika pertumbuhannya, komposisi dan mobilitas penduduk, pola pemukiman, dan pemekaran kota. Seiring dengan perkembangan fungsi kota Bandung – sebelum 1810 sebagai tempat pemukiman semata-mata, sejak 1810 sebagai ibukota Kabupaten Bandung, sejak 1864 juga sebagai ibukota Keresidenan Priangan, sejak 1906 juga sebagai *gemeente*, sejak 1927 juga sebagai *stadgemeente*, sejak 1945 juga sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat, maka berkembang pula berbagai sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan kehidupan di suatu kota serta berkembang pula dinamika kehidupan kota Bandung.

Diawali dengan uraian struktur kota; pada Bab III dibahas kaitan kota Bandung dengan lingkungannya, baik lingkungan Kota Bandung sendiri maupun lingkungan Kota Bandung dengan daerah sekitar yang mengitarinya ataupun kaitan Kota Bandung dengan kota-kota besar di Pulau Jawa. Uraian ini dimaksudkan agar jelas tampak kedudukan Kota Bandung dihubungkan dengan daerah sekitarnya dan dengan wilayah Indonesia lainnya. Hal ini penting dalam rangka menempatkan kedudukan kota Bandung dalam kaitan Wawasan Nusantara.

Aspek lain yang disinggung dalam bab ini ialah urbanisasi ke Kota Bandung yang menyebabkan bertambahnya fasilitas-fasilitas kehidupan kota, terlepas dari dapat dipenuhi-tidaknya kebutuhan kehidupan seluruh penghuninya secara wajar. Dengan uraian ini diperoleh gambaran, tentang perkembangan fasilitas-fasilitas umum Kota Bandung seiring perkembangan kebutuhan penduduk kota dan rencana penataan kota.

Perkembangan Kota Bandung dalam bidang politik dan pemerintahan dibicarakan pada Bab IV. Di sini diungkapkan mengenai fungsi Kota Bandung sejak dari hanya sebuah pemukiman penduduk, kemudian menjadi ibukota kabupaten (1810), ibukota keresidenan (1864), sampai ibu kota propinsi (1945). Selain itu, dikemukakan pula kedudukan administrasinya yang semula sebagai ibukota kabupaten diurus oleh wedana, kemudian dibentuk *gemeente* (1906) untuk mengurus penduduk orang Eropa dan orang asing lainnya, ditingkatkan menjadi *stadsgemeente* (1926), lalu kotapraja, dan akhirnya kotamadya. Seirama dengan peningkatan kedudukannya, luas wilayahnya pun dimekarkan pula. Peranan masyarakat Kota Bandung dalam bidang politik dibicarakan pula, sejajar dengan perkembangan politik di tingkat nasional maupun atas inisiatif sendiri.

Pada Bab V dibahas peranan bidang ekonomi di Kota Bandung, termasuk dalam kaitannya dengan kota-kota kecil dan desa-desa di sekitarnya. Di sini dibicarakan pula pertumbuhan pasar, pertokoan, dan pedagang kaki lima. Sejumlah masalah yang hidup dan tumbuh di kota ini dibahas pula.

Seluruh uraian tersebut di atas diharapkan dapat menggambarkan perkembangan Kota Bandung dengan berbagai masalahnya secara menyeluruh.

BAB II. LINTASAN SEJARAH KOTA BANDUNG SAMPAI DENGAN TAHUN 1950

2.1. *Lahirnya Kota Bandung*

Pada umumnya orang mengerti apa yang dimaksud dengan kota dan bagaimana wujud dari suatu kota sehingga dengan cepat dapat membedakan mana kota dan mana desa. Namun apabila ditanya mengenai definisi kota, mungkin kita tidak dapat memberikan jawaban yang pasti. Memang diakui bahwa definisi kota tidak selalu tepat, tergantung dari fokus/segi pendekatannya. Konsep tentang kotatidak selalu sama dengan arti yang ada sekarang dan mungkin pula tidak akan sama dengan arti di masa mendatang.

Musyawarah Dewan Pimpinan Badan Kerja Sama Antar Kotapraja Seluruh Indonesia (BKS—AKSI) tahun 1969 di Bukittinggi telah menghasilkan kesepakatan/konsensus tentang pengertian kota.

Kota adalah kelompok orang-orang dalam jumlah tertentu hidup dan bertempat tinggal bersama dengan satu wilayah geografis tertentu, berpola hubungan rasional, ekonomi dan individualistis (Marbun, 1979 : 22 – 23) :

Bertitiktolak dari definisi kota tersebut di atas, maka uraian pada bagian ini akan mencakup lahirnya kota Bandung sebagai pemukiman dan sebagai kota pemerintahan.

2.1.1. *Bandung Sebagai Pemukiman*

Lahirnya kota-kota di Indonesia pada dasarnya merupakan penyimpangan dari pola kelahiran dan terbentuknya desa. Umumnya embrio kota Indonesia terbentuk secara alamiah dan jarang direncanakan sebelumnya (*Ibid.* : 55). Demikian pula halnya dengan proses lahirnya Kota Bandung.

Lahirnya suatu kota biasanya berhubungan erat dengan arti atau asal-usul nama kota yang bersangkutan. Mengenai asal-usul nama Bandung terdapat berbagai pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Bandung berasal dari kata "bendung". Pendapat ini dikaitkan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum oleh lahar akibat meletusnya Gunung Tangkubanperahu pada zaman prasejarah. Akibatnya daerah di sebelah barat (daratan Batujajar sampai Padalarang) dan daerah di sebelah timur (dataran Bandung sampai Cicalengka) dari Sungai Citarum tergenang air sehingga menjadi sebuah "*danau besar*" (Bemmelen, 1949 : 643 dan Suhandi, 1970 : 14) – "*Danau Bandung*".

Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Bandung berarti *besar*. Mungkin pengertian ini dihubungkan dengan luasnya "*Danau Bandung*". Genangan air yang tenang, luas dan menyekamkan, dalam bahasa Sunda disebut "ngabandeng" atau "ngajumbleng". Diduga kata "bandeng" itu kemudian berubah menjadi "bandung".

Kata "bandung" dalam bahasa Sunda identik dengan "banding" dalam bahasa Indonesia, dalam arti berdampingan. Dalam bahasa Sunda dikenal pula kata "ngabanding" yang berarti berdampingan atau berdekatan. Misalnya terlihat dalam contoh seperti "bale bandung" artinya balai yang berdampingan; "parahu bandungan" yaitu perahu yang dipasang berdampingan, dan

sebagainya. Demikian pula halnya dengan "Danau Bandung". Airnya telah menggenangi dua daratan yang berdampingan, yaitu daratan di sebelah barat dan sebelah timur dari Sungai Citarum (Suhandi, 1970 : 12-15).

Kapan kata Bandung secara resmi dipakai menjadi nama tempat? Sejak kapan tempat yang bernama Bandung dijadikan pemukiman? Data historis kuat yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut belum terungkap.

Beberapa catatan menyebutkan bahwa pada tahun 1448 daerah "Bandung" telah menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Pajajaran (Kartaatmadja dan Nara Sukirna, 1956 : 11). Namun, sejauh mana kebenaran akan catatan ini, masih perlu diteliti dengan menemukan data penunjangannya.

Bukti sejarah yang menyebutkan munculnya daerah Bandung adalah Piagam Sultan Agung Mataram bertititima "dina Saptu tanggal ping sanga wulan Muharam tahun Alip" (Sabtu 9 Muharam tahun Alip). Piagam ini antara lain menyatakan pengangkatan Ki Astamanggala, Umbul Cihaurbeuti menjadi Mantri Agung atau Bupati Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangoenangoen (*Ringkasan Sejarah Kabupaten Bandung*, 1975 : 10-11 Cf. Holle, *TBG XVII*, deel III, 1969 : 341-343).

Menurut perhitungan Prof. Dr. Mr. Soekanto dan pendapat Dr. Brandes, tanggal 9 Muharam tahun Alip itu jatuh pada tanggal 16 Juli 1633 M. (Asikin W.K., 1961 : 27) dan Brandes, *TBG XXXII*: 353-355, Cf. Graaf, 1949: 113). Sedangkan Dr. F. de Haan menyatakan bahwa tanggal tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641 M. (Haan, 1912 : 59). Dalam hal ini Pemda Tingkat II Kabupaten Bandung memilih tanggal yang disebut terakhir sebagai hari jadi Kabupaten Bandung (SK DPRD Kabupaten Bandung Nomor 10/KPTS/DPED/1973 tanggal 18 April 1973).

Terjadinya pengangkatan Tumenggung Wiraangoenangoen sebagai Bupati Bandung menunjukkan bahwa di daerah Ban-

dung waktu itu sudah ada pemukiman. Daerah mana dari wilayah Bandung yang sudah dihuni, belum jelas. Berapa jumlah penduduk daerah Bandung waktu itu (sekitar 1641)?

Sebagai akibat pemberontakan Dipati Ukur terhadap Mataram (1629–1632), banyak penduduk Tatar Ukur yang dipindahkan (dibuang) oleh Sultan Mataram ke Jawa Tengah dan Jawa Timur karena terlibat dalam pemberontakan. Setelah pemberontakan selesai, penduduk daerah Bandung tercatat 300 cacah Hole, *op. cit.* : 340, Cf. Suhandi, *op. cit.* : 30). Dengan demikian penduduk Tatar Bandung sebelum tahun 1632 tentu lebih dari 300 cacah.

Dalam catatan seorang Mardijker Julian de Silva tahun 1641 diduga orang asing pertama yang menjelajahi Tatar Bandung – disebutkan "*aen een negrije genaemt Bandong bestaende uijt 25 a 30 huijsen*" (Kunto, 1984 : 7. Kern 1898: 9). Sayangnya tidak dijelaskan di daerah mana rumah-rumah itu berada.

Kira-kira tahun 1655, atas perintah Sultan Amangkurat I (pengganti Sultan Agung) dilakukan lagi pencacahan jiwa di daerah Priangan. Ternyata penduduk Tatar Bandung telah menjadi 1000 jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk itu antara lain karena penduduk Tatar Bandung yang diasingkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, oleh Sultan Agung dipindahkan lagi ke daerah Priangan dalam rangka memperkuat pertahanan daerah Priangan dan Karawang, mengingat kedudukan VOC di Batavia semakin kuat (Holle, *op. cit.* : 319).

Peta pertama tentang dataran tinggi Bandung yang mencantumkan nama "Bandong" di dalamnya terdapat dalam buku karya Francois Valentijn, *! Eschrijving van Groot Java of te Java Majoor*, 1726 (Basoeni, 1956 : 146). Rupanya "Bandong" yang disebutkan dalam peta itu bukan dimaksudkan sebagai suatu kota. Sebab sumber lain menyebutkan bahwa pada tahun 1742 beberapa tempat dari Tatar Bandung masih digenangi air "Danaung Bandung", sehingga merupakan danau-

danau kecil.² Daerah selebihnya berupa paya-paya dan hutan rimba yang menyeramkan. Karena keadaan alamnya itu, Pemerintah Kompeni di Batavia menjadikan Tatar Bandung sebagai tempat pembuatan bagi pejabat atau tentara Kompeni yang melakukan korupsi atau penipuan (Kunto, *op. cit.* : 10).

Dari keterangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada awal abad ke-17 – paling tidak – di Tatar Bandung sudah terdapat pemukiman. Tetapi letak pemukiman yang satu dengan lainnya cukup jauh dan dipisahkan oleh hutan rimba. Sejak pertengahan abad ke-17 pemukiman di Tatar Bandung mengalami perubahan/perkembangan karena lahirnya suatu wilayah pemerintahan meliputi daerah Ukur, Kuripan, dan Sagaraherang yang diperintah oleh seorang bupati (Holle, *op. cit.* : 340).

Pemukiman di Tatar Bandung semakin berkembang setelah ke daerah itu masuk orang-orang asing, terutama Belanda pada pertengahan abad ke-18. Pada waktu itu di Tatar Bandung terdapat empat orang asing. Pertama, Kompral Arie Top, tentara Kompeni yang masuk ke Tatar Bandung tahun 1741 sebagai komandan dengan tugas mengawasi daerah tersebut. Orang kedua dan ketiga, kakak beradik Ronde dan Jan Geysbergen. Orang keempat ialah seorang koprak tua yang dibuang dari Batavia karena melakukan penyelewengan.

Para pembesar kompeni menduga bahwa si koprak tua itu akan mati di tempat pembuangan – karena keadaan alam Tatar Bandung waktu itu. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Dengan bantuan kakak beradik Ronde dan Jav Geysbergen, si koprak tua berwiraswasta, membuka hutan, berkebun, dan mendirikan perusahaan pengergajian kayu di Tatar Bandung. Dalam waktu singkat ia menjadi kaya-raya, bahkan menjadi tuan tanah yang makmur. Sejak itu orang luar mengetahui bahwa Tatar Bandung merupakan pemukiman yang baik dan subur. Mereka menjulukinya "*Paradise in exile*" – "Surga dalam pembuangan" (Kunto, *op. cit.* : 11).

Daerah mana yang berhasil dibuka oleh si kopral tua tadi, tidak jelas. Tetapi sejak itulah ke Tatar Bandung berdatangan bangsa Eropa lainnya untuk mengadu nasib peruntungan. Rupanya merekalah yang membuka jalan setapak tahun 1786 yang menghubungkan Batavia – Bogor – Cianjur – Bandung, yang dapat dilewati kuda.

Salah seorang petualang yang datang ke Tatar Bandung adalah Pieter Engelhard. Tahun 1789 ia berhasil membuka kebun kopi di lereng selatan Gunung Tangkubanperahu, sedikit di sebelah utara batas kota Bandung sekarang. Hasil tanamannya memberi panenan sangat memuaskan pada tahun 1807 (*Ibid.*).

Walaupun beberapa daerah/tempat di Tatar Bandung telah berhasil dibuka dan dihuni penduduk, tetapi sampai saat itu Bandung belum merupakan sebuah kota.

Keterangan yang menyatakan di Tatar Bandung dibuka suatu kota ialah berdirinya kota Krapyak atau Bojongasih yang dibangun oleh Bupati Bandung (angkatan Mataram, Tumenggung Wiraangoenangoen (1641–1681) sebagai ibu kota Kabupaten Bandung. Kota ini (sekarang Dayeuhkolot) terletak di tepi Sungai Cikapundung yang bermuara di Citarum. Nama Krapyak kemudian berubah menjadi Citeureup. Waktu itu penduduk Krapyak berjumlah 400 keluarga (Tatang R.S., 1979 : 2; Suhandi, *op. cit.* : 12; Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 33; Cf. Haan, 1912 : 104 dan Kern, *op. cit.* : 16). Selama itu Kota Kabupaten Bandung berkedudukan di Krapyak (Citeureup) terjadi lima kali pergantian bupati. Mereka adalah bupati kedua, Tumenggung Ardikusumah (1681–1704); bupati ketiga, Tumenggung Nyili bergelar Tumenggung Anggadireja I (1704–1747); bupati keempat, Demang Natapraja bergelar Tumenggung Anggadireja II (1747–1763); bupati kelima R. Anggadireja III bergelar R.A. Wiranatakusumah I (1763–1794); bupati keenam, R.A. Wiranatakusumah II kemudian terkenal dengan sebutan "*Dalem Kaum*", 1794–1829.

Pada masa pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah II terjadi peristiwa penting, yaitu dipindahkannya ibu kota Kabupaten Bandung dari Krapyak (Citeureup) ke kota Bandung sekarang (Suhandi, *op. cit.* : 97. Cf. *Volks Almanak Soenda*, 1922 : 231 – 232) dan Ringkasan *Sejarah Kabupaten Bandung*, 1975 : 13. 15–16).

Pemindahan ibu kota kabupaten ini erat hubungannya dengan pembuatan jalan raya/jalan pos yang terbentang dari Anyer di ujung barat sampai ke Panarukan di ujung timur Pulau Jawa. Pembuatan jalan ini merupakan salahsatu perwujudan dari sikap dan tindakan keras Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) dalam usaha memelihara keamanan dan mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman serangan pasukan Inggris yang berada di kawasan Asia (Vleke, 1961: 244–253). Dengan adanya jalan raya itu maka komunikasi, termasuk komunikasi pos akan lancar. Pasukan tentara dapat bergerak cepat dalam menguasai dan mengawasi seluruh daerah Pulau Jawa. Karena pengawasan yang ketat, tindakan tegas dan kejam Daendels, pembangunan jalan raya pos sepanjang kira-kira 1.000 kilometer itu dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun (Day, c. 1966 : 160), dengan mengerahkan penduduk pribumi kerja paksa (*rodi*) di bawah pengawasan bupati masing-masing daerah.

Di daerah Kabupaten Bandung, jalan raya pos itu tidak melalui ibukotanya, melainkan melintasi Sungai Cikapundung, kira-kira 11 kilometer arah ke utara dari Krapyak (sekarang jalur jalan itu ialah Jalan Jenderal Sudirman–Asia Afrika–Jenderal Ahmad Yani – terus ke Sumedang). Setelah Daendels mengetahui bahwa letak jalan itu terlalu jauh dari ibukota kabupaten, maka ia meminta kepada Bupati Bandung R.A. Wiranatakusumah II untuk memindahkan ibukota kabupaten-nya ke daerah Cikapundung. Hal ini dimaksudkan agar pembangunan jalan itu tidak menemui banyak hambatan dan pengawasan atas daerah ini lebih mudah. Selain itu, Daendels mengetahui bahwa lahan di daerah Cikapundung yang dilintasi

jalan raya tersebut sangat subur, sehingga memberi harapan baik di masa depan.

Pada waktu itu (1810) daerah Cikapundung masih berupa hutan, tetapi di sekitarnya sudah terdapat beberapa perkampungan, seperti Cikapundung Kolot, Bogor (Kebonkawung), Balubur, dan Cikalintu (Kunto, 1984 :167; Basoeni, 1957: 149 dan Affandi, 1969: 5). Dapatlah dikatakan bahwa perkampungan itulah cikal bakal Kota Bandung.

Permintaan Daendels untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung jelas merupakan fakta sejarah yang kuat (*hard fact*) karena telah dituangkan dalam surat keputusan bertanggal 25 Mei 1810 (Reitsma en W.H. Hoogland. 1927 : 12).

25 Bloeiamaand 1810

Verplaatsing van de Hoofdnegorijn in de Regentschappen Bandoeng en Paracanmoentjang

De landrost der Jacartasche en Preanger bovenlanden, bij missive hebbende te kennen gegeven, dat hem bijzijne jongspectie inspectie was te ooren gokomen, dat de hoofd-negorijen van Bandoeng en Paracanmoentjang verre van den nieuwen weg afgelegen waren, waardoor dewerkzaamheden aan de postwegen als andere strek kwamente lijden; met voordragt mitsdien om gedagte hoofd-negorijen te doen verplaatsen, als die van Bandoeng naar Tjikapoendoeng, en die van Paracanmoentjang naar Andawadak, welke beide plaatsen aan de grooten weg gelegen en daartoe zeer geschik waren, en considerende, dat, bahalve de voor de genoemde verplaatsing opgegeven, plausible redenen, daar door tevens onderscheidende cultures zullen worden bevorderd, uit hoofde van de bijzondere geschiktheid, welke daarvoor den gronden hebben, die in de environs van de opgemelde, tot hoofd negorijen voorgedragen plaatsen gelegen zijn: Is conform de gadane voordragt besloten de hoof-negorijen Bandoeng te doen verleggen naar Tjikapoendoeng en die van Paracanmoentjang te doen verleggen naar Tjikapoendoeng en die van Paracanmoen-

canmoentjang naar Andawadak met autorisatie op gedagten landrost om hieeraan te geven de noodige executie.

H.W. Daendels

Terjemahannya :

25 Mei 1810

Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dan Parakanmuncang

Penguasa (Residen) Jakarta dan pedalaman Priangan telah memberitahukan dengan surat, bahwa ia telah mendengar adanya inspeksi terakhir, bahwa ibukota Bandung dan Parakanmuncang terletak jauh dari jalan baru sehingga pekerjaan pembuatan jalan pos mengalami hambatan; oleh karena itu diusulkan agar ibukota-ibukota itu dipindahkan seperti ibukota Bandung ke Cikapundung dan ibukota Parakanmuncang ke Andawadak, mengingat kedua tempat tersebut terletak pada lintasan jalan raya sehingga sangat baik untuk ibukota; di samping itu pemindahan ibukota tersebut sekaligus akan meningkatkan tanaman-tanaman, karena lahan di sekitar tempat-tempat yang diusulkan menjadi ibukota itu sangat baik (subur). Bilamana keputusan usul pemindahan ibukota Bandung ke Cikapundung dan ibukota Parakanmuncang ke Andawadak ini dapat diterima, mohon paduka memberikan otorisasi untuk pelaksanaannya.

H.W. Daendels

Denan turunnya surat keputusan itu, maka Bupati R.A. Wiranatakusumah II segera mengerahkan rakyat membuka hutan untuk dijadikan ibukota baru. Mula-mula didirikan pesanggrahan di Cikalintu (daerah Cipaganti sekarang). Sejak itu Krapyak (Citeureup) ditinggalkan, tidak lagi menjadi ibukota kabupaten. Orang kemudian menyebutnya Dayeuh Kolot (kota lama).

Ternyata pesanggrahan di Cikalintu masih cukup jauh dari jalan raya yang sedang dibangun. Sementara belum menemukan tempat yang baik untuk mendirikan bangunan kabupaten, didi-

rikanlah pasanggrahan kedua di Kampung Balubur Hilir (di daerah tempat Balai Kota sekarang) dengan maksud untuk mendekati orang-orang yang sedang bekerja di sekitar alun-alun sekarang (Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 34).

Sementara itu Pasukan Zeni Militer Belanda dibantu oleh penduduk Kampung Cikapundung Kolot telah selesai membangun jembatan Cikapundung dekat Gedung Merdeka sekarang. Daendels-lah orang pertama yang menyeberangi jembatan itu. Dengan didampingi Bupati RA. Wiranatakusumah II, Daendels terus berjalan kaki ke arah timur. Sampai pada suatu tempat (beberapa meter arah ke timur dari Kantor Redaksi Harian "Pikiran Rakyat" – Jalan Asia Afrika sekarang) mereka berhenti. Sambil menancapkan tongkap kayu Daendels berkata, "*Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!*" (Victor Indo, *Indie in den Goeden Oude Tijd*, 1935 dalam Kunto, 1984 : 14). Artinya, "Coba usahakan, bila aku datang kembali ke sini telah dibangun sebuah kota!" Di tempat Daendels menancapkan tongkatnya itu kemudian dipasang patok tanda kilometer "0" (nol).

Ucapan Daendels tersebut di atas rupanya telah mendorong semangat Bupati Bandung untuk mendirikan kabupaten dan membangun Kota Bandung. Akhirnya tempat yang diinginkan itu – sesuai dengan "*caturangga*" – ditemukan, terletak di sebelah barat Sungai Cikapundung yang tanah "*bahe ngidul*" (melandai ke arah selatan/timur laut) dan – kata orang – bekas "pangguyangan (pekubangan) badak putih"³ (Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 34).

Oleh karena Bupati Bandung waktu itu tinggal di pasanggrahan Balubur Hilir, maka rakyat yang dikerahkan membuka hutan di tempat yang akan dibangun kabupaten adalah rakyat Kampung Balubur Hilir ditambah dengan para ponggawa Kabupaten Bandung. Atas jasanya itu, Bupati R.A. Wiranatakusumah II memerdekakan rakyat Balubur Hilir dari kewajiban membayar pajak. Itulah sebabnya kampung tersebut

kemudian bernama "Kampung Merdika" – sekarang "Merdikali" (*Ibid.* Cf. Kunto. 1984 : 157 dan Affandie, 1969 : 5). Sejak itulah daerah alun-alun sekarang dan sekitarnya dibangun menjadi Ibukota Kabupaten Bandung yang baru, dan Krapyak (Citeureup) menjadi "Dayeuh Kolot". Dengan demikian permukiman di Tatar Bandung semakin berkembang.

Apakah nama Bandung yang diberikan kepada kota itu juga berasal dari arti "bandung" seperti yang telah disebutkan di muka? Belum jelas – data yang cukup kuat belum ditemukan.

Menurut Ibu Wiranatakusumah V, istri RHAA. Wiranatakusumah V atau Dalem Haji, Bupati Bandung ke – 11 (1920–1931), ide pemberian nama "Bandung" kepada ibukota baru dimaksud di atas berasal dari Bupati R.A.A. Wiranatakusumah II sendiri yang diambil dari sebutan "perahu bandungan". Ketika Bupati RAA. Wiranatakusumah II pertamakali akan meninjau pembangunan kota, beliau terlebih dahulu menyusuri sungai dengan menggunakan "perahu bandungan" sampai pada suatu tempat, selanjutnya menggunakan jalan darat menuju ke pusat Kota Bandung sekarang (keterangan Ibu Wiranatakoesoemah V, 15–5–1970 dalam Suhandi, 1970: 59–60). Keterangan ini hanyalah sekedar ilustrasi. Seberapa jauh kebenaran cerita tersebut, masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Kapan kota baru itu secara resmi menjadi Ibukota Kabupaten Bandung?

Keterangan yang menyatakan Bandung sebagai suatu kota antara lain surat (peraturan) bertanggal 18 Lentemaand (Maret) 1811 tentang peraturan pembelian kerbau oleh pemerintah sehubungan dengan kemungkinan serangan tentara Inggris ke Pulau Jawa (Reitsma en W.H. Hoogland, 1927: 148). Sedangkan suatu data yang cukup relevan dan akurat yang menyatakan Kota Bandung menjadi ibukota kabupaten terdapat tulisan Rd. Asik Natanegara, "*Sadjarah Soemedang Ti Djaman Koem-*

peni Toeg Nepi KaKiwari''⁴ (*Volks Almanak Soenda*, 1938 : 96).

Koe lantaran aja djalan besar anjar beunang ngahadean djeung ngagedean tea dajeuh Bandoeng dipindahkeun ti Dajeuh Kolot ka sisi djalan gede lebah sisi Tjikapoendoeng ari dajeuh Parakanmoentjang dipindahkeun ke kampoeng Anawedak. Bareng djeung dipindahkeunana eta doea dajeuh *dina sabisloeit keneh tg. 25 September 1810* diangkat kana Patih Parakanmoentjang Raden Soeria, Partinggi Tjipatjing, ngaganti Raden Wirakoesoema, noe dilirenkeun lantaran koerang tjakep djeung kedoe.

Terjemahnya :

Dengan adanya jalan besar baru yang sudah diperbaiki dan diperlebar itu, ibukota (kabupaten) Bandoeng di pindahkan dari Dayeuh Kolot ke pinggir jalan besar ditepi Cikapundung, sedangkan ibukota Parakanmuncang dipindahkan ke kampung Anawedak. Bersamaan dengan dipindahkannya kedua ibukota itu, *dalam bisluit yang sama tgl. 25 September 1810*. Raden Soeria, Pertinggi Cipacing diangkat menjadi Patih Parakanmuncang, menggantikan Raden Wirakoesoema yang diberhentikan karena kurang cakap dan malas bekerja. (*Garis bawah* dari penulis).

Keterangan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa surat keputusan tanggal 25 September 1810 merupakan "titi mangsa" resmi lahirnya Kota Bandung. Data ini — walaupun surat keputusan itu belum ditemukan ⁵ — cukup kuat sebagai data sejarah, sebab sumber berupa almanak sebagai sumber acuan biasanya berisi informasi berdasarkan fakta yang kuat atau sumber yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, bila Piagam Sultan Mataram yang bertitit mangsa 9 Muharam tahun Alip telah dijadikan dasar untuk menetapkan hari jadi Kabupaten Bandung, maka surat keputusan tanggal 25 September 1810 itupun kiranya cukup beralasan bila dijadikan dasar bagi penetapan lahirnya Kota Bandung, baik sebagai kota pemukiman maupun sebagai kota pemerintahan (ibukota kabupaten).

Dalam hal hari jadi Kota Bandung ini Pemerintah Kotamadya Bandung ternyata telah memilih tanggal peresmian berdirinya Gemeente (Kotapraja) Bandung, 1 April 1906. Padahal pembentukan gemeente waktu itu bukan dimaksudkan untuk kepentingan penduduk pribumi, melainkan untuk keperluan orang-orang Belanda, seperti akan diuraikan di bawah ini.

2.1.2. Kota Bandung Sebagai Kotapraja (Gemeente)

Pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung dari Krapyak (Citeureup) ke tepi Cikapundung (Kota Bandung sekarang) telah memberi jalan bagi ibukota baru untuk berkembang menjadi suatu kota yang maju, baik sebagai kota pemukiman, kota pemerintahan, kota perekonomian maupun kota pendidikan. Hal ini antara lain disebabkan letak kota yang strategis, yaitu terletak di tepi jalan raya pos Anyer-Panarukan dan berada di tengah-tengah wilayah Keresidenan Priangan, juga tanah di sekitarnya sangat subur sehingga memungkinkan untuk mencari kemajuan dalam bidang ekonomi.

Berapa luas wilayah Kota Bandung pada waktu diresmikan menjadi Ibukota Kabupaten Bandung (25 September 1810) dan berapa jumlah penduduknya, tidak diketahui berhubung data tentang hal itu belum ditemukan. Setelah Pulau Jawa dikuasai oleh Inggris (1811) barulah ada sumber yang menyatakan bahwa penduduk Kota Bandung waktu itu kira-kira 300 kuren atau 1.800 orang, terdiri atas penduduk pribumi, 8 orang Eropa, dan beberapa orang Cina serta orang asing lainnya (Affandi, 1969 : 7, Cf. Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 34).

Sejalan dengan pertumbuhan perkebunan di daerah Bandung khususnya dan wilayah Priangan umumnya yang dirintis oleh dr. Andries de Wilde,⁶ jumlah orang Eropa (khususnya Belanda) yang berdomisili di Kota Bandung terus bertambah.

Dalam pada itu tanah Priangan – setelah kekuasaan Inggris di Pulau Jawa berakhir – yang subur dan telah menjadi daerah perkebunan (terutama kopi dan teh) bertambah penting artinya

terutama dalam upaya menanggulangi kesulitan ekonomi dan finansial Pemerintah Hindia Belanda. Mengingat akan hal itu, dr. Andries de Wilde pada tahun 1819 mengajukan saran kepada Pemerintah Belanda, agar Ibukota Karesidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Kota Bandung dengan maksud untuk mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman Priangan (Kunto, 1984 : 15, Cf. Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 34) termasuk Kota/Kabupaten Bandung.

Rupanya saran dr. Andries de Wilde tersebut di atas waktu itu tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Hindia Belanda. Bahkan Gubernur Jenderal G.A. Baron van der Capellen bertindak sebaliknya. Tanggal 9 Januari 1821 ia mengeluarkan surat perintah (Staatsblad No. 6/1921) yang menyatakan wilayah Priangan tertutup bagi semua orang Eropa dan Cina, kecuali mereka yang telah mendapat izin dari Residen Priangan (Kunto, 1984 : 17).

Akibatnya dalam separoh awal abad ke-18 gerak perekonomian di daerah Priangan, khususnya di Kota Bandung menjadi lamban. Namun demikian, di bawah pemerintahan Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1864-1874) Kota Bandung banyak mengalami kemajuan. Sejalan dengan itu, jumlah penduduk Kota Bandung, baik pribumi maupun orang Eropa dan orang asing lainnya terus meningkat. Sejak tahun 1846 jumlah orang Eropa (Belanda) yang tinggal di Kota Bandung semakin bertambah banyak. Pada tahun itu orang Eropa yang tinggal di Kabupaten Bandung tercatat 353 orang, 9 orang diantaranya bermukim di Kota Bandung (*Mooi Bandoeng*, 2., I, Agustus 1933 : 19 dan Bleeker, 1847 : 11, Cf. Reitsma en W.H. Hoogland, 1927 : 12). Tahun 1890 orang Eropa yang menjadi penduduk Kota Bandung meningkat menjadi 467 orang. Enam tahun kemudian (1896) melonjak menjadi 1.134 orang (*Mooi Bandoeng*, 2, I, Agustus 1933 : 20, Cf. *Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng*, 2, I, Agustus 1933 : 20).

Pertambahan penduduk yang cepat, baik orang pribumi maupun orang asing telah mendorong para penguasa Kota Bandung untuk meningkatkan pembangunan kotanya. Dalam hal ini orang-orang Eropa yang mengusahakan perkebunan-perkebunan di sekitar Kota Bandung memerlukan sarana dan fasilitas kota.

Berdasarkan *Plan der Negorij Bandong* yang telah dibuat sejak tahun 1825 (Kunto, 1984 : 182) sarana dan fasilitas kota dibangun dan/atau ditingkatkan, baik untuk keperluan pribumi maupun orang asing di Kota Bandung (perumahan, jalan, kantor pemerintahan, dan lain-lain).

Sejalan dengan itu, pada tahun 1864 (Surat Keputusan 7 Agustus 1864/Stb. No. 114), Ibukota Karesidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Kota Bandung (Natanegara, *Volks Almanak Soenda*, 1939 : 114 dan *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch - Indie*, 2, 1894 : 154-156). Waktu itu yang menjadi Residen Priangan ialah C. van der Moore (1858-1874). Tahun 1867 ia mulai menempati Gedung Keresidenan (Gedung Pakuan/Gubernuran sekarang) yang baru selesai dibangun (Kunto, 1984 : 184).

Berhubung jumlah orang Eropa terutama Belanda yang tinggal di Kota Bandung semakin banyak, dan beberapa fasilitas yang mereka perlukan sudah ada, mereka mengajukan permohonan kepada pemerintah agar diberi hak otonom (*gemeente*).

Pada waktu itu politik Pemerintah Belanda sedang menjurus ke arah sistem pemerintahan desentralisasi. Oleh karena itu Gubernur Jenderal J.B. van Heutz meluluskan permohonan orang-orang Eropa tersebut di atas. Demikianlah, mulai tahun 1905 Pemerintah Belanda membentuk *gemeente* (kota-praja) di beberapa kota sebagai lembaga otonom. (*Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950)* 1981: 13, 16).

Ketika ordonansi pembentukan *gemeente* disiapkan (1905) penduduk Kota Bandung meningkat lagi dari 29.382 orang pada

tahun 1896 menjadi 47.410 orang, terdiri atas 41.493 orang pribumi, 2.199 orang Belanda, 3.703 orang Cina, dan 95 orang Arab dan timur asing lainnya (Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 39).

Kota Bandung ditetapkan/diresmikan menjadi *gemeente* pada tanggal 1 April 1906 oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heutz bersama-sama dengan pembentukan *Gemeente* Cirebon, berdasarkan ordonasi tanggal 21 Pebruari 1906 / Lembaran Negara No. 121, 1906 (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng*, 1919 : 1). Sejak itu Kota Bandung menjadi daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur beberapa hal tertentu sebagai bagian dari rumah tangganya sendiri.

Waktu keluarnya ordonansi itu, jabatan Residen Priangan dipegang oleh G.A.F.J. Oosthout dan Asisten Residen merangkap *Burgemeester* (Walikota) Bandung pertama ialah E.A. Maurenbrecher (1906–1907).

Isi pokok dari ordonansi pembentukan *Gemeente* Bandung adalah :

1. Kota Bandung dinyatakan dibentuk sebagai suatu *gemeente* yang berpemerintahan sendiri :
2. Untuk menjalankan tugas kewajiban pemerintahan *Gemeente* itu diberikan modal pertama sebesar f. 46.775 yang disisihkan dari anggaran belanja pemerintah kolonial;
3. Tugas kewajiban yang harus dijalankan itu berupa :
 - a. Pembuatan dan pemeliharaan sarana kota, seperti jalan umum, jembatan, saluran air hujan, selokan, riul; berm (tanggul tepi jalan), gorong-gorong, sumur atau mata air bersih, dan saluran air pembilas (*spoelleidingen*);
 - b. Pembuangan sampah dari pekarangan, pertamanan dan jalan;
 - c. Pencegahan kebakaran, termasuk pemeliharaan garduh-garduh pemadam kebakaran itu;
 - d. Pembuatan dan pemeliharaan kuburan-kuburan umum di dalam *Gemeente* dan pembuatan serta pemeliharaan kuburan Cina di luar *Gemeente*.
 - e. Pemeliharaan istal dan pejalan.

4. Perangkat pemerintahan *Gemeente* yang disertai tugas tersebut tadi ialah Dewan *Gemeente* yang secara *ex officio* diketuai oleh Asistent Resident. Dewan itu terdiri dari 11 orang anggota dan hanya 2 orang anggota bangsa pribumi.
5. Cara menyelenggarakan tugas-tugas kewajiban tadi ialah dengan jalan pemberitahuan kewajiban dan wewenang untuk membuat peraturan-peraturan setempat yang dianggap perlu, yang pada umumnya mengenai soal kesehatan umum dan perhubungan lalu lintas serta kebersihan dan keindahan. Dengan sendirinya pengaturan itu meliputi juga soal-soal kepegawaian yang harus menjalankan roda pemerintahan, yang kesemuanya diatur dalam anggaran belanja *Gemeente*. Anggaran belanja tadi harus diadakan perhitungan anggaran harus selesai tiga bulan setelah tutup tahun. Dan selama satu bulan setelah disahkan, perhitungan anggaran tadi harus disediakan di kantor pimpinan Dewan *Gemeente* untuk diketahui oleh umum yang berminat jika perlu, dengan suatu pembayaran bagi mereka yang meminta kutipan atau salinannya.
6. Wewenang yang diberikan kepada pemerintah *Gemeente* disertai dengan restriksi (pembatasan), yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan tidak boleh bertentangan dengan yang telah ditentukan oleh pejabat pusat di tempat itu (Pemerintah Kodya DT II Bandung, 1983 : 41, 49).

Gemeente Bandung pertamakali menggunakan bagian atas diri gedung yang sekarang menjadi toko buku Sumur Bandung di Jalan Asia-Afrika sebagai kantornya. Selanjutnya kantor *gemeente* pindah ke "Gedong Papak" (Kantor Pemerintahan Kotamadya Bandung sekarang), di tanah bekas gudang kopi milik Andries de Wilde (*Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945-1950)*, 1981 : 19, Cf. Kunto, 1984 : 41).

Setelah keluarnya ordonansi tersebut di atas, maka Kota Bandung memiliki tiga fungsi atau kedudukan administratif, yaitu sebagai ibukota kabupaten, ibukota keresidenan, dan *gemeente* (kotapraja).

Pemerintah Kotapraja terdiri atas Dewan Kota (*Gemeente-raad*) dan Walikota (*Burgemeester*). Anggota Dewan Kota seba-

gian besar adalah orang Belanda. Bangsa Indonesia yang pertama kali duduk sebagai anggota Dewan Kota Bandung adalah R.A.A Martanagara (Bupati Bandung) dan M. Ranga Tirtamadja (seorang wedana). Ketua Dewan Kota selalu dipegang oleh Walikota, dan jabatan yang disebut terakhir ini selamanya dipegang oleh orang Belanda yang merangkap sebagai asisten residen. Misalnya walikota-pengganti E.A. Maurenbrecher berturut-turut adalah B.E. Kruysboom (1907–1909), J.A.A' Van Der Ent (1909–1910), J.J. Verwijk (1910–1912), H.C.C.B. Van Vleuten (1912–1913). Sejak tahun 1913 *burgemeester* (walikota) tidak lagi merangkap sebagai asisten residen (*Regeeringsalmanak*, II, 1940 : 760; *Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng*, 1919 : 4–10, dan Pemerintah Kodya DT. II Bandung, 1983 : 49).

Sejak 1 Juli 1917 *Gemeente* Bandung tidak lagi dipimpin oleh asisten residen, melainkan langsung oleh *burgemeester* (walikota), dan B. Coops adalah orang pertama yang melakukan tugas itu. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari *burgemeester* dibantu oleh seroang *wthouder* (*Regeerings almanak*, II, 1940: 760 dan Pemerintah Kodya DT. II Bandung, 1983 : 49).

Kota Bandung berstatus *gemeente* berlangsung selama 20 tahun 6 bulan. Mulai 1 Oktober 1926 – dengan keluarnya surat keputusan gubernur jenderal tanggal 27 Agustus 1926 No. 3 (Stb. 1926 No. 369) – status ini berlangsung sampai dengan menyerahnya pemerintah Belanda kepada bala tentara Jepang (8 Maret 1942), dengan *burgemeester* terakhir adalah N. Beets (*Ibid*).

Pada zaman penjajahan Jepang status Kota Bandung berubah menjadi *Bandung Si* (Si = Kotamadya) dipimpin oleh *Sityo* (Walikota) R.A. Atmadinata (bekas *wethouder* pada akhir pemerintahan Belanda) dibantu oleh seorang *fuku silyo* (wakil walikota). Jabatan yang disebut terakhir semula dipegang oleh Mr. J. Ardiwinata, kemudian digantikan oleh Ir. Oekar Bratakoesoemah dengan sekretaris Basoeni (Pemerintah Kodya DT. II Bandung, 1983 : 50, Cf. Hardjasaputra, 1980 : 25).

Selama di Jawa Barat berdiri "Negara Pasundan" (24 April 1948 – 11 Maret 1950), Kota Bandung kembali berstatus *stadsgemeente* dengan sebutan *Haminte Kota Bandung*. Bersamaan dengan bubarnya "Negara Pasundan" (13 Maret th. 1950), istilah *Haminte* Kota Bandung pun lenyap, diganti dengan sebutan "Kota Besar Bandung" yang mulai berlaku tanggal 15 Agustus 1950 (Pemerintah Kodya DT. II Bandung, 1983: 52).

2.2. *Dinamika Pertumbuhan Kota*

Pada waktu Kota Bandung berdiri dan sekaligus diresmikan sebagai Ibukota Kabupaten Bandung (25 September 1810) keadaannya masih sangat sederhana. Sarana dan fasilitas kota yang memadai, dapat dikatakan belum ada. Walaupun sudah disebut "dayeuh" (kota), tetapi keadaannya baru berupa "desa" yang sunyi, meliputi beberapa perkampungan, seperti Kampung Bogor (Kebon Kawung), Cikalintu, dan Balubur Hilir. Kampung-kampung itu satu sama lain masih dipisahkan oleh hutan. Keadaan ini berlangsung selama beberapa tahun.

Tahun 1825 Kota Bandung telah memiliki "Rancangan Pembangunan dan Penataan Kota" yang disebut *Plan der Negorij Bandong* yang "disusun" oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah II (*Pikiran Rakyat*, 27, XIV, 20 April 1979: 5, Cf. Kunto, 1984 : 182).

Rancangan kota waktu itu masih sederhana dengan batas kota, Kacakaca Wetan di sebelah timur (dekat Simpang Lima), Kacakaca Kulon di sebelah barat (dekat Pasar Andir), di sebelah utara adalah Jalan Aceh sekarang, dan batas sebelah selatan baru sampai Kebon Kalapa. Bangunan yang telah didirikan baru delapan buah, yaitu kabupaten, gudang kopi milik dr. Andries de Wilde – kemudian menjadi "Gedong Papak" (sekarang Kantor Pemerintah Kotamadya Bandung), rumah Tumenggung (sekarang Kantor Keuangan di Jalan Asia-Afrika), rumah Aria (Kepatihan), penginapan milik Tuan Herberg (pada lokasi Hotel Prenger sekarang), barak militer di Jalan Cibadak, Masjid

Agung, dan rumah Tuan Paijen di Jalan Banceuy (Kunto, 1984: 182-183).

Sampai dengan pertengahan tahun 1846 Kota Bandung belum menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Pertumbuhannya baru terlihat setelah Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).

Waktu itu jumlah penduduk Kota Bandung sudah meningkat dari 1.800 orang (termasuk 8 orang Eropa) pada tahun 1811 menjadi 11.243 orang (termasuk 9 orang Eropa) pada tahun 1846. Sedangkan orang Eropa yang tinggal di wilayah Kabupaten Bandung waktu itu berjumlah 353 orang. Maka *Plan der Negorij Bandong* disusun kembali dan disempurnakan.

Berdasarkan rencana tersebut dan sejalan pula dengan keluarnya Undang-undang Ketatanegaraan Hindia Belanda (Stb. 1850), Bupati Bandung mulai membangun dan menata kembali wajah Kota Bandung. Pada tahun 1850 itu bangunan-bangunan umum yang telah tua, seperti bangunan kabupaten dan Mesjid Agung dibangun kembali (Kunto, 1984 : 183-184, Cf. *Pikiran Rakyat*, 27, XIV, 20 April 1979 : 5).

Sementara pembangunan di Kota Bandung berjalan, Keresidenan Priangan yang semula (sejak 1821) dinyatakan tertutup bagi semua orang Eropa dan Cina, pada tahun 1852 dinyatakan oleh Residen Priangan Van Steinmetz terbuka untuk siapa pun. Tahun 1856 Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud memerintahkan pemindahan Ibukota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Kota Bandung. Perintah ini baru dilaksanakan pada tahun 1864 sewaktu Residen Priangan dipegang oleh Van der Moore (Kunto, 1984 : 17-18 dan *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*, 2, 1894 : 154-156).

Tahun 1866 Sekolah Guru (*Kweekschool*) atau lebih dikenal dengan sebutan "Sakola Raja" (sekarang Kantor Polisi di Jalan Merdeka) diresmikan. Satu tahun kemudian Residen Van der Moore mulai menempati Gedung Keresidenan (Gedung Pakuan/Gubernuran sekarang) yang baru selesai dibangun.

Tahun 1871 di Kota Bandung berdiri pula sebuah penjara (*Ban-ceuy*) sekarang (*Ibid.* : 184, Cf. *Pikiran Rakyat*, *loc. cit.*, dan pemerintah Kodya DT. II Bandung, 1983 : 35).

Selanjutnya sarana di Kota Bandung bertambah lagi dengan dibukanya OSVIA (*Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren*), yaitu Sekolah Pamongpraja yang dibuka tahun 1879. Di kalangan penduduk pribumi, sekolah ini dikenal dengan sebutan "Sakola Menak" (Kunto, 1984 : 184, Cf. *Ringkasan Sejarah Kabupaten Bandung*, 1975: 15), karena semua muridnya adalah anak-anak golongan elit pribumi – menak/priyayi – seperti Bupati, Patih, Wedana.

Dengan adanya sarana tersebut di atas, maka Kota Bandung sudah terlihat sebagai kota pemerintahan dengan pola yang sama seperti kota-kota kabupaten lainnya, yaitu gedung kabupaten, mesjid, gedung keresidenan, dan penjara dibangun di sekeliling alun-alun.

Salah satu faktor penting yang mendorong pembangunan Kota Bandung pada akhir abad ke-19 ialah tumbuhnya perkebunan-perkebunan swasta asing di daerah Jawa Barat pada umumnya dan di Priangan pada khususnya.

Bersama dengan hapuskannya "*Tanam Paksa*" (*Cultuurstelsel*) tahun 1870 – kecuali penanaman kopi di Priangan⁷ – lahirlah Undang-Undang Agraria yang mengizinkan pihak swasta memiliki tanah.

Sebagai akibat dari keluarnya Undang-undang Agraria itu, beberapa tahun kemudian jumlah perkebunan swasta di wilayah Jawa Barat meningkat sampai menjadi 150 buah. Sebagian besar dari perkebunan itu terletak di daerah pegunungan Priangan mengelilingi Kota Bandung.

Kemajuan pesat yang dicapai oleh perkebunan swasta Belanda di Priangan telah melahirkan masyarakat Belanda yang baru, yaitu para pemilik dan pengusaha perkebunan kopi, teh, karet, dan kina. Orang-orang Belanda yang tinggal di kota menjuluki mereka "orang-orang gunung". tetapi mereka lebih terke-

nal dengan sebutan *Preangerplanters* (Kunto, 1984: 28). Dalam waktu singkat mereka telah menjadi kaya-raya, melimpah ruah dengan uang hasil keuntungan perkebunan. Akibatnya gaya hidup mereka sangat royal dibandingkan dengan kehidupan para *ambtenaar* Belanda pada umumnya.

Keuntungan melimpah yang diperoleh para pengusaha perkebunan itu dapat terjadi karena kopi, teh, karet, dan kina pada masa itu merupakan barang komoditi ekspor yang sangat laku di pasaran dunia. Sedangkan pengeluaran upah kuli perkebunan tidaklah besar. Di samping itu, pemasaran hasil produksi perkebunan cukup lancar dan meningkat karena telah adanya sarana transportasi, yaitu dibukanya jalur jalan kereta-api Jakarta Bandung pada tahun 1884 (*Groot Bandoeng*, No. 11, 2de jrg., 1 November 1922 : 10).

Kemewahan dan keroyalan hidup "*Preangerplanters*" itu tentu saja dilampiaskan di kota — Kota Bandung —. Demikianlah waktu itu Kota Bandung pada setiap akhir pekan sangat ramai oleh kunjungan tuan-tuan perkebunan yang menghambur-hamburkan uang sepanjang malam. Hal ini telah menimbulkan dampak positif bagi peningkatan kegiatan sosial ekonomi Kota Bandung.

Preangerplanters ini ternyata mempunyai saingan keras, yaitu orang-orang Belanda pengusaha perkebunan dan pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang disebut "*Suikerplanters*".

Tumbuhnya perkebunan-perkebunan di daerah Priangan telah merupakan salah satu faktor penting/utama yang mendorong berkembangnya Kota Bandung sehingga mendapat julukan "*Parijs van Java*". Dalam hal ini, "*Suikerplanters*" yang tinggal di Kota Malang tidak mau kalah dari rekannya di Priangan dalam menyanjung kotanya. Mereka menjuluki Kota Malang sebagai *Holland Tropische Stad*.

Baik "*Preangerplanters*" maupun "*Suikerplanters*" pada umumnya belum mengetahui secara jelas keadaan kota, kele-

bihan dari gaya hidup dan kemewahan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam pertemuan Pengurus Besar Perkumpulan Pengusaha Perkebunan Gula (*Bestuur van de Vereniging van Suikerplanters*) di Surabaya pada tahun 1896 diputuskan Kota Bandung ditunjuk sebagai tempat penyelenggaraan kongres pertama Pengusaha Perkebunan Gula. Pemilihan Kota Bandung dimaksudkan oleh "*Suikerplanters*" agar mereka mengetahui bagaimana kehidupan "*Preangerplanters*" dan keadaan Kota Bandung yang sebenarnya (Kunto, 1984 : 28, 32-33).

Pemerintah Kota Bandung dan "*Preangerplanters*" yang telah bersedia menjadi tuan rumah, penyelenggara kongres, tentu saja tidak mau mengecewakan para peserta kongres, apalagi mendapat ejekan atau cemoohan tentang keadaan kotanya. Oleh karena itu, mereka bekerjasama dengan baik membenahi kota dan mengatur persiapan kongres. Usaha mereka tidak sia-sia. Kongres berlangsung selama tiga hari dengan sukses. Begitu royalnya para "*Preangerplanter*", segala jenis hiburan yang ada di Eropa didatangkan ke Kota Bandung untuk menyenangkan "*Suikerplanters*" peserta kongres. Dengan adanya hiburan yang meriah itu, para "*Suikerplanter*" rupanya begitu terbuai sehingga mereka tidak lagi memperhatikan keadaan Kota Bandung waktu itu secara seksama. Kesan mereka Kota Bandung "menyenangkan penuh hiburan" - "*Bandung Parijs van Java*". Padahal waktu itu Kota Bandung hanya kota kecil mungil di pedalaman yang masih banyak kekurangan, baik sarana maupun fasilitas kota.

Kejadian tersebut di atas telah menggugah penguasa kota (Asisten Residen Pieter Sijthoff) untuk segera meningkatkan pembangunan Kota Bandung. Sejak itulah pemerintah dan warga masyarakat Kota Bandung dengan giat membangun kotanya.

Setelah acara Kongres Pengusaha Perkebunan Gula (1896) selesai, Asisten Residen Priangan Pieter Sijthoff mengumpulkan pemuka masyarakat Belanda di Bandung untuk mengada-

kan pertemuan. Dalam pertemuan yang dihadiri pula oleh Bupati Bandung R.A.A. Martanagara, Sijthoff mengusulkan agar warga kota Bandung menghimpun diri dalam suatu wadah partisipasi guna membangun kota dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berhubung sulitnya komunikasi, wadah tersebut baru terbentuk dua tahun kemudian (1898) dengan nama *Vereeniging tot nut van Bandoeng en Omstreken* (Perkumpulan Kesejahteraan Masyarakat Bandung dan sekitarnya). Ketua kehormatan diserahkan kepada Residen Priangan Mr. C.W. Kist, sedangkan ketua/motor penggerakannya dipercayakan terdiri atas tuan tanah, pemilik perkebunan, pemilik toko, kontrolir, pegawai, teknisi, pemilik hotel, guru seniman, musisi, sastrawan, dan lain-lain (*Ibid.* : 70–73).

Sejak berdiri sampai kota Bandung mendapat status *Gemeente*, banyak andil yang diberikan oleh perkumpulan tersebut dalam membangun, mengubah, melengkapi, dan membenahi keadaan fisik kota Bandung. Andilnya yang terpenting adalah membangun dan/atau memperbaiki sarana kota, seperti jalur jalan, perumahan, bangunan pasar, alat transportasi (kereta kuda), sarana pendidikan dan bidang sosial lainnya.

Besarnya perhatian dan andil pihak swasta Belanda dalam pembangunan Kota Bandung bukan semata-mata karena mereka itu dermawan, tetapi terkandung maksud agar kota Bandung mendapat status *gemeente* yang akan melindungi dan mengurus kepentingan mereka.

Seperti di bagian muka telah disinggung, Kota Bandung pada akhir abad ke-19 masih berupa kota kecil di pedalaman dan sederhana. Jalan Braga masih berlumpur. Penerangan jalan digunakan lentera minyak, itupun belum merata. Jembatan Cikapundung di Jalan Asia Afrika masih terbuat dari balok kayu berlapis jerami (*Ibid.* : 52–53). Rumah-rumah penduduk pribumi terbuat dari bambu dan/atau kayu dengan atap ilalang. Hanya satu dua rumah diantaranya yang sudah berinding batu/

tembok (*Ibid.* : 157 Cf. Suhandi, 1970 : 77-78 dan *Babad RAA. Marta Nagara*, t. th.: 37).

Melihat keadaan fisik kota demikian itu, Bupati Bandung R.A.A. Martanagara (1893-1918) juga tidak tinggal diam. Sejalan dengan partisipasi dan usaha pihak Belanda tersebut di atas, Bupati RAA. Martanegara dengan giat memimpin rakyatnya meningkatkan pembangunan fisik Kota Bandung dan kesejahteraan rakyat.

Bila Bupati RA. Wiranatakoesoemah II (1794-1829) adalah perintis pembangunan Kota Bandung, dan Bupati R.A. Wiranatakoesoemah IV (1846-1874) adalah arsitek pertama perencana tata Kota Bandung, maka Bupati R.A.A. Martanagara adalah "Bapak Modernisasi Kota Bandung". Beliau adalah seorang "mandor besar" yang memimpin "kuli pribumi" / rakyat Bandung membangun kota sendiri. Selain sebagai "mandor besar" yang baik, Bupati R.A.A. Martanagara yang sempat mengenyam pendidikan di *Ambachtschool* (Sekolah Teknik) seringkali menangani langsung pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pengetahuan teknis.

Beberapa usaha/kreativitas beliau adalah :

- 1). Pada akhir abad ke-19 mengolah sebagian lahan Kota Bandung bagian selatan yang masih berupa rawa dan menjadi sumber penyakit malaria. Sebagian dari rawa itu dijadikan persawahan, kolam ikan, atau ditimbun, misalnya daerah Situsaeur (situ = danau, saeur = ditimbuni tanah).
- 2). Menggali dan memperbaiki saluran air, di antaranya Sungai Cikapayang dan Cikakak dengan mengerahkan penduduk Lebakgede (Tamansari).
- 3). Mengganti atap rumah-rumah penduduk dari ilalang menjadi genting yang dibuat sendiri. Untuk melatih penduduk membuat genting⁵ dan bata, didatangkan ahlinya dari luar kota.
- 4). Meningkatkan kondisi jalan dengan memberi lapisan batu, misalnya Jalan Braga.

- 5). Menangani langsung pembuatan jembatan yang semula dibuat dari bambu dan kayu, diganti dengan besi, batu dan tembok, diantaranya Sasakgantung di Jalan Balonggede.
- 6). Mengusahakan berdirinya kantor-kantor dagang Eropa, bank dan pertokoan di Jalan Asia Afrika (Kunto, 1984: 156-158).

Demikianlah sebagian peranan dan andil Bupati R.A.A. Martanagara dalam pembangunan Kota Bandung. Pada masa pemerintahannya (1893-1918) Kota Bandung sungguh banyak mengalami kemajuan.⁹ Keberhasilan Asisten Residen Pieter Sijthoff dan para pengelola Kota Bandung lainnya antara lain karena adanya para bupati di belakangnya. Bupati lah yang menggerakkan dan memimpin rakyat dalam pembangunan kota.

Pada waktu Asisten Residen Pieter Sijthoff sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan Kota Bandung untuk kepentingan berdirinya *Gemeente* Bandung, tahun 1904 ia terpaksa harus meninggalkan Kota Bandung karena diangkat menjadi Residen Semarang. Ia digantikan oleh R.A. Maurenbrecher (1906-1907).

Pengelolaan Kota Bandung selanjutnya tidak ditangani oleh Asisten Residen, melainkan diserahkan kepada Walikota (*Burgemeester*). Pengelola kota yang cakap setelah Pieter Sijthooff adalah Walikota B. Coops (1913-1921). Dalam melanjutkan pembangunan dan pemekaran kota Bandung ia dibantu oleh ahli-ahli perencana kota, seperti Ir. J.E.A. van Wolzogen Kuhr (1928-1934). S.A. Reitsma, E.H. Karsten, H. Hetjans, Ir. Thomas Karsten, Prof. Ir. R.L.A. Schoemaker dan Prof. C.P. Wolf Schoemaker. Di antara para ahli tersebut, Ir. Thomas Karsten bertindak sebagai arsitek/planolog dalam pemekaran Kota Bandung. Sedangkan dua orang ahli yang disebut terakhir masing-masing adalah guru besar *Technische Hoogerschool* (ITB sekarang) yang banyak sekali memberikan pandangan dan saran dalam membenahi Kota Bandung (Kunto, 1984: 131).

Berkat kerjasama yang baik antara para pengelola kota dari pihak pemerintah Belanda (*Gemeente*) dengan pemerintah kabupaten, maka pada tahun 1920-an Kota Bandung telah menjadi kota pemukiman dan pemerintahan yang cantik dan paling sehat di Nusantara.

Di samping sudah adanya gedung-gedung pemerintahan (kabupaten, keresidenan, *gemeente*); kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta; rumah-rumah pejabat, dan sarana kota lainnya, seperti masjid, rumah penjara, dan lain-lain; beberapa gedung dan rumah dibangun dengan gaya arsitektur campuran barat dan timur. Hal ini telah menjadikan Kota Bandung sebagai simbol/cermin semangat baru yang mendorong pemerintah Belanda (*Groot Bandoeng*, 11, 2^{de} jrg., 1 November 1922) untuk terus meningkatkan pembangunan kota Bandung sebagai "proto-tipe kota kolonial.

Faktor kelebihan potensi alamiah Kota Bandung, antara lain letak ketinggian kota ($\pm$ 730 meter di atas permukaan laut) sehingga iklim/udaranya segar dan nyaman, dan letak daerahnya yang strategis, menyebabkan timbulnya gagasan untuk menjadikan Bandung sebagai ibukota Hindia Belanda¹⁰ (Kunto, 1984 : 247–249 Cf. *Almanak voor Bandoeng*, 1920 dan *Wertheim*, 1958 : 230).

Gagasan tersebut mendapat sambutan positif baik dari kalangan pemerintah maupun dari pihak swasta. Instansi-instansi pemerintah dan swasta berangsur-angsur memindahkan kantor-kantor pusatnya dari Jakarta dan kota lain ke Bandung.

Walaupun persiapan ke arah pemindahan ibukota Hindia Belanda ke Bandung sudah dilaksanakan, tetapi rencana itu terpaksa gagal akibat timbulnya *maleise* perekonomian dunia yang dampaknya sangat memukul perekonomian Hindia Belanda.

Salah satu akibat dari *maleise* itu (tahun 1930-an), Pemerintah Kolonial Belanda mengalami kesulitan dalam pembangunan Kota Bandung. Untunglah ada Bank Tabungan dan Hipotik

DENIS (*De Eerste Nederlandsche - Indische Spaarkas en Hypotheek - bank*)^{1 1} yang segera turun tagan menanggulangi kemacetan biaya pembangunan (*Bandoeng 1906-1931 : 25 jarig Bestaan van de Gemeente Bandoeng op 1 April 1931* dalam Kunto, 1984 : 308), sehingga Kota Bandung tumbuh terus dan berkembang mengikuti liku-likunya zaman.

Demikianlah dalam lintasan sejarahnya Kota Bandung pernah menyandang berbagai gelar dan julukan, seperti "*Bandung Parijs van Java*" ("Bandung Paris-nya Jawa"), "*Bandung Kota Kembang*", "*Bandung-Europe in de tropen*" (Bandung Eropa di daerah tropis"), "*Mooi Bandung*" ("Bandung Permai") "*Bandung Vooruit*" ("Bandung Maju"), "*Bandung Exelsior*" ("Bandung Meningkatkan"), "*Bandung Kota Asia Afrika*", "*Bandung ATLAS* (Aman Tertib Lancar dan Sehat)".

Semua itu mencerminkan dinamika pertumbuhan Kota Bandung dari kota pemukiman berkembang menjadi kota administratif/pemerintahan, kota kebudayaan, kota perjuangan, dan kota pendidikan. Dalam administratif kota, kini Bandung berkedudukan sebagai ibukota kabupaten, ibukota keresidenan, dan ibukota propinsi.

2.3. *Komposisi, Mobilitas Penduduk dan Pemukiman*

2.3.1. *Komposisi dan Mobilitas Penduduk*

Di bagian muka (2.1) telah disebutkan bahwa ketika ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke tepi Cikapundung (pusat kota Bandung sekarang), di sekitar Cikapundung sudah ada pemukiman yaitu di Cikapundung Kolot, Bogor (Kebonkawung), Balubur, dan Cikalintu. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa bakal-bakal penduduk Kota Bandung adalah penduduk dari kampung-kampung tersebut. Penduduk ini mungkin bertambah pula dengan penduduk dari Karapyak yang pindah ke kota kabupaten yang baru.

Berapa jumlah penduduk waktu itu (1810), dan bagaimana komposisinya? Belum diketahui secara pasti, sebab data tentang hal itu belum ditemukan.

Menurut perkiraan, penduduk Kota Bandung waktu itu sebagian terbesar adalah suku bangsa Sunda. Beberapa diantaranya mungkin keturunan suku bangsa Jawa.^{1 2}

Seperti telah disinggung di muka bahwa pada tahun 1811 penduduk Kota Bandung berjumlah kira-kira 300 keluarga (lebih kurang 1800 jiwa), terdiri atas penduduk pribumi, 8 orang Eropa, dan beberapa orang Cina. Bila sumber itu benar, maka penduduk Kota Bandung pada saat diresmikan sebagai ibukota Kabupaten Bandung kiranya tidak akan jauh berkurang dari 1800 jiwa.

Menurut beberapa dokumen di Arsip Nasional Jakarta yang diteliti oleh W.F. Wertheim, pada tahun 1833 di kota Bandung terdapat 1.248 rumah tempat tinggal dengan penduduk 5.515 orang (Wertheim, 1958 : 229).

Keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa sampai saat itu rupanya pemerintah, baik pemerintah pribumi (kabupaten) maupun pemerintah Hindia Belanda belum melakukan pencacahan jiwa secara memadai. Hal ini mungkin disebabkan sulitnya transportasi dan komunikasi.

Dari kedua data cacah jiwa tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam jangka waktu 22 tahun, penduduk Kota Bandung bertambah lebih kurang 3.715 jiwa, berarti terjadi peningkatan rata-rata 168 jiwa per tahun. Di samping adanya kenaikan jumlah penduduk, komposisinya pun terjadi perubahan. Hal ini tercermin dari keadaan penduduk Kabupaten Bandung antara tahun 1834—1836 sebagai berikut :

Tabel 1. PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG
1834 – 1836

Golongan Penduduk	1834	1835	1836
1. Eropa & yang sederajat			
Laki-laki	12	14	10
Wanita	3	2	3
Anak-anak	23	11	5
Jumlah	38	27	18
2. Sunda/Jawa *)			
Laki-laki	50.933		51.211
Wanita	56.363		61.971
Anak-anak	68.152		68.938
Jumlah	175.448	178.072	182.120
3. Cina			
Laki-laki	29	18	16
Wanita	11	14	8
Anak-anak	22	28	11
Jumlah	62	60	35
4. Melayu			
Laki-laki	45	17	12
Wanita	25	17	9
Anak-anak	40	16	9
Jumlah	110	50	30
5. Budak			
Laki-laki	1	1	1
Wanita	1	3	1
Jumlah	2	4	2
Jumlah seluruh	175.660	178.213	182.205

*) Sumber : Wertheim, 1958 : 228

Tabel tersebut menunjukkan bahwa periode itu di Kabupaten Bandung terjadi surplus wanita. Sebagian dari penduduk itu – mungkin bagian terbesar – tentu bermukim di Kota Bandung.

Menurut sumber resmi Pemerintah Kolonial Belanda, tahun 1846 Kota Bandung berpenduduk 11.243 jiwa, terdiri atas 11.136 orang pribumi (Sunda dan Jawa), 9 orang Eropa, 13 orang Cina, 30 orang Arab dan Melayu, 50 orang serdadu, dan 5 orang budak (*Mooi Bandoeng*, 2, I, Agustus, 1933 : 19, Cf. Reitsma, 1927 : 12).

Sumber lain menyebutkan bahwa penduduk Kota Bandung tahun 1846 berjumlah 31.106 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2. PENDUDUK KOTA BANDUNG TAHUN 1846

Golongan Penduduk	Bandung Barat	Bandung Timur	Jumlah
1. Eropa	9	21	30
2. Cina	14	15	29
3. Arab	30	17	47
4. Pribumi	13.000	18.000	31.000
Jumlah	13.053	18.053	31.106

Sumber : Wertheim, 1958 : 229

Adanya perbedaan angka jumlah penduduk dalam kedua data di atas kiranya disebabkan sumber data yang berbeda pula.¹³ Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa waktu itu penduduk Kota Bandung dan pemukimannya sudah berkembang ke bagian timur kota. Rupanya pemukiman mereka mengikuti jalur Jalan Raya Pos yang membentang ke arah timur, dan daerah sekitarnya. Mereka berusaha untuk tinggal dekat jalur jalan tentunya

dengan maksud agar memudahkan urusan transportasi dan komunikasi.

Perlu disebutkan di sini bahwa orang Arab mulai menjadi penduduk Kota Bandung setelah tahun 1836. Pada umumnya mereka bermukim di kota bagian barat (*Ibid.*), yaitu di sekitar Gang Alketeri dan Gang Aljabri.

Dipandang dari jumlah penduduknya, lebih dari 10.000 orang, maka sejak itu Bandung sudah memenuhi kriteria suatu kota — *City* (Jefferson, t. th. : 180; Bergel, 1955 : 121–131).

Sejalan dengan pertumbuhan sarana fisik kota, jumlah penduduk Kota Bandung pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 1896 penduduk Kota Bandung telah mencapai jumlah 29.382 jiwa, terdiri atas penduduk pribumi 26.247 jiwa, orang Eropa 1.134 jiwa, Cina dan Timur Asing lainnya 2.001 jiwa (*Mooi Bandoeng*, 2, I, Agustus 1933 : 20).

Pertambahan jumlah penduduk yang menyolok terutama terjadi pada golongan Eropa menjadi 467 orang pada tahun 1890. Tahun 1896 meningkat lagi menjadi 1.134 orang dan 2.199 orang tahun 1906 (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng*, 1919 : 1–2 Cf Ertheim, 1958 : 231).

Setelah Kota Bandung menjadi *gemeente*, pertumbuhan penduduknya semakin melaju, seperti terlihat dari grafik berikut.

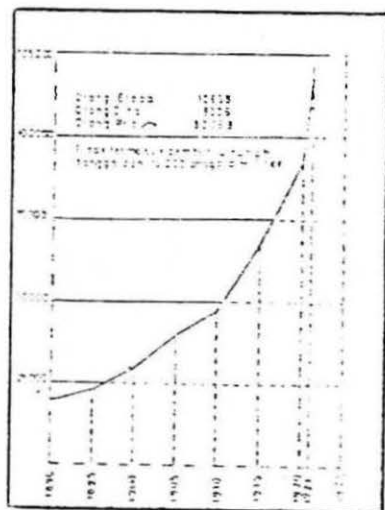
Antara tahun 1920–1930 kenaikan jumlah penduduk golongan Eropa di Kota Bandung melonjak tinggi, yaitu 11,8% (*Volkstelling*, 1930 : 164). Pada tahun 1930 penduduk Kota Bandung secara keseluruhan berjumlah 166.815 jiwa, terdiri atas penduduk pribumi 130.028 jiwa, golongan Eropa 19.650 jiwa, Cina 16.657 jiwa, golongan Timur Asing lainnya 480 jiwa. Demikianlah dalam periode 1920–1930 penduduk Kota Bandung meningkat rata-rata 5,8% per tahun. Akhir tahun 1939 penduduk Kota Bandung berjumlah 216.144 jiwa, terdiri atas 110.666 laki-laki dan 105.478 wanita (Wertheim, *Ibid.*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa komposisi penduduk Kota Bandung sampai dengan tahun 1950 terdiri atas berbagai sukubangsa, yaitu bangsa Indonesia sendiri selaku penduduk pribumi, bangsa Eropa (khususnya Belanda), dan bangsa Timur Asing.

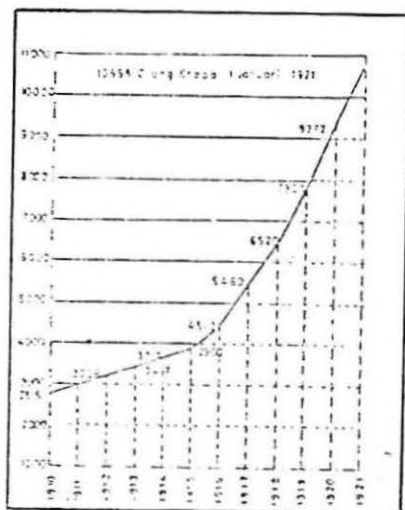
Penduduk pribumi terdiri atas sukubangsa Sunda sebagai penduduk asli, sukubangsa Jawa, dan sukubangsa-sukubangsa yang berasal dari Pulau-pulau Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan lain-lain. Bangsa Timur Asing terdiri atas bangsa Cina, Arab, India, Pakistan, Jepang, dan lain-lain. Komposisi/perbandingan penduduk Kota Bandung tahun 1942 dan 1949 antara penduduk pribumi (bangsa Indonesia), bangsa Belanda dan Eropa lainnya, dan bangsa Cina serta bangsa Timur lainnya adalah 74 : 13 : 13 tahun 1942 dan 81 : 13 tahun 1949 (*Persatoean*, 16 Mei 1949).

Kenaikan jumlah penduduk Kota Bandung sejak pertengahan abad ke-19 sampai dengan pertengahan abad ke-20 termasuk cukup tinggi. Dari 11.243 jiwa pada tahun 1846

PERTUMBUHAN PENDUDUK
GEMEENTE BANDONG



PERTUMBUHAN PENDUDUK MASYARAKAT
EROPA DI GEMEENTE BANDONG



menjadi 644.475 jiwa pada tahun 1950. Berarti dalam jangka waktu 104 tahun penduduk Kota Bandung meningkat 57 kali lipat lebih.

Bagaimana padatnya penduduk Kota Bandung dapat terlihat dari data pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3. PERKEMBANGAN PENDUDUK, LUAS KOTA DAN KEPADATAN PENDUDUK KOTA BANDUNG

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Kota (Ha)	Kepadatan Penduduk (per Ha)
1906	900	38.403	43
1911	2.150	47.980	22
1916	2.150	70.000	33
1921	2.853	114.311	40
1931	2.853	161.568	57
1954	8.098	802.104	99

Sumber : Bagian Cacah Jiwa Kotamadya Bandung

Tabel 4 PERBANDINGAN KEPADATAN PENDUDUK BEBERAPA KOTA DI PULAU JAWA TAHUN 1930

Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Kota (Ha)	Kepadatan (per Ha)
Bandung	165.888	2.853	57
Jakarta	533.000	18.410	29
Semarang	217.800	10.000	22
Surabaya	341.700	8.200	42

Sumber : Biro Pusat Statistik. *Statistical Pocketbook of Indonesia* 1963. Jakarta, 1964, hlm. 12 dan Basoeni, 1956 : 172.

Kedua tabel tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk Kota Bandung cukup tinggi.

Lajunya pertumbuhan penduduk Kota Bandung setelah memasuki abad ke-20 antara lain disebabkan angka kematian di Kota Bandung waktu itu lebih rendah bila dibandingkan dengan kematian di kota-kota lain, seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya (*Groot Bandoeng*, 11, 2de jrg., 1 Nov. 1922: 8 Cf. Wertheim, *op. cit.* : 267 *passim*).

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (akhir Juli 1945) penduduk Kota Bandung telah mencapai jumlah 436.923 jiwa, terdiri atas 379.700 pribumi (termasuk 3855 elit pribumi yang dipersamakan haknya dengan orang Eropa), 40.227 Cina (termasuk 492 orang yang dipersamakan haknya dengan orang Eropa), 15.410 orang Belanda, 686 orang Eropa lainnya, 458 orang Arab, dan 342 orang India (Basoeni, 1957 : 3). Lima tahun kemudian penduduk kota berjumlah 644.475 jiwa dengan kenaikan jumlah penduduk sampai saat itu sebesar 23.647 per tahun (Haryadi, 1976 : 25).

Pertambahan penduduk yang cepat itu tentu saja harus diimbangi dengan tersedianya sarana dan fasilitas kota dan penduduk itu sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor penting yang mendorong diadakannya pemekaran kota, termasuk di dalamnya pemukiman.

2.4. *Pola Pemukiman*

Telah disebutkan bahwa secara garis besar penduduk Kota Bandung terdiri atas tiga golongan, yaitu golongan penduduk pribumi, golongan Eropa (khususnya Belanda), dan golongan bangsa Timur Asing (Cina, Arab dan sebagainya).

Bangsa Belanda sebagai penjajah, dalam pergaulan hidupnya di Indonesia menganggap dirinya sebagai bangsa kelas satu yang memiliki status sosial tinggi. Sebaliknya bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah dipandang sebagai bangsa kelas tiga, lebih rendah tingkatan sosialnya daripada bangsa Timur Asing.

Sikap ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lokasi pemukiman bangsa Belanda cenderung diusahakan terpisah dari lokasi pemukiman bangsa pribumi.

Di Kota Bandung, lokasi pemukiman bangsa Belanda pada umumnya berpusat di bagian utara kota. Bangsa pribumi bermukim di bagian selatan kota dengan "batas pisah" Jalan Raya Pos/Jalan Sudirman - Asia Afrika - A. Yani sekarang (selanjutnya jalan kereta api menjadi "batas").

Pemukiman Bangsa Cina dan Timur Asing lainnya berpusat di kota bagian barat, yaitu di sekitar Pasar Baru dan Pacinan. Pembagian daerah pemukiman seperti itu memang telah direncanakan oleh pihak Belanda agar gerak kehidupan mereka tidak terganggu.

Pembagian daerah pemukiman tersebut tidak berarti bahwa di setiap bagian daerah itu pemukiman penduduknya sama-sama direncanakan. Daerah utara diatur dengan baik secara planologis, baik pemukiman maupun tata kotanya. Sebaliknya daerah bagian selatan, pemukiman penduduk pribumi, tidak direncanakan seperti daerah bagian utara.

Berbicara tentang pola pemukiman di kota Bandung, tentu saja harus bermula dari penduduk pribumi dengan pusat pemerintahannya kabupaten (daerah alun-alun).

Pemukiman yang tertua di Kota Bandung ialah Babakan/Kampung Bogor (Kebon Kawung), Cikalintu, Cikapundung Kolot, dan Balubur. Di Kota Bandung bentuk pemukiman semacam "babakan" yang berarti *kampung*, pada zaman kolonial Belanda merupakan ciri pengelompokan etnis tertentu atau kelompok penduduk yang berasal dari daerah tertentu. Misalnya Babakan Bogor^{1 4} (kampung penduduk asal Bogor - dulu), Babakan Ciamis, Babakan Surabaya, Kampung Jawa, dan sebagainya.

Sama halnya dengan penduduk pribumi, golongan Timur Asing pun membentuk perkampungan tersendiri. Misalnya

orang Cina membentuk Kampung Pacinan dan daerah pemukiman yang menggunakan nama Cina, seperti Gang Goan An, Yap Lun dan lain-lain. Orang Arab juga menggunakan nama Arab untuk daerah pemukimannya, seperti Gang Alkateri, Gang Aljabri, dan sebagainya. Orang Arab mulai muncul di kota Bandung setelah tahun 1836. Tahun 1846 orang Arab penduduk kota Bandung tercatat 47 orang (Wertheim, 1958 : 229). Tahun 1905 meningkat menjadi lebih kurang 125 orang (Kunto, *op. cit.* : 168).

Selain pemukiman yang menunjukkan kelompok etnis dengan lokasi tertentu, daerah pemukiman di Kota Bandung di bagi lagi atas pemukiman dengan kelompok nama jenis tertentu. Nama kelompok pemukiman ini didasarkan atas keadaan/ciri khas yang ada di lokasinya, baik secara alamiah maupun hasil pengolahan/pembukaan lahan. Ada pula yang didasarkan atas maksud pengelompokkan semata-mata.

Menurut catatan Dr. Groneman (sahabat Junghuhn), pada tahun 1870-an penduduk Kota Bandung mulai giat mengerjakan lahan kota menjadi kebun-kebun dengan nama "kebon" di depannya, seperti Kebon Kawung, Kebon Kalapa, Kebon Jeruk, Kebon Jati, Kebon Jahe, Kebon Jukut, Kebon Gedang, dan sebagainya. Kemudian muncul pula kampung-kampung dengan nama jenis pepohonan dan obyek bangunan yang menonjol (*landmark*). Misalnya Awibitung (jenis bambu besar), Kiaracandong (Beringin miring), Nangkasuni (suni = sepi), Cukangjati (cukang = jembatan kecil), Gardujati (gardu = rumah jaga), Sasakgantung (sasak = jembatan), Regol (pintu samping), Kapatihan, Kejaksaan, dan lain-lain (*Ibid.* : 171).

Kelompok pemukiman lainnya menggunakan nama orang. Biasanya nama orang yang paling dikenal (tokoh di tempat itu). Misalnya Gang Asmi, Gang Pa Baki, Gang Affandi, Gang Ramli, Gang Mesri, Gang Ijan, Gang Wiranta, dan lain-lain. Kompleks pemukiman Eropa yang menggunakan nama orang ialah Jalan Eijckman, Jalan Nijlan, Jalan Van Deventer, Jalan Boscha, Jalan Pasteur, Jalan Setiabudi, Jalan Curie, dan lain-lain.

Nama-nama lain yang digunakan untuk kompleks pemukiman adalah nama-nama pulau, sungai, burung, ikan, dan lain-lain yang ada di Indonesia.

Adanya pola pemukiman seperti itu memudahkan komunikasi bagi berbagai pihak, baik bagi pemerintah maupun warga kota.

2.5. *Pemekaran Kota*

Walaupun Kota Bandung telah tercatat dalam peta yang diterbitkan tahun 1726 dan sejak tahun 1810 menjadi ibukota Kabupaten Bandung, namun sejauhmana luas wilayah kota Bandung waktu itu sulit ditentukan.

Pada tahun 1825 batas kota Bandung mulai ditentukan dan dituangkan dan rancangan pembangunan kota yang disebut *Plan der Negorij Bandong*, suatu rancangan yang masih sederhana. Batas Kota Bandung waktu itu adalah Kacakaca Wetan (Singpang Lima) di sebelah Timur, Kacakaca Kulon (Pasar Andir – Jalan Kelenteng) di sebelah Barat, Jalan Aceh – Pajajaran (Pabrik Kina) di sebelah utara, dan Kebon Kalapa – Tegallega di sebelah Selatan (Affandi, 1969 : 7 dan Kunto, 1984 : 182–183).

Rupanya batas/luas kota demikian itu berlangsung cukup lama. Sebab peta dasar kota Bandung tahun 1897 pun masih menunjukkan jalan di Kota Bandung hanya beberapa jalur, diantaranya Grote Postweg/Jl. Raya Pos (Jl. Jenderal Sudirman – Jl. Asia – Afrika – Jl. A. Yani), Karrenweg (Jl. Braga), Pungkurweg (Jl. A. Muis), *Oude Hospitalweg* (Jl. Veteran), dan Jl. Cibadak (Kunto, *Ibid* : 171).

Demikian pula pada waktu Kota Bandung berstatus *gemeente* (1906), batas kota masih tetap seperti semula (*Mooi Bandoeng*, 4, 1938 : 8). Waktu itu luas Kota Bandung 900 ha (Haryadi, 1976 : 28), meliputi dua kecamatan (*onderdistrict*),

yaitu *Kecamatan Bandung Kulon* terdiri atas 8 desa (Andir, Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astanaanyar, dan Regol), dan *Kecamatan Bandung Wetan* terdiri atas 6 desa (Balubur, Kajaksan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Gumuruh). Tahun 1914 wilayah kota diperluas ke arah utara dengan menjadikan daerah Cipaganti dan Bojongloa masing-masing sebagai daerah kecamatan (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng* 1906/1918, 1919: 3).

Sejalan dengan lajunya kenaikan jumlah penduduk, luas wilayah kota pun terus bertambah. Tahun 1921 luas kota Bandung menjadi 2.853 ha (Haryadi, *loc. cit.*). Perluasan antara lain berlangsung di bagian timur dan bagian utara kota, di sekitar Jl. Riau, Cihaurgeulis, Jl. Dago, dan daerah Ciumbuleuit. (*Mooi Bandoeng*, 4, 1938 : 8-10).

Mengingat kenaikan jumlah penduduk terus meningkat dan perlunya berbagai fasilitas kota, maka disusunlah rencana pengembangan kota untuk jangka waktu 25 tahun. Rencana itu terkenal dengan sebutan *Karsten Plan* — sesuai dengan nama penyusunnya, yaitu Prof. Ir. Thomas Karsten, seorang guru besar *Technische Hoogeschool* (sekarang ITB). Menurut rencana tersebut Kota Bandung perlu diperluas sampai 12.758 ha atas dasar perhitungan bahwa penduduk Kota Bandung tahun 1955 akan mencapai jumlah 750.000 jiwa (Basoeni, 1956: 171-175).

Untuk menilai rencana tersebut, Pemerintah Pusat Hindia Belanda telah membentuk *Commissie voor de Bevoor deeling van de Uitbreidingsplannen der Gemeente Bandoeng* (Komisi Untuk Penilaian Rencana Pemekaran Kotamadya Bandung) yang dipimpin oleh E.H. Karsten.

Dalam Risalah No. 4 tanggal 12 Agustus 1919 komisi melaporkan tentang hasil penelitian pendahuluan kepada Walikota Bandung, B. Coops. Laporan itu antara lain menjelaskan bahwa:

- 1). Perkembangan antara Bandung Barat dan Bandung Timur tidak seimbang, yaitu lebih besar ke bagian barat. Hal ini tidak menguntungkan bagi penataan kota di waktu yang akan datang. Untuk mengatasi hal itu, di kota bagian timur dibangun pasar, yaitu di Kosambi, Cicadas, dan Kiaracandong. Di Bandung Barat dibangun Pasar Andir dan Ciroyom. Di bagian selatan dibangun Pasar Tegallega dan Pungkur.
- 2). Agar segera mengambil langkah untuk menyebarkan penduduk dari pusat-pusat kegiatan secara seimbang ke segenap penjuru kota, sehingga kelak Kota Bandung memiliki banyak pusat kegiatan — sejalan dengan saran Kepala P U (*Directeur van Gemeente Werken*) H. Heetjans kepada walikota.
- 3). Kegiatan perdagangan yang hanya berpusat di Pasar Baru harus disebar ke lokasi baru dengan membangun beberapa pasar di dalam kota.
- 4). Untuk mengurangi arus penumpang kereta api yang turun di Stasion Bandung dengan tujuan pusat perbelanjaan Pasar Baru, dan untuk memudahkan mencapai pasar-pasar yang disebut pada no. 1), perlu diadakan beberapa pemberhentian kereta api, yaitu Halte Andir, Halte Ciroyom, Halte Cikudapateuh, Halte Kiaracandong. Selain itu dibangun pula halte di Jalan Jawa untuk mencapai daerah *Insulinde Pork*, dan halte di Karees untuk mencari daerah sekitar Simpang Lima. (Kunto, *op. cit.* : 107–111).

Sayang sekali rencana tersebut tak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena datangnya serbuan tentara Jepang ke Indonesia. Namun demikian, pemekaran Kota Bandung berjalan terus.

Pada masa pendudukan tentara Jepang (1942–1945) Kota Bandung mengalami beberapa kali perluasan wilayah dengan menggeser tapal batasnya. Beberapa desa di sekitarnya dimasukkan ke dalam wilayah Kota Bandung. Sekitar tahun

1944 bagian-bagian desa yang terletak di perbatasan digabungkan. Selanjutnya dilakukan pemekaran desa, yaitu desa Cibeunying dipecah menjadi Cibeunying Wetan dan Cibeunying Kulon. Dengan demikian Kota Bandung pada akhir pendudukan Jepang mencakup 19 desa dengan luas wilayah 5.413 ha. Pada akhir tahun 1949 wilayah Kota Bandung diperluas lagi menjadi 8098 ha meliputi 32 desa (Basoeni, *loc. cit. Persatoean*, 16 Mei 1949). Luas wilayah ini berlangsung sampai dengan tahun 1955, bahkan sampai tahun 1976 pun wilayah Kota Bandung belum mengalami perubahan lagi. (Haryadi, *op. cit.* : 47).

DAFTAR CATATAN BAB II

1. Bahasa Belanda kuno yang berarti "ada sebuah negeri bernama Bandung terdiri atas 25–30 rumah".
2. Di antara tempat-tempat tersebut mungkin yang sekarang bernama Situsaeur, Lengkong Besar, Lengkong Kecil, dan lain-lain. (Dalam bahasa Sunda, situ = Lengkong = danau dalam bahasa Indonesia).
3. Menurut "Caturangga" (kepercayaan bersifat magis religious) tanah yang demikian sangat baik untuk dijadikan tempat tinggal penguasa daerah, seperti bupati.
4. Tulisan ini merupakan ikarangan bersambung yang dimuat dalam *Volks Almanak Soenda* tahun 1930-an dan berakhir dalam terbitan tahun 1939.
5. Arsip-arsip lama Kotamadya Bandung sudah pada hilang. Demikian pula bundel arsip/dokumen tentang Priangan zaman Daendels dan Raffles yang terdapat di Arsip Nasional keadaannya rusak berat.
6. Ia adalah seorang ahli bedah yang berdinis pada pasukan artileri kemudian menjadi tuan tanah paling kaya di Priangan dan pembantu utama Daendels. Pada zaman Raffles, ia diangkat sebagai asisten residen di Bandung, kemudian menjadi Pengawas Penanaman Kopi

berkedudukan di Tarogong, Garut (Kunto, 1984 : 39-40).

7. Kewajiban penanaman kopi di Priangan baru dihapuskan pada tahun 1917.
8. Pembuatan genting diserahkan kepada penduduk Kampung Merdekaliio sehingga mereka dibebaskan dari pembayaran Pajak.
9. Atas jasa-jasanya itulah Bupati RAA. Martanagara oleh Pemerintah Hindia Belanda dianugrahi gelar Aria Adipati dan tanda kebesaran berupa Songsong Kuning (Payung Kebesaran) dan Bintang Mas.
10. Gagasan itu berpangkal dari hasil penyelidikan H. F. Tillema (seorang ahli kesehatan Belanda) yang menyatakan bahwa kota-kota pantai di Pulau Jawa, termasuk Batavia kurang memenuhi syarat sebagai pusat pemerintahan. Atas dasar itu Tillema mengusulkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) untuk memindahkan ibukota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Gagasan ini mendapat dukungan dari *Recktor Magnificus Bandoengsche Technische Hoogeschool* (ITB), Prof. Ir. J. Kloppe.
11. Bank ini merupakan Bank Tabungan dan Hipotik pertama di Hindia Belanda yang berdiri tahun 1915 berlokasi di Jalan Braga 14.
12. Seandainya diantara penduduk Kota Bandung waktu itu terdapat keturunan suku bangsa Jawa, mungkin mereka adalah keturunan prajurit Mataram. Pada waktu prajurit-prajurit Mataram mengadakan ekspansi ke Priangan Timur dan Barat (abad ke-17), tempat-tempat yang direbut terus mereka duduki.

Orang Belanda/Eropa baru masuk ke daerah Bandung pada abad ke-18. Sedangkan orang Cina baru ada di Kota Bandung pada awal abad ke-19.

13. Data penduduk dalam tabel 2 adalah hasil penelitian dari berbagai sumber dan tentunya melalui pengolahan dan analisa sumber. Atas dasar itu, data kependudukan tersebut kiranya lebih mendekati kebenaran.
14. Di Babakan Bogor pernah tinggal $\pm$ 400 orang Bogor. Mereka adalah buruh kereta api yang ikut membangun jalan kereta-api Bandung-Bogor pada abad ke-19 (Kunto, 1984 : 167).

BAB III KOTA BANDUNG DAN LINGKUNGANNYA

3.1. *Transportasi dan Komunikasi*

Menurut salah satu sumber, sejak akhir abad ke-18 antara Bandung – Cianjur – Bogor – Jakarta (Batavia) telah dihubungkan dengan jalan setapak yang dapat dilalui kuda perjalanan dengan naik kuda. Namun untuk perjalanan ke luar kota, orang masih suka menggunakan tandu (pelangkin) yang dipikul oleh empat orang. Pemakaian tandu ini antara lain disebabkan jalur jalan yang ada berupa jalan pegunungan yang naik turun, sehingga sangat melelahkan bagi penunggang kuda (Kunto, 1984: 81–82).

Pada waktu itu angkutan barang belum menggunakan alat yang cukup praktis. Untuk pengangkutan kopi dari pegunungan ke gudang kopi di kota misalnya, masih digunakan keranjang rotan/bambu yang diusung di atas kepala (Kunto, 1984: 83). Bila waktu itu tandu digunakan sebagai "kendaraan" yang dipikul orang, maka alat angkut barang berupa pikulan (Sunda : tanggungan) kiranya sudah digunakan.

Setelah jaringan jalan diperkeras dengan batu alam, barulah digunakan alat angkut berupa kereta beroda (pedati). Dalam hal ini, Gubernur Jenderal Matteus de Haan (1725–1729) menggunakan kerbau sebagai binatang pengangkut beban, sehingga pada

tahun 1949 di wilayah Priangan terdapat sekitar 300 ekor kerbau beban pengangkut hasil bumi antara daerah Parakanmuncang – Sumedang. (*Ibid.* : 86). Waktu itu kerbau dipilih sebagai hewan pengangkut beban karena kerbau banyak terdapat di Jawa Barat/Pulau Jawa dan binatang itu mampu mengangkut barang lebih banyak daripada kuda. Namun demikian, kuda pun tetap digunakan sebagai penarik pedati.

Setelah jaringan jalan raya Anyer – Panarukan melewati kota Bandung (awal abad ke-19), masalah angkutan darat dapat diatasi. Sejak itulah penduduk pribumi di wilayah Priangan umumnya dan di Kota Bandung khususnya menggunakan gerobak pedati yang dihela kerbau sebagai alat angkutan/perhubungan (Tio, *Lie Kimpok 1853 – 1912* dalam *Ibid.*, 85). Dengan kata lain gerobak-pedati kerbau waktu itu merupakan alat angkut vital di wilayah Priangan. Alat angkut tersebut sempat menghubungkan Kota Bandung dengan Cikao, sebuah pelabuhan sungai di daerah Purwakarta (Kunto, 1984: 85).

Gerobak – pedati itu bentuknya masih sangat sederhana, terbuat dari lempengan kayu tebal dengan roda tanpa jari-jari. Sebagai alat penguat roda, para lingkarannya dilapisi plat besi (Haaan, *Priangan I*, 1910).

Salah satu jalan yang dipakai lalu lintas pedati kerbau di dalam Kota Bandung adalah jalan Braga sekarang sehingga waktu itu jalan tersebut disebut "*Karrenweg*" (karren : pedati; weg = jalan).

Setelah pedati kerbau lenyap, di Kota Bandung kemudian muncul beberapa macam kereta kuda, seperti bendi, sado, delman, kretek. (Kunto. 1984: 88–89). Komunikasi antara daerah di Kota Bandung masih sulit, angkutan barang dilakukan oleh kuli atau gerobak, sado, dan delman, sedangkan perjalanan ke Jakarta menggunakan kuda pos.

Tanggal 17 Mei 1884 dibuka jalan kereta api Bandung Cianjur menyambung jalan kereta api Cianjur – Jakarta yang sudah dipasang beberapa waktu yang lalu. Hal ini merupakan

perkembangan baru bagi transportasi dan komunikasi antara Bandung – Cianjur – Bogor – Jakarta, apalagi Bandung dijadikan stasiun pusatnya. Dengan adanya Jalan kereta api tersebut, kini Bandung – Jakarta dapat ditempuh dalam waktu 5 dan 9 jam (*Groot Bandoeng*, 11, 2de jrg., 1 Nov. 1922 ; Kunto, 1984 : 115; Cf. Wertheim, 1958 : 230).

Hubungan transportasi dan komunikasi dari dan ke Bandung lebih terbuka lagi dengan dibukanya lintasan kereta api Bandung – Yogyakarta – Surabaya yang selesai dibangun tahun 1894. Hubungan kereta api Bandung – Jakarta lewat Purwakarta – Cikampek dibuka tanggal 29 Desember 1900. Selanjutnya dibangun jaringan jalan kereta api di wilayah sekitar Bandung (*hinterland*) sehingga lebih memperlancar hubungan Kota Bandung dengan daerah lingkungannya.

Samapi dengan tahun 1941 penumpang kereta api yang naik-turun lewat Stasiun Bandung berjumlah 1.307.000 per tahun dan muatan barang 244.700 ton (*Almanak Voor Bandoeng*, 1941). Angka tersebut menggambarkan betapa besar peranan kereta api bagi hubungan Kota Bandung dengan daerah luar.

Jalur jalan kereta api yang dibangun di sekitar wilayah Bandung meliputi trayek Bandung – Rancaekek – Jatinangor – Tanjungsari – Citali (dibangun 23 Februari 1918) dan direncanakan terus ke Sumedang. Trayek Trem Bandung – Kopo (1 Juni 1918) diteruskan ke Ciwidey (18 Maret 1921). Bersamaan dengan itu dibuka jalur Citeureup – Banjaran – Pangalengan. Lintasan Bandung – Citeureup – Majalaya (6 Juni 1919). (BLMC. *Perquin Nederlandsch Indische Staatsspoor en Tramwegen*, 1921 dalam Kunto, *op. cit.*; 112).

Adanya transportasi kereta api di wilayah Priangan itu besar sekali dampak positifnya terhadap perkembangan ekonomi Kota Bandung dan sekitarnya, karena memang pengadaan sarana tersebut dititikberatkan pada fungsinya. Pertama, sebagai alat angkutan hasil produksi perkebunan Priangan (teh, kopi,

kina, karet, dan lain-lain) sebagai barang komoditi ekspor yang sangat laku di pasaran dunia. Kedua, sebagai sarana penunjang dalam rencana pemekaran wilayah *Gemeente* Bandung. (Kunto *Ibid.* : 106 – 107).

Kereta api yang beroperasi di wilayah pedalaman Priangan waktu itu diantaranya kereta yang dijuluki "Si Gambar".

Ketika hubungan kereta api Jakarta – Surabaya baru ada satu lintasan, maka Stasiun Bandung merupakan tempat alih penumpang (*stop over*). Hubungan Bandung – Jakarta disediakan empat formasi yang disebut *Vlugge Vier* ("Empat Cepat") melewati Cikampek – Purwakarta. Formasi ini mulai diadakan 1 November 1934. Sedangkan hubungan Bandung – Surabaya disediakan dua formasi kereta ekspres (siang dan malam). Formasi ekspres siang disebut *eendagsche* (sehari perjalanan) dan ekspres malam disebut *nacht trein* (kereta malam). (*Ibid.* : 99 – 100).

Dampak positif dari stasiun Bandung sebagai tempat alih penumpang ialah di sekitar stasiun bermunculan rumah makan/restoran dan penginapan/hotel mulai kelas rendah sampai kelas menengah. Di antaranya terdapat di Jalan Gardujati, Kebonjati, Kebon Jeruk, Belakang Pasar Barat, Jalan Pasar Baru, dan Gang Suniaraja. Hotel-hotel yang agak lumayan terdapat di depan stasiun, antara lain "Hotel Andreas dan "Grand National Hotel" (sekarang Kantor Pusat PJKA), khusus untuk pembesar Belanda. Di daerah Bandung bagian Barat bermunculan pula toko-toko dengan berbagai jenis barang dagangannya. Toko-toko itu sebagian besar adalah milik Cina (Japen Kobes Bandung, 1956 ; Cf. Wertheim, *loc. cit.*) Dalam hal ini Pasar Bartu yang tidak jauh dari stasiun dan toko-toko di sekitarnya, tentu saja semakin ramai dan menjadi pusat perbelanjaan.

Lapisan masyarakat Kota Bandung lainnya yang kecip-ratan rejeki akibat dampak tadi ialah para kusir sado, delman dan kretek yang waktu itu berperan penting sebagai alat trans-

portasi dalam kota, di samping mobil-mobil kunc. Setelah tahun 1950-an delman dan kretrek berangsur-angsur berkurang: Dari 451 buah pada tahun 1955 menjadi 46 buah pada tahun 1980. (Kunto, *op. cit.* : 93, 105).

Demikianlah, dalam bidang perkeretaapian, khususnya pada eksploitasi Barat, Kota Bandung menduduki tempat penting. Bagian-bagian penting dari perusahaan keretaapi, seperti Balai Besar PJKA, Balai Kerja Konstruksi, gudang persediaan, perbengkelan, semua berada di Kota Bandung. Bahkan bagian-bagian yang bertempat di luar Bandung, misalnya Balai Kerja Konstruksi Manggarai, Kantor Inklaring Tanjung Priuk, dipimpin langsung oleh direksi di Bandung (Jawa Barat, BKPD, 1965 : 110).

Setelah alat angkutan barang seperti truk dan kendaraan bermotor lain yang lebih fleksibel beroperasi di kawasan Bandung, dan permintaan hasil perkebunan Priangan di pasaran dunia berkurang, maka lambat laun kereta pai barang ke pedalanan Bandung tidak lagi digunakan. Fungsi kereta api tinggal sebagai angkutan penumpang.

Sejalan dengan perkembangan transportasi tersebut di atas, fasilitas kota pun turut bertambah. Penerangan listrik untuk rumah dan jalan di Kota Bandung pertama-kali diusahakan oleh *NV. Bandoengsche Flectriciteit Maatschappij (BEM)*. Selanjutnya ditangani oleh *GEBO (Gemeenschappelijk Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken)* yang dibentuk tanggal 29 Oktober 1918. Dalam waktu dua bulan langganan pemakai listrik berjumlah $\pm$ 2.300 orang, dan penerangan jalan sudah dipasang 400 buah (*Sejarah Kota Bandung*, 1981 : 31).

Berkat adanya jaringan listrik,¹ di Kota Bandung muncul radio pemancar, baik yang diselenggarakan oleh badan pemerintah maupun semi pemerintah. Pemancar yang diselenggarakan oleh badan pemerintah ialah NIROM (*Nederlandsch Indische Radio Omroep Maatschappij*). Stasiun pemancarnya bertempat di Tegallega, kemudian pindah ke Ciumbuleuit. Peman-

car yang diselenggarakan oleh badan swasta ialah VORL (*Vereeniging Oostersche Radio Luisteraars*), didirikan tahun 1934 (Ind. Deppen., 1979 : 18–51; Kunto, 1984: 199–200).

Tanggal 15 April 1926 berdiri BRV (*Bandoengsche Radio Vereeniging*) dikepalai oleh J.G. Prins, seorang teknisi. Studio-nya bertempat di ruang atas Percetakan Vorkink (sekarang Toko Buku Sumur Bandung). Dalam waktu sangat singkat (8 Agustus 1926) pemancar tersebut sudah dapat melakukan siaran. Ternyata siarannya bukan hanya diterima di sekitar Bandung, tetapi tertangkap pula di luar Jawa (Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Irian), bahkan sampai di luar negeri (Afrika Selatan, Hawaii, dan Selandia Baru).

Untuk menjamin kelangsungan dan kelancaran radio pemancar itu, pada tahun 1926 pengelolaan siaran BRV diambil alih oleh NIROM. Siaran NIROM ini berlangsung sampai masuknya tentara Jepang ke Jawa Barat (1942).

Di samping adanya pemancar tersebut di atas, dibangun pula Instansi Pemancar Radio Telepon (Radio Malabar) di lereng Gunung Malabar. Pemancar ini dibangun oleh Ir. G.J. de Groot, seorang insinyur elektro tahun 1918 dalam jangka waktu ± 5 tahun. Tanggal 5 Mei 1923 secara resmi dibuka hubungan radio telepon dari Nusantara (Radio Malabar) ke Negeri Belanda, dan berhasil baik. Untuk hubungan radio telepon di dalam negeri, sebuah stasion pemancar dibangun di Rancaekek (Kunto, *op. cit.* : 198–200, 260–261).

Keberhasilan tersebut sungguh merupakan peristiwa bersejarah dalam bidang telekomunikasi dan cukup menakjubkan, bahkan dapat dikatakan fantastis untuk masa itu.

Hal lain yang membawa harum nama Kota Bandung waktu itu adalah dibukanya jalur penerbangan tanggal 1 November 1928 dari Pelabuhan Udara Andir (sekarang Husein Sastranegara) ke Jakarta, Transportasi udara ini dilakukan oleh Perusahaan Penerbangan KNILM. Dua tahun kemudian dibuka

jalur penerbangan dari Bandung ke Surabaya, Semarang, Palembang, dan Singapura. (*Ibid.* : 260).

Dalam rangka melaksanakan rencana pemindahan ibukota Hindia Belanda dari Jakarta ke Bandung, instansi-instansi pemerintah maupun swasta banyak yang dipindahkan ke Bandung, termasuk diantaranya Jawatan Kereta Api Negara (PNKA), PTT (1918) dan Laboratorium PTT (*Ibid.* : 250, 287; Cf. *Groot Bandoeng*, 11, 2de jrg., 1 November 1922 : 12).

Pindahanya Jawatan PTT (Pos—Telepon—Telegraf) ini telah melengkapi fasilitas Kota Bandung dalam bidang komunikasi. Komunikasi antara pihak satu dengan pihak lain yang semula memerlukan jarak waktu, dengan adanya telepon menjadi singkat. Telepon telah membantu memperlancar urusan yang memerlukan jarak ruang dan waktu.

Berdirinya Kantor Pusat PTT di Kota Bandung telah menjadikan Kota Bandung sebagai titik pusat jaringan nasional atau wawasan Nusantara.

Masuknya pesawat televisi ke Kota Bandung (1962) telah membantu radio dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada warga Kota Bandung. Setelah munculnya pesawat radio dan televisi transistor, peranan dan fungsi alat komunikasi tersebut bertambah penting karena dapat menjangkau warga pedesaan.

3.2. *Tingkat Urbanisme*

Sejalan dengan perkembangan jalur jalan kereta api di wilayah Kota Bandung, para pengelola Kota Bandung, baik pihak *gemeente* maupun pihak kabupaten dengan giat membenahi fasilitas kota.

Salah satu fasilitas kota yang perbaikannya diutamakan ialah jalan dalam kota. Tahun 1909 diperbaiki dan diperkeras 5 jalur jalan, yaitu Jalan Merdekaliweg (Jalan Wastukencana), Kerklaan (Jalan Gereja), Parklaan (Jalan Merdeka), Dagoweg (Jalan Dago) dan Lembangweg (Jalan Cihampelas — Setiabudi).

Tahun-tahun selanjutnya perbaikan jalan ditingkatkan lagi pada *Groote Postweg*/Jalan Raya Pos (Jl. Sudirman—Asia—Afrika—A. Yani), Gardujatiweg (Jl. Gardujati), Pasar Baruweg (Jl. Otto Iskandardinata depan Pasar Baru), Bungsuweg (Jalan Veteran), Regentsweg (Jl. Dewi Sartika), Tamblongweg (Jl. Akip Prawirasuganda), Naripanweg (Jl. Karyawan), Pungkurweg (Jl. Pungkur/A. Muis), dan lain-lain. Bersamaan dengan pekerjaan tersebut diperbaiki dan dibangun pula beberapa jembatan, riul, pasar (Pasar Andir, Pasar Kosambi, Pasar Cicadas, Pasar Pungkur), pos polisi, kolom pemandian dan sumur artesis (*Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng, 1906—1918, 1919 : 16—24*).

Tahap berikutnya, jalan-jalan di Kota Bandung diperkuat dengan aspal. Jalan yang pertamakali diaspal ialah jalan di arah depan Gedung Keresidenan (sekarang Gubernuran), yaitu Jl. Kebonjukut Kidul dan sekitarnya sampai belok ke Jl. Braga (Affndie, 1969 : 9).

Fasilitas lain yang dibangun sesuai dengan keperluan hidup manusia adalah fasilitas untuk hiburan, rekreasi, kesehatan dan pendidikan. Fasilitas itu berupa gedung sositet, bioskop, "pistren" (*feestterrein* = tempat pesta terbuka), kebun binatang, taman, lapang olah raga, rumah sakit dan sekolah.

Gedung sositet yang terkenal di Kota Bandung ialah *Societeit Concordia* (sekarang Gedung merdeka). Gedung ini didirikan tahun 1895 atas prakarsa para administratur perkebunan *Pre-angerplanters*, opsir tentara Belanda dan kalangan masyarakat Belanda penduduk Kota Bandung. Tahun 1920 dan 1928 diperbaharui dan diperluas sehingga menjadi gedung yang megah serta indah. Di sositet ini diselenggarakan dansa, musik, dan lain-lain bagi masyarakat Belanda.

Di Kota Bandung dibangun pula "pistren" sebanyak empat buah, yaitu Elita di alun-alun, Orion di Kebonjati, Empres di Suniaraja, dan Orange di Cikakak. Gedung bioskop ada tiga buah, yaitu Elita, Oriental, dan Apollo. Di "pistren" dan gedung

bioskop kadang-kadang dipertunjukkan opera, ketuk tilu, pen-
cak silat, tinju, dan lain-lain. (Affandie, 1969 : 38-51, 60-76).

Di Bandung Utara dibangun tempat rekreasi, yaitu *Dago Theehuis* di Bukit Dago dan Bumi Sangkuriang di Ciembuleuit. Pusat tempat kegiatan kesenian dan bursa tahunan bertempat di kompleks *Jaarbeurs* Jalan Aceh. Di sekitar pusat kota dibangun taman-taman rekreasi, seperti *Pieterpark* (Taman Merdeka) *Jubileumpark* (Tamansari), *Yzermanpark* (Taman Ganescha-ITB), *Insulindepark* (Taman Lalulintas), dan *Molukkenpark* (Taman Maluku).

Fasilitas/sarana ibadah juga tak lupa dibangun yang diawali oleh pembangunan Masjid Agung. Selanjutnya berdiri gereja-gereja masing-masing di Jl. Wastukencana dan Jalan Merdeka.

Rumah sakit yang pertamakali didirikan di Kota Bandung berlokasi di tempat Kantor Telepon sekarang (Jl. Lembong) dengan kondisi yang masih sangat sederhana. Dalam tahap pembangunan kota selanjutnya didirikanlah *Ziekenhuis Juliana* (RS Hasan Sadikin), *Ziekenhuis Borromeus* (RS Borromeus), *Zendingshospital Immanuel* (RS Immanuel). Rumah sakit-rumah sakit ini merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya angka kematian di Kota Bandung rendah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain (Affandie, 1969 : 15 dan Arsip Nasional, 1976).

Kota Bandung mulai mendapat fasilitas pendidikan formal yang baik pada tahun 1866 dengan dibukanya *Kweekschool* (Sekolah Guru). Di kalangan masyarakat, sekolah ini dikenal dengan sebutan "Skola Raja". Sekarang gedungnya masih ada dan menjadi gedung Komdak VIII Langlangbuana di Jalan Merdeka.

Tahun 1878 *Hoofdenschool* (Sekolah Pamongpraja) di buka di Kota Bandung. Masyarakat Sunda menyebutnya "Sakola Menak", karena murid-muridnya putera para menak/priyayi, seperti bupati, patih, wedana dan yang sederajat. Tahun 1900

namanya diubah menjadi OSVIA – *Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren*. (Arsip Nasional, 1976 : LXIV).

Sejak saat itu jumlah sekolah di Kota Bandung cukup banyak ragam dan tingkatannya, mulai sekolah paling dasar sampai sekolah tinggi, seperti Taman Kanak-kanak (*Froebel school*), Sekolah Dasar Kelas Satu dan Dua (*Eerste en Tweede Klasse Inlandsche School*), HIS (*Hollandsch Inlandsch School*) tahun 1914. Ada pula Sekolah Desa *Volkschool*, MULO (tingkat SMP), dan AMS (tingkat SMA), *Hoogere Kweekschool* (Sekolah Guru Tinggi), dan lain-lain termasuk sekolah-sekolah wanita dan sekolah yang didirikan oleh Paguyuban Pasundan.

Keuntungan lain bagi Kota Bandung dalam bidang pendidikan ialah didirikannya *Technische Hoogeschool* (ITB sekarang) pada tanggal 3 Juli 1920. Dalam tahapan masa selanjutnya, perguruan tinggi ini mempunyai arti historis yang penting bagi kebangkitan kesadaran nasional bangsa Indonesia dalam mencapai hak kemerdekaannya. Dari lembaga pendidikan ini telah lahir beberapa tokoh pergerakan nasional Indonesia (Kunto, *op. cit.* : 187–188 dan *Sejarah Bandung, 1945–1950*, 1981: 40–43).

Tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya yang lahir dari dunia pendidikan di Kota Bandung, kemudian menjadi tokoh dalam masa revolusi kemerdekaan adalah Ir. H. Juanda, Ir. Ukar Bratakusumah, Sukanda Bratamanggala, R.A.A. Wiranatakusumah, dan Otto Iskandar di Nata. Demikianlah, perkembangan pendidikan di Kota Bandung telah mempengaruhi volume, corak, dan tingkat pergerakan nasional Indonesia.

Kedudukan, sarana dan fasilitas tersebut di atas telah menyebabkan Kota Bandung sebagai salah satu titik pendalam Wawasan Nusantara.

3.3. *Mobilitas Penduduk*

Dalam uraian sub bab 2.3 ditunjukkan bahwa perkembangan penduduk Kota Bandung dari tahun ke tahun meningkat

terus. Kenaikan jumlah penduduk itu terutama terjadi pada dua golongan, yaitu golongan penduduk pribumi dan golongan penduduk Eropa, khususnya Belanda.

Pertambahan penduduk itu terlihat sejak akhir abad ke-19. Hal ini erat hubungannya dengan perkembangan transportasi dan perkembangan tingkat urbanisme. Kedua hal tersebut menyebutkan Kota Bandung menjadi berbagai pusat kegiatan bagi daerah sekitarnya yaitu pusat administrasi, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertanian, pusat pendidikan dan kebudayaan.

Kota Bandung menjadi pusat berbagai kegiatan diakibatkan pindahnya berbagai kantor pusat dari instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini menimbulkan banyak lapangan kerja tersedia di Kota Bandung. Hal tersebut telah menarik penduduk dari luar Bandung untuk berdomisili di "kota Asia Afrika", kota perjuangan berbagai bangsa.

Golongan pribumi yang masuk ke Kota Bandung sebagian besar berasal dari kota-kota kecil di luar Bandung, misalnya dari Bogor, Tarogong, Ciamis, Ciparay, Surendang, dan lain-lain. Di Kota Bandung – semula – mereka tinggal berkelompok, sehingga lahirilah perkampungan atau babakan dengan nama asal mereka.

Adapun golongan pribumi dari luar Jawa Barat dan luar Jawa yang masuk ke Kota Bandung berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain. Golongan Eropa masuk ke Kota Bandung – selain para pejabat pemerintah – sejalan dengan perkembangannya perkebunan, berkembangnya sarana dan fasilitas kota, setelah Kota Bandung berstatus *gemeente*. Di samping itu, mereka bermukim di Bandung karena faktor geografisnya, baik suhunya udara yang nyaman maupun kesuburan tanahnya. Sedangkan orang Cina dan Timur Asing lainnya datang ke Kota Bandung antara lain karena faktor perdagangan dan industri.

Datangnya orang-orang Jawa (Banyumas, Pekalongan) ke Kota Bandung dimulai pada perempatan ketiga abad ke-19. Kedatangan mereka sejalan dengan usaha pembukaan sawah di daerah Cileunyi (± 20 km) sebelah timur Kota Bandung. Mereka datang ke Bandung dalam rangka menghindari penderitaan akibat pelaksanaan kulturstelsel (Suryadi, 1974 : 31).

Sejak tahun 1924 Kota Bandung telah memperlihatkan sifat urban yang jelas dengan surplus wanita. Angka kematian laki-laki lebih tinggi daripada wanita. Hal ini biasanya dikaitkan dengan kenyataan bahwa laki-laki mengambil bagian terbesar dalam kegiatan kehidupan (Wertheim, 1958 : 235).

Dalam periode 1950-1960 an terjadi urbanisasi yang tinggi. Dalam periode tersebut urbanisasi ke Kota Bandung rata-rata 20% per tahun (Haryadi, 1976 : 26).

Tingginya angka urbanisasi itu antara lain disebabkan keamanan di sekitar daerah Bandung tidak terjamin akibat gangguan gerombolan DI/TII. Karena faktor keamanan itu penduduk dari luar Bandung banyak yang mengungsi ke Kota Bandung. Setelah keamanan pulih kembali, para pengungsi itu enggan untuk kembali ke daerah asalnya. Salah satu alasannya adalah terbatasnya lapangan kerja di daerah mereka. Dalam tahap selanjutnya, alasan kedua lah yang menyebabkan banyak pendatang kemudian bermukim di Kota Bandung. Sebalikny jumlah orang yang ke luar Kota Bandung relatif sedikit. Hal itu dengan sendirinya telah menyebabkan melonjaknya jumlah penduduk di Kota Bandung. Apalagi waktu itu jumlah kelahiran lebih banyak daripada jumlah kematian. Demikianlah dalam periode itu, "Bandung heurin ku tangtung" (Penduduk Bandung melimpah).

Bagaimana melonjaknya penduduk Kota Bandung waktu itu, data berikut kiranya cukup memberi gambaran.

Tahun 1964, pendatang yang kemudian berdomisili di Kota Bandung berjumlah 27.833 jiwa. Pindah ke luar Bandung

sejumlah 10.378 jiwa. Kelahiran berjumlah 17.970 jiwa, meninggal 3.247 jiwa. Dengan demikian pertambahan penduduk Kota Bandung pada tahun 1964 adalah 32.178 jiwa, dan jumlah penduduk pada akhir tahun 1964 adalah 1.052.592 jiwa (*Mingguan Sunda*, 2, I, 27 Feb. 1965 : 14) dengan luas wilayah 8.098 ha.

Demikianlah kedudukan Kota Bandung di samping kedudukan administratif sebagai pusat berbagai kegiatan telah menyebabkan pula perubahan suasana kota dan daerah sekitarnya yang berpengaruh secara timbal balik antara penghuni dan tempatnya. Timbul pengangguran, perumahan darurat, suasana kota jadi kotor dan kesehatan menurun.

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa melonjaknya kenaikan jumlah penduduk Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor :

- a). pertumbuhan secara alamiah.
- b). kematian lebih rendah dari kelahiran;
- c). urbanisasi; dan
- d). terjadinya benturan-benturan antara kota dengan daerah-daerah sekitarnya.

Mengingat hal itu, dalam tahapan selanjutnya dibangunlah pemukiman-pemukiman baru, baik tingkat rendah maupun tingkat menengah, seperti di Sedangserang, Sukaluyu, Padasuka, Cijagra, Cigadung, Sarijadi, Buahbatu, Margahayu, Arcamanik, dan lain-lain. Sejalan dengan ini jaringan jalan pun diperluas, kampung-kampung diperbaiki, dan lahirnya Pola Pengembangan Bandung Raya.

BAB IV PEMERINTAHAN DAN ASPEK POLITIK KOTA (SEJAK 1950)

4.1. *Kedudukan dan Fungsi Administratif Kota.*

Kota Bandung terletak pada 107°36' Bujur Timur dan 6°35' Lintang Selatan. Keseluruhan wilayah kota yang seluas 8.098 Ha itu terletak pada dataran tinggi Bandung, dikelilingi oleh kota-kota kecil seperti :

- Padalarang dan Cimahi di sebelah barat.
- Lembang dan Cisarua di sebelah utara.
- Ujungberung di sebelah timur, dan
- Dayeuh Kolot, Banjaran, dan Soreang di sebelah selatan (Ir. Eddy Haryati, 1976: 15).

Dipandang dari letak geografis, kedudukan kota dan kabupaten Bandung, terletak di pusat daerah Jawa Barat, karenanya merupakan daerah yang strategis di tinjau dari segi komunikasi, sosial ekonomi, kultural dan politik. Demikian pula kota Bandung mempunyai kedudukan yang strategis dalam bidang militer. Kota Bandung sebagai ibukota Daerah Tingkat I Jawa Barat, merupakan tempat arena dari segala kegiatan tersebut di atas, yang sudah tentu memerlukan ruang gerak yang cukup bagi setiap penyelenggaraan fasilitas-fasilitas kebutuhan perkembangannya (*Ibid.* : 1976 : 21).

DAFTAR CATATAN BAB III

1. Sejak 1921 Kota Bandung telah memiliki pembangkit tenaga listrik kecil di Dago. Tahun 1924 mendapat tambahan tenaga listrik dari Sentral Lamajang (Cisangkuy) Kunto, 1984 : 258 – 259.

Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi administratif kota dibagi dalam dua bagian yaitu :

4.1.1. *Sebelum 1950*

Seperti telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung sampai dengan Perang Dunia II (sebelum 1945), merupakan buah pemikiran kaum kolonial yang berkuasa atas negara kita yang dijajah sampai saat itu. Sudah tentu pula perencanaan fisik kotanya itu dibentuk atau diciptakan sedemikian rupa sehingga susunan atau struktur kotanya itu didasarkan pandangan dan kepentingan golongan mereka yang berkuasa dan menentukan segala sesuatunya itu, dengan tanpa atau kurang memperhatikan jiwa dan perikehidupan penduduk pribumi dalam tata kehidupan kota yang menyeluruh.

Keadaan struktur fisik Kota Bandung hingga sekarang ini, merupakan suatu fakta yang nyata, bahwa hal ini merupakan pandangan fikiran kaum kolonial yang diwariskan kepada kita.

Setelah ibukota Keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung (1864) maka Kota Bandung mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai ibu kota kabupaten dari ibukota keresidenan. Waktu itu yang menjadi bupati Wiranatakoesoemah IV (1846 – 1874).

Dengan dikeluarkannya ordonasi pembentukan *Gemeente* Bandung pada tanggal 21 Februari 1896, maka sejak tanggal 7 April 1906 Bandung ditetapkan oleh Gubernur Jenderal J.B. van Heuth menjadi *gemeente*. Tujuan utama dari pembentukan *gemeente* ini adalah untuk memelihara kepentingan orang-orang Eropa, khususnya orang-orang Belanda, sehingga masyarakat *gemeente* merupakan *Een Westers Enclave* yang diatur oleh hukumnya sendiri di tengah-tengah masyarakat pribumi yang juga mempunyai tataan hukum tersendiri sejak berabad-abad sebelumnya.

Walaupun demikian, pemerintah kolonial menganggap bahwa orang-orang Eropa harus mempertahankan hukumnya sendiri, malah harus mendesak hukum yang mengatur perikehidupan bangsa Indonesia. Masalah yang terutama diatur dan diurus oleh pemerintah *gemeente* ialah kepentingan dan keperluan golongan Eropa dan mereka yang tunduk kepada hukum Eropa atau orang timur asing. Sedangkan bangsa pribumi, meskipun berada di daerah yang sama, tetap berada di bawah kekuasaan bupati dengan hukum adatnya. Jadi daerah yang sama ada dua penguasa pemerintahan umum, tetapi penguasa *gemeente* mendapat bantuan dan fasilitas yang lebih baik dari pemerintah kabupaten. Bangsa pribumi dibiarkan "berotonomi di tingkat desa" masing-masing yang dipimpin oleh bupati (Pemerintah Kotamadya Bandung, *op. cit.* ; 1984 : 39).

Struktur atau susunan tubuh Kota Bandung setelah menjadi *gemeente* terbagi dalam 3 kelompok daerah. Ketiga kelompok daerah itu adalah :

- 1). Daerah sebelah utara jalan raya pos. Daerah ini merupakan daerah pemukiman bagi orang-orang Eropa, yang merupakan lingkungan masyarakat tersendiri. Daerah tersebut ditata dengan baik secara planologis, jalan besar, pertamanan-pertamanan, tempat-tempat rekreasi terbuka yang indah. Pusat pemerintahannya yaitu *gemeente* (balai kota sekarang). Tempat-tempat bangunan militer terletak di sebelah timurnya.
- 2). Daerah sebelah barat. Daerah ini merupakan daerah perdagangan yang ditempati oleh bangsa Asing – Timur, memudahkan transportasi dengan Jakarta (Batavia) bagi perekonomian. Penentuan letak sebelah barat ini, agar kegiatan perekonomian tidak mengganggu lalu lintas ke daerah pusat kota atau daerah kediaman orang-orang Eropa (sebelah barat poros jalan utara-selatan).
- 3). Daerah sebelah selatan, yaitu daerah yang diperuntukan bagi kediaman dan kehidupan penduduk pribumi. Pola

daerah ini tidak direncanakan secara planologis yang baik seperti halnya bagi daerah utara. Adanya jalan-jalan kecil dan gang-gang, tidak adanya taman-taman, susunan kelompok perumahan merupakan perkampungan-perkampungan. Fasilitas-fasilitas sosial penduduknya seperti tempat-tempat pendidikan, rumah sakit, pasar-pasar dan lain-lain tidak terdapat (Ir. Eddy Haryadi, 1976 : 19.)

Seperti telah diuraikan di atas bahwa Kota Bandung menjadi *gemeente* yang berarti bahwa Kota Bandung menjadi daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus beberapa hal tertentu sebagai bagian dari rumah tangga sendiri.

Sekalipun secara fisik Kota Bandung itu merupakan suatu kesatuan darah kota, namun di dalamnya terdapat dua pemerintahan, yaitu :

1. **Gemeente**

Pemerintahan bagi orang-orang Eropa dan bangsa Timur Asing yang bertempat kediaman di daerah utara dan barat. Struktur kelompok pemerintahan terletak di daerah *gemeente* itu pemerintah daerah kota bagian utara dan barat. Struktur kelompok pemerintahan terletak di daerah balai kota, sekarang di sekitar lapangan terbuka (kebun raya dan halaman balai kota). Di sekitarnya terletak bangunan-bangunan : gedung pemerintah *Gemeente*, sekolah, dua gereja (Katolik dan Protestan), bangunan bank (*Javasche Bank*), kantor pusat polisi, bangunan militer sebelah timurnya, dan pertokoan (Braga) di sebelah selatannya (Pemerintah Kotamadya Bandung : 1984 : 35.)

2. **Pemerintah Kabupaten (*Regentschap*)**

Daerah Kabupaten Bandung diperintah oleh penguasa pribumi, termasuk penduduk yang ada di kota, karena sebagian penduduk pribumi itu berkediaman di kota bagian selatan, sehingga merupakan gambaran bahwa kota sebelah selatan ini di bawah pemerintahan kabupaten, se-

hingga dengan demikian maka kelompok-kelompok kehidupan kota bagian selatan ini terdiri dari bentuk-bentuk desa yang dikepalai oleh lurah-lurah, camat-camat, dan wedana-wedana. Demikian pula daerah perkampungan yang terdapat di bagian utara kota atau barat dan timur. Struktur komplek pusat pemerintahan terletak sekitar alun-alun Bandung, yang terdiri dari bangunan-bangunan : pendopo kabupaten sebagai pusat pemerintahan, mesjid tempat beribadah, penjara, yang digunakan bagi pelanggar hukum pemerintah kolonial baik kriminal, maupun yang menentang pemerintah (politik), dan alun-alun tempat berkumpul penduduk.

Kalau melihat susunan tersebut, alun-alun berfungsi sebagai tempat berkumpul penduduk itu dikelilingi oleh unsur tempat pemerintahan mesjid dan penjara, justru kompleks itu merupakan pusat pemerintahan yang memerintah penduduk Indonesia, maka hal ini merupakan gambaran seolah-olah penduduk pribumi itu harus melihat bahwa bila tidak mentaati pemerintah itu penjaralah tempatnya, atau pemerintahan dengan menahan segala tekanan serta untuk menentramkan batinnya itu mesjidlah tempat beribadahnya. Hal ini kemungkinan besar adanya latar belakang politik pemerintah kolonial dalam penyusunan kompleks tersebut sebab di pusat-pusat pemerintahan *gemeente* penjara itu tidak ada, yang ada gereja. Hal ini dapat diartikan pula bahwa pusat pemerintahan hanya untuk tempat beribadah menonjolkan untuk kesejahteraan pemerintah dengan penduduknya. Tetapi dengan adanya penjara, hal ini menunjukkan adanya ancaman-ancaman kepada penduduknya, yang memudahkan proses pemerintah terhadap yang melanggar atau yang menentangnya. Sebenarnya penempatan penjara itu tidak perlu di pusat-pusat pemerintahan, bahkan sebaiknya di luar pusat aktivitas kota.

Dari keterangan tersebut di atas, jelas merupakan suatu gambaran bahwa Kota Bandung yang sekarang ini dalam bentuk

maupun strukturnya, masih mencerminkan struktur kota yang berlaku bagi kehidupan pada zaman kolonial, yang membedakan kepentingan kelompok pribumi dan mereka sendiri, maupun penyelenggaraan fasilitas sosialnya di tiap wilayah kota, yang kini merupakan warisan di mana kehidupan zaman kolonial telah lenyap, dan bangsa kita sendiri yang menghuninya (Ir. Edy Heryadi, 1976 : 20).

Menjelang penyerahan pemerintah kolonial Belanda kepada Jepang, nama Kota Bandung tak dapat dilupakan dalam penulisan sejarah. Sebab pada waktu itu pemerintah tertinggi Belanda, baik Sipil (Gubernur Jenderal), maupun Militer (Panglima Tertinggi Angkatan Perang Hindia Belanda) berada di Kota Bandung.

Pada waktu perundingan penyerahan itu yang diadakan di Kalijati — Subang tanggal 8 Maret 1942 kota Bandung menjadi taruhan. Pihak Belanda bermaksud hanya akan menyerahkan Kota Bandung saja, tetapi pihak Jepang menginginkan penyerahan Belanda tanpa syarat untuk seluruh Hindia Belanda. Akhirnya Belanda bertekuk lutut kepada Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu, 5 orang pemuka Kota Bandung yaitu Ir. Oekar Bratakoesoemah, Dr. R. Djunjunan Setiakusumah, Duyeh Suharsa, dan Anwar Soetan Pamuncak mengadakan pertemuan untuk membicarakan tentang situasi umum di tanah air kita, khususnya keadaan Kota Bandung setelah Jepang menyerah. Dalam pertemuan itu diputuskan supaya Walikota Bandung RAA. Atmadinata menyerahkan kekuasaannya kepada kelima orang tadi selaku panitia peralihan kekuasaan kota. Tetapi RAA. Atmadinata tidak mau menyerahkan kekuasaannya saat itu dengan alasan belum ada perintah dari Dai Nippon (Pem. DT' II Kotamadya Bandung, 1984 : 50). Namun demikian, pada tanggal 2 September 1945, secara resmi dilakukan pengambilalihan seluruh kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa pada tanggal itu pula Bandung me-

rupakan pemerintah Nasional Kota Bandung, dengan Walikota-nya R. Samsoerizal, merangkap sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Kota Bandung.

Pemerintah Nasional Kota Bandung tidak dapat segera berfungsi dengan baik dan kedudukannyapun labil, hal ini disebabkan masuknya tentara Sekutu ke Kota Bandung. Sebagai akibatnya wilayah Kota Bandung dibagi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan dengan batasnya jalan kereta api (29 November 1945).

Kota Bandung dengan radius 11 km dari pusat kota harus dikosongkan, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung terpaksa mengungsi ke luar kota dan berkedudukan berturut-rurut di Soreang, Ciparay, Garut, Tasikmalaya dan Ciparay. Hal ini berlangsung sampai lahirnya persetujuan Renville tanggal 17 Januari 1949 (Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, 1984 : 52).

Pada masa berlakunya "Negara Pasundan" (24 April 1948 – 11 Maret 1950) Kota Bandung kembali kepada statusnya *stadsgemeente* dengan sebutan *Haminte Kota Bandung*. Tetapi status ini tidak berlangsung lama. Bersama dengan lenyapnya "Negara Pasundan", hilang pulalah istilah "Haminte Kota Bandung" (13 Maret 1950) diganti dengan sebutan "Kota Besar Bandung", mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950 (*Ibid* : 54).

4.1.2. Sesuah 1950

Sebutan Kota Besar Bandung hanya berlangsung sampai tahun 1955. Setelah itu berdasarkan UU No. 1 Tahun 1957, sebutan Kota Besar Bandung berubah menjadi "Kotapraja Bandung". Hal ini mengakibatkan dualistis. Kepala Daerah Kotapraja otonom tidak dengan sendirinya menjadi Kepala Pemerintahan Umum, karena pemerintahan umum dikepalai oleh walikota sebagai kepala pamongpraja. Kepala daerah pada wak-

tu itu. R. Priatnakoesoemah, sedangkan walikotanya ialah R. Prawirasasmita.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas yang diperkuat dengan surat edaran Walikota Kepala Daerah Bandung No. 637 tertanggal 19 Maret 1966, secara resmi Kotapradja Bandung berubah menjadi Kotamadya Bandung dengan Walikota R. Didi Djukardi, yang tetap berlaku hingga sekarang (*Ibid* : 56).

Kedudukan kota ini terus berlangsung sampai sekarang. Faktor lain yang harus diperhitungkan dalam pengembangan Kota Bandung ialah ke mana arah dan fungsi Kota Bandung dalam perkembangannya itu. Sebab fungsi kota akan menentukan pula bentuk dan struktur fisiknya, sesuai dengan fungsinya.

Dari tinjauan umum telah digambarkan kemungkinan-kemungkinan arah perkembangan kota menuju ke arah fungsinya. Adapun faktor-faktor yang nyata hidup dalam tubuh Kota Bandung dapat menunjukkan data-data ke arah perkembangan berdasarkan fungsinya yaitu :

- 1). Bandung Sebagai Ibukota Daerah Tingkat I
 - a). Sebagai pusat pemerintahan Jawa Barat dan instansi/jawatan-jawatan vertikal yang setingkat.
 - b). Tempat aktivitas sosial, ekonomi, kultural dan politis Jawa Barat.
 - c). Pusat Hankam Jawa Barat.
 - d). Pusat pemerintahan DT II Kabupaten Bandung.
- 2). Kota Pusat Pendidikan dan Kebudayaan
 - a). Kota universitas baik tingkat regional maupun nasional, ada 10 universitas dan 30 akademi di kota Bandung ini.
 - b). Keadaan iklim dan keindahan alam, memungkinkan adanya ketenangan dalam lapangan ilmu pengetahuan.
 - c). Pusat aktivitas kesenian dan kebudayaan baik daerah maupun nasional.

3). Kota Pariwisata.

Keadaan geografis, topografis serta iklimnya yang cukup baik serta fasilitas-fasilitas rekreasi yang ada dengan dihubungkannya Kota Bandung sebagai pusat kebudayaan memungkinkan berkembangnya obyek kepariwisataan regional Bandung ini.

4). Kota Perdagangan dan Industri.

- a). Sebagai pusat perdagangan regional Jawa Barat dan Kabupaten Bandung (penyalur dan penampung).
- b). Industri sebagai sumber-sumber lapangan pekerjaan penduduk baik kota maupun regional, sumber produksi daerah dan nasional. Industri yang berkembang: sandang pangan, pharmasi, bahan bangunan, metal, hcmc industri, transportation (Ir. Edi Heryadi, 1976: 49).

4.2 *Pembagian Administrasi Kota*

Pembagian administratif dari wilayah pemerintahan Kota Bandung telah beberapa kali mengalami perubahan, baik zaman pemerintahan Belanda maupun zaman pendudukan Jepang dan masa-masa berikutnya.

Pada masa pemerintahan Belanda, daerah Bandung meliputi 17 desa, yaitu 10 desa yang berada dalam wilayah Kota Bandung, dan 7 desa berada sebagian di dalam dan sebagian lagi di luar daerah Kota Bandung seperti terlihat pada bagan di halaman berikut (Basoeni, 1956 : 179).

Pada masa pemerintahan Jepang terjadi sedikit perubahan yaitu wilayah pemerintahan *Bandung Si* yang semula 17 *ku* (desa) seperti tersebut di atas, secara administratif terbagai dalam 14 *ku*, seluruhnya terletak dalam daerah *Bandung Si*. Keempatbelas *ku* itu ialah : Bandung Kulon, Pasar Suniaraja, Astananyar, Regol, Andir, Cicendo, Lengkong, Cikawao, Balubur, Bandung Wetan, Cibeunying, Kiaracondong, dan Gumuruh.

Wilayah Pemerintahan *Bandung Si* dibagi dalam 7 *siku* yaitu :

- 1). *Bandung Kulon Siku* yang meliputi 5 *ku*, ialah *Bandung Kulon Ku*, *Pasar Ku*, *Suniaraja Ku*, *Astanaanyar Ku*, dan *Regol Ku*.
- 2). *Andir Siku* yang hanya meliputi 1 *ku*, ialah *Andir Ku*.
- 3). *Cicendo Siku* yang hanya meliputi 1 *ku*, ialah *Cicendo Ku*.
- 4). *Lengkong Siku* yang meliputi 2 *ku*, ialah *Lengkong Ku* dan *Cikawao Ku*.
- 5). *Bandung Wetan Siku* yang meliputi 2 *ku*, ialah *Bandung Wetan Ku*, dan *Balubur Ku*.
- 6). *Cibeunying Siku* yang meliputi hanya 1 *ku*, ialah *Cibeunying Ku*.
- 7). *Kiaracondong Siku* yang meliputi 2 *ku*, ialah *Kiaracondong Ku* dan *Gumuruh Ku*. (Basoeni, *op. cit.* : 180—181).

Mulai tanggal 1 April 1943 kepada wilayah pemerintahan *Bandung Si* ditambahkan 3 *ku*, yang semula termasuk dalam wilayah *Bojongloa Son* (Kecamatan Bojongloa), *Bandung Gun* (Kawedanaan Bandung), *Bandung Ken* (Kabupaten Bandung) yaitu : *Pasawahan*, *Bojongloa*, dan *Babakan Ciparay Ku*, sedangkan *Cibeunying Ku*, karena daerahnya dipandang terlalu besar dijadikan dua *ku* ialah *Cibeunying Kulon* dan *Cibeunying Wetan* (Catatan dari Pem. DT. II Kotamadya Bandung, 1966 : 1—2).

Selanjutnya pembagian administratif dari wilayah pemerintahan *Bandung Si* dalam *siku-siku*, yang telah lama dirasakan kurang efisien — adanya *siku-siku* yang masing-masing hanya membawahi 1 *ku* — diubah dari 7 menjadi 4 *siku* bentuk baru yaitu :

- 1). *Bandung Barat Siku* meliputi 5 *ku* (*Andir Ku*, *Bandung Kulon Ku*, *Pasar Ku*, *Suniaraja Ku*, dan *Cicendo Ku*)
- 2). *Bandung Utara Siku* meliputi 4 *ku*, (*Balubur Ku*, *Bandung Wetan Ku*, *Cibeunying Kulon Ku*, dan *Cibeunying Wetan Ku*)
- 3). *Bandung Timur Siku* meliputi 5 *ku*, (*Kiaracondong Ku*, *Gumuruh Ku*, *Cikawao Ku*, *Lengkong Ku*, dan *Regol Ku*)

- 4). *Bandung Selatan Siku* meliputi 4 *ku*, (*Astanaanyar Ku*, *Pasawahan Ku*, *Bojongloa Ku*, dan *Babakan Ciparay Ku*). (Basoeni, 1956 : 187).

Mulai tanggal 24 Mei 1943 pembagian administratif dari wilayah pemerintahan *Bandung Si* adalah sebagai berikut :

- 1). *Bandung Utara Siku* meliputi 4 *ku* (*Balubur Ku*, *Bandung Wetan Ku*, *Cibeunying Kulon Ku*, dan *Cibeunying Wtan Ku*).
- 2). *Bandung Timur Siku* meliputi 6 *Ku* (*Lengkong Ku*, *Cikawao Ku*, *Gumuruh Ku*, *Kiaracondong Ku*, *Regol Ku*, dan *Batununggal Ku*).
- 3). *Bandung Selatan Siku* meliputi 4 *ku* (*Astanaanyar Ku*, *Pasawahan Ku*, *Bojongloa Ku*, dan *Babakan Ciparay Ku*).
- 4). *Bandung Barat Siku* meliputi 5 *ku* (*Suniaraja Ku*, *Pasar Ku*, *Bandung Kulon Ku*, *Andir Ku*, dan *Cicendo Ku*) (Basoeni, 1956 : 190).

Setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, Wilayah pemerintahan Kota Bandung tidak mengalami sesuatu perubahan dan pembagian administratifnyaupun tetap seperti keadaan pada akhir pendudukan Jepang hanya istilah-istilahnya diganti lagi dengan istilah Indonesia, yaitu *Siku* menjadi kewedanaan dan *Ku* menjadi desa (Monografi Pem. DT II Kotamadya Bandung, 1981 : 10).

Pada masa pendudukan tentara Sekutu, Kota Bandung dibagi dalam 4 *wijk*, masing-masing *wijk* dibagi lagi dalam beberapa *Blok* (Monografi Pem. DT. II Kotamadya Bandung, 1981 : 12).

Ketika di Jawa Barat berdiri Negara Pasundan yang terpusat di Kota Bandung, Kewedanaan-kewedanaan dan desa-desa dihidupkan kembali. Desa-desa dikembalikan lagi kepada statusnya semula sebagai desa otonom. Berdasarkan surat keputusan Wali Negara Pasundan 1949 No. 25) Kota Bandung terbagi atas 4 kewedanaan dan 27 desa, yaitu :

- 1). Kewedanaan Bojonagara, meliputi 4 desa, yaitu : Desa Sukarasa, Desa Sukasari, Desa Sukajati, Desa Cicendo, Desa Andir, dan Desa Cijerah.
- 2). Kewedanaan Cibeunying meliputi 7 desa, yaitu : Desa Padasuka I, Desa Cidadap, Desa Cablong, Desa Balubur, Desa Bandung Wetan, Desa Cibeunying, dan Desa Padasuka II.
- 3). Kewedanaan Tegallega meliputi : 6 desa, yaitu : Desa Bandung Kulon, Desa Pasar, Desa Suniaraja, Desa Astananyar, Desa Babakan Ciparay, dan Desa Bojongloa.
- 4). Kewedanaan Karees meliputi 8 desa, yaitu : Desa Lengkong, Desa Regol, Desa Cikawao, Desa Pasawahan, Desa Batununggal, Desa Gumuruh, Desa Babakan Surabaya, dan Desa Kiaracondong (Basoeni, 1956 : 171). Yang menjadi walikota pada masa itu ialah E. Croes (1949).

Pembagian administratif Kota Bandung setelah bubarnya Negara Pasundan tidak mengalami perubahan lagi, tetap seperti pembagian pada zaman Negara Pasundan tersebut di atas, dengan walikota berturut-turut adalah : R. H. Noeh (1949–1956) dan R. Priatnakoesoemah (1956–1964). Keadaan itu berlangsung sampai Maret 1966. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 1965 No. 83) kedudukan administratif Kota Bandung kembali menjadi "kotamadya", dengan pembagian wilayah administratif sebagai berikut : (1) 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing dikepalai seorang patih (pembantu wilayah kepala daerah) (2) 16 buah kecamatan, masing-masing dikepalai oleh seorang camat, (3) 59 wilayah kerja kelurahan, masing-masing dikepalai oleh seorang lurah, dan (4) 730 buah Rukun Warga (RW) (Pemda DT. II Kotamadya Bandung, 1984 : 15).

Pejabat walikota Bandung pada waktu itu berturut-turut: R. Didi Dukardi (1966–1968), R. Hidayat Soekarmadidjaja (1968–1970), R. Otje Djundjunan Setiakoesoemah (1971–1976), H. Utju Djunaedi (1976–1978), H. Husen Wangsaatma-

dja (1978–1983), dan Ateng Wahyudi (1983–sekarang) (Pemda DT II Kotamadya Bandung, 1984 : 17).

4.3. *Pemekaran Kota*

Seperti telah disebutkan pada bab sebelumnya (Bab II) bahwa wilayah Kota Bandung sampai dengan 1955 meliputi 19 desa, dengan luas areal 8.098 hektar dan jumlah penduduk 839.155 jiwa.

Dilihat dari konsep Rencana Karsten bagi pengembangan Kota Bandung, tampak adanya kesenjangan yang mencolok antara pertambahan jumlah penduduk dan perluasan wilayah. Menurut Karsten sampai dengan tahun 1955 (selama 25 tahun) wilayah Kota Bandung perlu diperluas sampai meliputi 12758 hektar. Luas wilayah tersebut diperlukan bagi menampung jumlah penduduk 750.000 jiwa (lihat halamam). Dengan demikian, perluasan wilayah Kota Bandung hanya mencapai 63% dari yang direncanakan Karsten, sedangkan pertambahan penduduk melebihi 16% dari yang diperkirakan Karsten.

Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dibayangkan pada tahun 1955 Kota Bandung telah menerima beban kepadatan penduduk yang lebih dari semestinya, berdasarkan ukuran perencanaan suatu kota. Kelebihan beban itu makin lama makin berat, berhubung dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Bandung makin lama makin pesat, sedangkan luas wilayahnya tetap. Pertambahan jumlah penduduk itu dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG
ANTARA TAHUN 1950 – 1979

No.	Tahun	Jumlah Penduduk
1.	1950	644.475
2.	1955	839.155
3.	1966	1.116.387
4.	1976	1.779.000
5.	1979	1.779.283

Sumber : Ir. Eddy HARYADI : Konsep Dasar Pemikiran Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung, 1967 : 24).

Kota Bandung tergolong kota yang paling pesat pertambahan penduduknya bila dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. Pertambahan luas wilayah administratif Kota Bandung tidak dapat mengimbangi cepatnya pertambahan penduduk baik secara alamiah urbanisasi, maupun migrasi penduduk dari luar Pulau Jawa. Pertambahan penduduk secara alamiah di Kotamadya Bandung sama dengan persentasi pertambahan penduduk secara alamiah di Kabupaten Bandung, yaitu rata-rata sebesar 1,8% (Ir. Eddy Heryadi : 1976 : 25, diambil dari data statistik tahun 1958 s.d. 1961). Urbanisasi selalu merupakan persoalan penting dan menyedot bagi kota-kota besar di Indonesia. Sejak tahun 1950, urbanisasi sukar sekali dibendung. Makin tinggi tingkat urbanisasi makin besar pula persoalan yang harus dihadapi.

Jika diambil angka rata-rata kenaikan penduduk sejak tahun 1950 s.d. 1966, yang diperkirakan sebesar 4% setahun, angka rata-rata ini dikurangi dengan natural increase, maka diperoleh angka urbanisasi sebesar 2,20% per tahun (Ir. Eddy Heryadi, 1976 : 26). Angka urbanisasi yang besar ini disebabkan oleh kerja sama yang kuat antara faktor pendorong yang datang

dari daerah rural dan faktor penarik yang datang dari Kota Bandung sendiri.

Daerah rural di sekitar Bandung merupakan daerah pertanian yang padat penduduknya di mana pemilikan tanah per kapita sangat kecil, panen sering gagal karena hama, dan bencana alam, rekreasi sangat kurang dan keamanan sering terganggu. Sebaliknya Kota Bandung yang merupakan kota terbesar di Jawa Barat mempunyai daya tarik yang kuat pula karena lapangan kerja lebih banyak, fasilitas rekreasi cukup banyak, dan keamanan dalam lebih terjamin. Dengan demikian tidaklah mengherankan jika tingkat urbanisasi di Bandung sedemikian besarnya (Ir. Eddy Heryadi, 1976 : 28).

Pada pihak lain pola penyebaran penduduk Kota Bandung pada umumnya berat ke arah selatan dengan alun-alun sebagai pusat konsentrasinya. Terjadinya penyebaran penduduk yang tidak merata ini, di samping karena perbedaan-perbedaan keadaan alam juga karena perbedaan pola *land use*

Distribusi penduduk yang tidak harmonis ini merupakan perangsang bagi timbulnya persoalan-persoalan pada sektor lainnya, sehingga Kota Bandung seperti kota-kota lainnya di Indonesia, tidak luput dari berbagai persoalan kota. Beberapa persoalan kota yang paling penting dan harus mendapat perhatian ialah :

1). Masalah Perumahan

Perumahan yang ada di Kota Bandung tidak cukup untuk menampung penduduk kota yang terus bertambah, akibatnya timbullah rumah-rumah yang tidak teratur dan rumah-rumah liar baik di dalam kota sendiri maupun di pinggiran kota, yang merupakan kampung-kampung liar yang menempel di luar kota. Pada tahun 1955 perkembangan kampung-kampung di dalam Kota Bandung semakin bertambah, seperti kampung-kampung di daerah pusat kota yang

sekarang termasuk wilayah Bandung Wetan. Pada tahun 1966 perkampungan dalam Kota Bandung ditandai dengan bermunculannya rumah-rumah liar (rumah yang dibangun tanpa izin pemerintah kota), dibuktikan dengan hasil penelitian Jawatan Perumahan, terhadap kampung-kampung liar, menyebutkan bahwa pada tahun 1966 jumlah penduduk Bandung 1.116.387 jiwa dengan jumlah rumah yang terdaftar sebanyak 87.849 buah (satu rumah 10 orang penghuni yang semestinya), jadi untuk seluruh rumah yang terdaftar hanya bisa menampung 878.490 orang, sisanya 237.897 orang dinyatakan tinggal di rumah-rumah liar. Jadi rumah liar di Kota Bandung ada 23.789 buah. Rumah-rumah ini biasanya didirikan di atas tanah tanpa izin, seperti di perkampungan daerah Cicadas, Babakan Surabaya, Kiaracandong, Sasakgantung, Karapitan, Nyengseret, Pagersih, Jalan Raya Barat (Dep. Pend. & Kebud. Direktorat Jenderal Kebudayaan, IDKD; Perkampungan di Perkotaan Sebagai Wujud Proses Adaptasi Sosial, Kehidupan di Perkampungan Miskin Kota Bandung, 1982/1983 : 13).

2). Masalah lapangan pekerjaan

Akibat dari urbanisasi ini maka banyak penduduk kota yang tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Hal ini disebabkan urbanisasi tidak diimbangi adanya perluasan kesempatan kerja, baik di sektor industri maupun sektor jasa atau kesempatan membuka usaha sendiri. Akibat dari ketimpangan ini telah menimbulkan masalah pengangguran dan hal-hal yang negatif. Karena kesulitan tempat tinggal, pendatang baru yang kebanyakan berbekal pendidikan rendah tinggal di gubuk-gubuk, emperan kota, kolong jembatan. Sebahagian lagi menumpang atau hidup berdesak-desakan dengan saudara atau teman sekampung; timbul masalah kesehatan, kebersihan kota, pendidikan, transportasi dan kriminalitas (B.N. Marbun, S.H. : 1979 : 76).

3). Masalah tanah

Karena kurangnya perencanaan terhadap perkembangan penggunaan tanah, mengakibatkan ketidakaturan dari *Land Use* Kota, sehingga terjadi tidak adanya keseimbangan yang merata dalam perkembangan kota, menyebabkan adanya tanah yang berkembang terlalu pesat (terutama di pusat kota) dan ada daerah yang kurang berkembang atau tidak berkembang. Aktivitas-aktivitas kota terutama di-konsentrasikan di pusat kota seperti : Perdagangan, kantor, rekreasi, pasar dan sebagainya. Daerah perumahan mempunyai kecenderungan berkembang ke daerah di mana fasilitas kota relatif rendah telah ada (Buahbatu, Cibeunying, Cikutra, Kiaracondong). Perdagangan umumnya berkembang di pusat kota dan daerah-daerah di mana terjadi konsentrasi penduduk dan sepanjang jalur jalan raya yang menuju ke luar kota seperti : Andir, Kosambi, Cicadas, dan sebagainya. Masyarakat kekurangan tempat-tempat rekreasi (Taman, lapangan olah raga dan sebagainya) karena tanah di dalam kota sudah habis. Kekurangan akan fasilitas-fasilitas ini menyebabkan timbulnya ketidaktertiban sosial (kenakalan, kejahatan anak-anak). Lokasi industri sering tidak memenuhi syarat perencanaan kota (lokasi industri di daerah perumahan) sehingga menimbulkan polusi (Catatan Pemda DT II Kotamadya Bandung, 1980 : 3). Sedangkan luas Kota Bandung (8.098 Ha) sudah tidak mencukupi kebutuhan akan ruang hidup berdasarkan standard yang layak (100 jiwa/Ha), tahun 1967 kota Bandung berpenduduk 1,3 juta mempunyai *average density* 160,5 jiwa/Ha. Jadi ruang hidup untuk penduduk Kota Bandung yang terus bertambah ini semakin sempit (Ir. Edi Heryadi, 1976 : 13).

- 4). Masalah benturan antara kota dengan daerah di sekitarnya. Ditinjau dari segi perkembangan penduduk kota dan perkembangan penduduk daerah sekitarnya seperti Cimahi,

Lembang, Ujungberung, dan Dayeuhkolot, sekarang telah menimbulkan gerakan-gerakan di mana antara kota dan daerah sekitarnya terjadi benturan-benturan fisik yang tidak teratur di perbatasan kedua daerah tersebut. Di bagian barat, selatan dan timur menunjukkan adanya aktivitas-aktivitas pembangunan sehingga batas kota dengan daerah itu hampir tidak nyata lagi. Kehidupan di batas-batas kota itu hakekatnya dalam lingkungan masyarakat setempat sendiri telah merupakan satu kesatuan sosial tetapi administratif pemerintahan mereka adalah terpisah sebagian ke kota dan sebagian lagi ke daerah kabupaten, di mana ketentuan dan tata pembangunannya maupun fasilitasnya tidak sama, sekalipun dalam satu kesatuan dalam kehidupannya. Hal ini merupakan hal yang tidak sehat.

Di daerah sendiri yang berdekatan dengan kota, timbulnya pembangunan-pembangunan yang tidak menentu, sedang dalam kota sendiri karena kepadatannya timbul pembangunan-pembangunan yang tidak menentu. Kalau hal ini dibiarkan saja timbul dengan sendirinya, bagaimanakah nasib dalam daerah itu, bila perkembangan selanjutnya terus memadat tidak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan kota dengan daerah sekitarnya itu adanya saling tarik-menarik karena kesesakan/kepadatan ruang kota, sedang dari daerah menuju ke arah kota untuk mendekati sumber-sumber mata pencahariannya, maka timbullah benturan-benturan di sekitar kota. Hal ini terus merembet merupakan penempelan-penempelan menuju ke daerah di sekitarnya secara tidak menentu atau sebaliknya mende-sak ke sebelah kota dimana timbulnya bangunan-bangunan darurat tidak teratur dalam tubuh kota.

5). **Masalah banjir dan daerah hijau**

Pertambahan penduduk kota yang cepat telah menyita areal taman, tanah kosong, hutan-ladang di sekelilingnya untuk tempat tinggal atau tempat berusaha, tempat pendidikan, kantor ataupun tempat olah raga dan untuk jalanan.

Hal ini otomatis menggawatnya masalah lingkungan mulai dari menciutnya areal tanaman, merosotnya daya absorsi tanah yang kemudian sering berakibat banjir apabila hujan, masalah sampah dan akibatnya (B.M. Marbun, S.H., 1979 : 114).

6). **Masalah transportasi**

Masalah yang ditimbulkan transportasi ini semakin rumit sehubungan dengan kemajuan teknologi, dan peranannya sejalan dengan tingkat kemajuan ekonomi, sehingga perlu adanya perluasan jaringan jalan di kota Bandung.

7). **Masalah perkembangan ekonomi kota**

Jalan keluar untuk mengatasi semua masalah yang disebabkan kurangnya areal tanah untuk Kota Bandung, maka Pemerintah Daerah Tk. II Kotamadya Bandung berusaha menata Kota Bandung dengan jalan pemekaran sarana-sarana dan perluasan wilayah administrasi (rencana pembuatan master plan dalam konstelasi pengembangan wilayah Bandung Raya).

a). **Pemekaran sarana**

(1). **Sarana perumahan**

Untuk memenuhi kebutuhan perumahan, pemerintah kotamadya Bandung telah menyediakan tanah untuk membangun rumah-rumah untuk penduduk yang mendorong perluasan areal perkampungan dalam kota ini. Daerah perumahan baru ini (pemekaran kota ini) berupa perluasan pemukiman, yaitu Cipaganti, Ciumbuleuit, Gegerkalong. Di timur : Muararajeun, Cikutra, Sukaluyu, Padasuka. Selatan : Cijagra, Buah Batu, Parakan, Tuangga. Di barat : Perumnas Cijerah, dan Sukasari. Tahun 1975 daerah pemukiman ditambah lagi yaitu di selatan : Sekelimus, Timur : Sukaluyu, Jatihandap, Arcamanik, dan di barat laut : Kompleks Gegerkalong, Sarijadi, Kopo, dan Situsaur. Di Bandung Timur dan selatan : Kiaracandong (Dept. Pend. & Kebud. IDKD : 1982/1983 : 14).

- (2). Untuk mengatasi masalah lapangan pekerjaan, Pemerintah berusaha menyalurkan mereka yang belum mendapat pekerjaan dengan jalan mendirikan industri-industri, transmigrasi dan sebagainya.
- (3). Masalah transportasi
Jalan keluar untuk mengatasi masalah transportasi yang sedang dihadapi ialah dengan cara perbaikan manajemen dari usaha angkutan umum dan diadakannya koordinasi dan efisiensi yang optimal. Pola parkir sesuai dengan zaman (meningkatkan tarif parkir menjadi 3 kali lipat) juga harus melokasikan "super market" keluar kota atau ke daerah kota yang direncanakan tidak jadi daerah padat.
- (4). Mengatasi masalah kekurangan tanah yaitu dengan cara perluasan wilayah perencanaan kota yang pada waktu sekarang pemekaran sarana pembangunannya tidak merata, sama dengan pola penyebaran penduduk yaitu lebih berat ke selatan. Yaitu dengan dibangunnya gedung-gedung pusat perbelanjaan di pusat kota (alun-alun), Kosambi dan sebagainya, sehingga padatnya pembangunan di bagian selatan. Hal inipun berakibat kepada pemukiman orang-orang Cina yang pada masa zaman kolonial Belanda berkumpul mengelompok (di Bandung Barat), setelah perang kemerdekaan/tahun 1950, pemukiman Cina ini menyebar sesuai dengan pusat-pusat perbelanjaan.
- (5). Masalah perkembangan ekonomi kota
Bandung terletak di tengah daerah pertanian dan perkebunan, dilihat dari segi perkembangan ekonomi dan letak geografis Kota Bandung dengan penduduknya yang hampir menyamai kota-kota besar. Kota Bandung telah jauh melebihi tingkat perkembangan ekonomi. Hal ini disebabkan perekonomian Indonesia masih terikat oleh pertanian. Masalah tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk dengan perkembangan ekonomi menyebabkan rendahnya pendapatan penduduk per kapita mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dalam penyediaan fasilitas pelayanan,

transportasi dan sebagainya. Hal ini dapat diatasi melalui investasi-investasi yang terarah, sesuai dengan potensi-potensi ataupun fungsi ekonomi yang dimiliki kota dalam hubungannya dengan kota-kota lain dan hinterterlandnya, dengan demikian akan dapat diciptakan lapangan-lapangan kerja yang stabil untuk meningkatkan pendapatan penduduk.

(6). Perluasan daerah administrasi

Seperti telah disinggung di atas bahwa dengan asumsi jumlah penduduk Kotamadya Bandung 3,5 juta jiwa untuk waktu 50 tahun mendatang, maka Bandung mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk memperluas wilayah administratif dari 8.098 hektar menjadi 38.552 hektar. Ternyata Menteri Dalam Negeri dengan Surat No. 135/313/Puod tanggal 22 Januari 1985 menyetujui perluasan Kotamadya Bandung dengan luas areal 17.000 hektar itu mencakup 36 desa dan 7 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bandung. Adapun batas-batas wilayah itu masing-masing Sungai Cibiru di sebelah timur, garis ketinggian 750 m² di sebelah utara, dan jalan terusan Pasteru di sebelah barat, sedangkan yang akan terkena perluasan wilayah Kotamadya Bandung terdiri atas sebagian Desa Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, sebagian Desa Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Cigondewah Girang dan sebagian Desa Cigondewah, Kecamatan Margaasih, Desa Margahayu Utara, sebagian Desa Margahayu Selatan, sebagian Desa Canguang Barat, sebagian Desa Canguang Timur, Desa Cibaduyut, sebagian Desa Pesawahan, Batununggal dan sebagian Desa Sukapura di Kecamatan Dayeuhkolot. Untuk Kecamatan Buahbatu ialah sebagian Desa Cipagalo, sebagian Desa Buahbatu, sebagian Desa Margasari, Desa Sekejati, Desa Cimapokolan, sebagian Desa Cisaranten Kidul, Desa Cisaranten Wetan, Desa Cisaranten Kulon, dan Sukamiskin. Kecamatan Cicadas yaitu sebagian Desa Sindanglaya, sebagian Desa Cikadut, sebagian Desa

Mandalamekar, sebagian Desa Padasuka, sebagian Desa Cibeunying, dan Desa Antapani. Kecamatan Ujungberung terdiri atas sebagian Desa Ciporeat, sebagian Desa Cibiru Kulon, sebagian Desa Cilengkrang I dan II, sebagian Desa Ujungberung Utara dan Selatan, sebagian Desa Cipadug, sebagian Desa Jatimekar, dan sebagian Desa Girimekar (Pikiran Rakyat, tanggal 8 Mei 1985).

Adapun struktur rencana penggunaan tanahnya adalah sebagai berikut :

- a. Pusat Pemerintahan Jawa Barat dengan jawatan-jawatan vertikalnya ditempatkan di sekitar Gedung Sate, sesuai dengan fungsi kegiatan yang bersifat regional hingga memerlukan hubungan langsung dengan lalu lintas regional melalui jalan cepat utara kota.
- b. Pusat pemerintahan kota ditempatkan di sekitar jalan Aceh sesuai dengan fungsi pelayanannya berskala kota, dengan demikian memerlukan lokasi yang sentris agar mudah dicapai dalam memberikan pelayanannya kepada penduduk kota.
- c. Pusat perdagangan ditempatkan di daerah pusat kota dan poros jalan raya kota. Sesuai dengan sifat pelayanannya yang memerlukan lokasi pusat dan berada pada pusat lalu lintas kota dan regional.
- d. Perindustrian ditempatkan di sebelah timur : Kiaracondong, sebelah barat; Cijerah, Andir, Cibuntu dan Jatayu. Dasar pertimbangannya adalah karena dekat dengan sistem lalu-lintas regional serta memiliki sarana-sarana yang memadai. Di samping itu juga untuk menghindarkan gangguan terhadap daerah-daerah perumahan, pendidikan tinggi dan pariwisata.
- e. Pusat Pendidikan Tinggi ditempatkan di bagian utara kota sesuai dengan keadaan daerahnya yang sejuk tenang, terhindar dari pusat-pusat kegiatan kota dan gangguan lain-

nya. Untuk Universitas Padjadjaran rencana akan dipindahkan ke Jatinangor Kabupaten Sumedang.

- f. Kepariwisataaan, kebudayaan dan konferensi, daerah fasilitas dan akomodasinya ditempatkan di daerah pusat kota dan daerah Bandung Utara (Catatan Pemda DT. II Kotamadya Bandung : 1976 : 5).

Sistem sirkulasi Kota Bandung mempunyai kecenderungan berpola *radial consentric*. Oleh sebab dalam pengembangan wilayah kota.

- a. Jalan lingkaran dalam yang berfungsi sebagai penghubung kegiatan antar wilayah kota serta untuk pengembangan wilayah dan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas regional yang melalui pusat kota.
- b. Jalur lingkaran luar berfungsi sebagai penyalur transpor ke daerah perindustrian di wilayah kota dan bagian selatan kota dan untuk mendorong perkembangan kota ke bagian selatan kota.
- c. Karena Kota Bandung berfungsi regional, maka Kota Bandung dilalui pula oleh transpor regional. Untuk menghindari kekacauan dalam sistem transportasi kota dan region, maka diatur sistem transpor region sebagai berikut:
 - (1). Jalan cepat Bandung Utara, melalui kota dari arah Cimahi/sampai Padasuka. Jalan ini berfungsi untuk melayani kegiatan lalu-lintas yang hanya melewati Kota Bandung, di samping untuk melayani daerah-daerah Pemerintah. Pendidikan Tinggi dan Kepariwisataaan.
 - (2). Pasar jalan raya kota, melalui pusat kota (Asia Afrika) jalan ini hanya dikembangkan sebagai jalan raya kota yang berfungsi untuk melayani daerah pusat perdagangan kota.
 - (3). Jalan Bandung By Pass, sebagai jalan baru dari Padalarang melalui Bandung Selatan sampai Cileunyi. Jalan ini berfungsi untuk mengembangkan/pengembangan daerah industri tekstil di daerah Bandung Selatan dan saluran trans-

portasi utama kota dan regionalnya (Catatan Pemda DT. II Kotamadya Bandung : 1976 : 6).

4.4. *Kegiatan dan Kekuatan Sosial – Politik*

Kehidupan politik di Kota Bandung pada dasarnya tidak tepat dipisahkan dari kehidupan politik di seluruh Indonesia. Di Bandung pun pada waktu itu tumbuhlah partai-partai politik dan organisasi masa laksana jamur di musim hujan. Kita mengenal partai-partai politik : Masyumi, NU, PNI, PSI, PSII, PKI, dan sebagainya. Organisasi masa dan organisasi pemuda seperti: BTI, Sarbupri, Pesindo, dan lain-lain (Sewaka : 1955 : 180).

Sekitar tahun-tahun survival (1950–1955) dan tahun tahun Invesment (1955–1959), telah dikeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan daerah Otonom Propinsi Jawa Barat, menjelang pembentukan Pemerintahan Daerah, baik di tingkat propinsi, maupun di tingkat kotamadya dan kota otonom, maka kehidupan serta kegiatan partai-partai politik dan organisasi-organisasi masa dalam tahun 1950 itu telah menjadi-jadi. Pada waktu itu di Kota Bandung tercatat tidak kurang dari 40 partai politik dan organisasi-organisasi masa/buruh. Yang mendapat kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD. yang pertama) tercatat 22 partai politik dan organisasi buruh (Sewaka : 1955 : 280).

Anggota-anggota DPRDS Kota Besar Bandung terdiri dari 31 orang (dilantik tanggal 1 Oktober 1950), berdasarkan sikap baru dari PKI yang berlaku secara integral terhadap DPRDS, telah mengundurkan diri, sehingga jumlah anggota sejak itu sampai akhir bulan Maret 1956 berjumlah 30 orang, terdiri atas : Masyumi sebanyak 11 orang, NU sebanyak 2 orang, PSII sebanyak 1 orang, Partai Katholik sebanyak 1 orang, Parkindo sebanyak 1 orang, PNI sebanyak 1 orang, PNI sebanyak 1 orang, PIR sebanyak 1 orang, Baperki sebanyak 1 orang, Parindra sebanyak 1 orang, Prim sebanyak 1 orang, Permai sebanyak 1 orang, GTI sebanyak 1 orang, BTI sebanyak 1

orang, Derak sebanyak 1 orang, Perk. Kerjasama sebanyak 1 orang, BP BAAPRI sebanyak 1 orang, dan Tidak Berpartai sebanyak 2 orang.

DPRDS Kota Besar Bandung seperti DPRDS Kota-kota Besar lainnya hakekatnya merupakan Dewan Perwakilan Darurat, karena dibentuknya tidak dengan jalan pemilihan umum (Basoeni : 1956 : 233).

Setelah 3 bulan DPRDS Kota Besar Bandung bekerja, sudah timbul desakan-desakan dari pihak masyarakat, supaya DPRDS itu dibekukan karena dianggap tidak demokratis, tapi DPRDS tetap bertahan sampai keluar instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 25/1-1951 No. Des 1/2 - 1951 yang menyatakan bahwa DPRDS berhak terus bekerja seperti biasa. Dan baru mengakhiri masa kerjanya seperti DPRDS kota-kota lainnya yaitu pada tanggal 1 Juli 1956 (Basoeni, 1956 : 229-230).

Kehidupan dan penghidupan sebagian besar dari rakyat, terutama yang ada di desa-desa/gunung-gunung yang jauh dari keramaian kota, jauh berbeda dari kehidupan politik. Mereka senantiasa dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan yang ditimbulkan oleh gerombolan-gerombolan pengacau bersenjata DI-TII yang pada waktu itu terus berkecamuk dipelbagai daerah dan tempat. Puluhan ribu penduduk yang tidak berdosa di desa-desa yang telah menjadi korban dan beratus ratus juta harta kekayaan mereka yang hancur akibat pengacauan DI-TII.

Walaupun kehidupan Negara dan Bangsa dalam tahun-tahun survival 1950-1955, senantiasa tidak lepas dari rongrongan dan penyelewengan, khususnya yang secara langsung dialami oleh masyarakat Kota Bandung seperti pemberontakan "APRA" di bawah pimpinan Westerling, namun khususnya Kota Bandung dan umumnya Republik Indonesia tetap hidup, tetap survive (Evaluasi Pelita II, 1974-1979 : 100).

Perlu dicatat bahwa pada tahun 1955 Kota Bandung mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah Konferensi

Asia Afrika yang telah menghasilkan Deklarasi Bandung yang terkenal itu. Setelah Konstituante terbentuk, hasil Pemilihan Umum pertama 1955 Kota Bandung mendapat kehormatan pula untuk menjadi tuan rumah bagi sidang Konstituante. Namun sayang sekali Konstituante itu gagal dalam melakukan tugasnya.

Kejadian-kejadian seperti disebutkan di atas, dengan sendirinya sangat mempengaruhi kehidupan politik di Kota Bandung, dan yang paling menentukan di antaranya ialah dikeluarkannya dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

Pada tanggal 31 Desember 1959 dikeluarkan Penpres No. 7/59 tentang penyederhanaan kepartaian yang dilaksanakan dengan Penpres No. 13/1960, dalam hal mana Departemen Dalam Negeri diberi tugas menyelenggarakan tata usaha dan dokumentasi (Keputusan Presiden No. 307/1960). Dari jumlah 28 partai/organisasi yang pernah ikut pemilihan umum tahun 1955 kini dapat disederhanakan menjadi 10 partai yang diakui syah sebagai partai berdasarkan Pen. Pres. No. 7/1959 jo. Pen. Pres. No. 13/1960 serta untuk selanjutnya dijamin hak hidupnya dan hak perwaliannya dalam lembaga pemerintahan. Juga di dalam Pen. Pres. No. 7/1959 itu dinyatakan telah dibubarkan 2 partai yaitu Masyumi dan PSI berdasarkan Pen. Pres. No. 200 dan 201 tanggal 17 Agustus 1960. Di samping hak hidup dan hak perwakilan. Pen. Pres. No. 7/1959, juga menertibkan kehidupan partai-partai yang ada dengan mencegah kemungkinan munculnya partai baru, yang disebabkan karena perpecahan dalam tubuh partai (Sewaka, 1955 : 270).

Dalam masa Pelita II di Kotamadya Bandung telah dilaksanakan Pemilihan Umum 1977 yang merupakan pelaksanaan Pemilihan Umum yang kedua dalam zaman masa Pemerintahan Orde Baru. Hasil Pemilu tersebut telah menghasilkan anggota-anggota DPRD Tingkat II untuk priode 1978-1982 dengan komposisi sebagai berikut : FKP (19 anggota), FPP (10 anggota), PDI (5 anggota), dan ABRI (6 anggota) (Evaluasi Pelita II : 1974 - 1979 : 70).

Dari Bandung banyak dihasilkan pemimpin-pemimpin bangsa dan pahlawan atau perintis kemerdekaan. Di Bandung pula terjadi cetusan-cetusan pemikiran yang bermanfaat besar bagi umat manusia. Di Kota Bandung pula Orde Baru atau Orde Pembangunan menjelma dengan korbannya.

BAB V PERANAN EKONOMI KOTA

5.1. *Keadaan, Fungsi dan Peranan Pasar, Pusat Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan*

Seperti kita ketahui bahwa Kota Bandung adalah kota utama di daerah Jawa Barat khususnya serta Indonesia pada umumnya, hal ini telah terbukti dari fungsinya di dalam peranan daerah maupun nasional. Dengan sendirinya maka selain dari Kotamadya Bandung mempunyai potensi-potensi, juga mempunyai/menghadapi pula berbagai permasalahan dan tantangan, yang akan sangat berpengaruh dan pertumbuhannya. Usaha untuk meneliti problematik serta potensi Kota Bandung ini, maksudnya untuk mengetahui sampai di mana hal-hal tersebut berpengaruh pada kepentingan dan kehidupan masyarakat Kota Bandung.

Masalah lain yang ditimbulkan oleh pertambahan penduduk adalah juga gangguan terhadap perimbangan fasilitas pelayanan yang ada, misalnya kebutuhan akan pusat-pusat perbelanjaan, kebutuhan akan angkutan umum, kebutuhan akan air minum, serta fasilitas umum lainnya. Oleh karena itu, maka diusahakan untuk meningkatkan fungsi pasar sebagai kegiatan sarana ekonomi masyarakat yang tertib dan juga sebagai sumber income bagi pembiayaan rutin maupun pembangunan.

Pada awal Pelita I penduduk Kota Bandung berjumlah 1.164.844 jiwa dan kebutuhan akan pasar bagi setiap 1000 jiwa adalah 330 m², sehingga kebutuhan fasilitas pasar diperlukan areal 330.000 m² (33 ha), sedangkan luas pasar yang ada diperkirakan 25.38 ha, sehingga diperlukan penambahan areal pasar 7,62 ha. Akan tetapi usaha menambah pasar bukan masalah yang mudah karena sukarnya memperoleh tanah yang sesuai (Evaluasi Pelita I, 1969/1970–1973/1974 : 20).

Walaupun penambahan areal pasar sulit, tapi selama Pelita I telah dilaksanakan rehabilitasi dan upgrading pasar-pasar, seperti pasar Kosambi (bertingkat), pasar Tegallega, pasar Baru (bertingkat), dan pasar-pasar lainnya dengan swadaya dari para pedagang sendiri untuk memperbaiki bagian-bagian tertentu dalam pasar, misalnya pasar Andir, pasar Ciroyom, dan pasar Babatan.

Selain dari itu telah pula dilakukan pembelian tanah untuk pembangunan pasar baru, dalam rangka melayani akan kebutuhan pasar yang selalu meningkat serta dalam rangka penertiban para pedagang liar, misalnya untuk membangun Pasar Sederhana di Jalan Sederhana seluas 1 ha.

Pembangunan pasar yang patut ditampilkan adalah peremajaan pasar Kosambi, yang dibiayai dengan partisipasi swasta yaitu C.V. Jasa Bakti dengan biaya seluruhnya Rp. 347.040.000,00 yang dimulai pada tanggal 1 Juli 1972 sampai 1 Maret 1974 (2 tahun), pasar Kosambi tersebut sebelum diperbaiki hanya bisa menampung pedagang sebanyak 660 orang, setelah diperbaiki dapat menampung 1.078 orang pedagang (Evaluasi Pelita I, 1969/1970–1973/1974 : 22).

Selain peremajaan pasar Kosambi, diadakan pula peremajaan pasar Baru, mengingat umur dan daya tahan pasar lama yang didirikan tahun 1916, menurut penilaian tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan saat ini. Pasar Baru yang lama dapat memuat pedagang 800 orang dengan adanya peremajaan akan dapat ditampung pedagang 1.285 orang, namun mengingat

pertambahan pedagang yang sudah memenuhi jalan-jalan dan gang-gang di dalam pasar yang tadinya dimaksudkan untuk lalu-lintas publik, pembeli dan untuk tempat berdiri menawarkan barang-barang yang akan dibeli, maka kemungkinan dapat ditambah pedagang baru sampai kurang lebih 500 orang lagi, pembangunan pasar Baru tersebut masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan memakan waktu lebih kurang 6 tahun dengan mempergunakan tenaga kerja lebih kurang 200 orang.

Berdasarkan data dari Jawatan Perdagangan Kotamadya Bandung sampai akhir Pelita I, ada empat macam golongan pedagang yang dilihat dari izin usaha yang telah dimilikinya, yaitu : (1) Golongan Pengusaha Pedagang Besar Asing 6, WNI Keturunan 150, dan Pribumi 264 : Jumlah 528 (2) Golongan Pengusaha/Pedagang Menengah Asing 40, WNI Keturunan 721, dan Pribumi 782, jumlah 1.943 (3) Golongan Pengusaha/Pedagang Pertokoan Asing 1.400, WNI Keturunan 2.689, dan Pribumi 863, Jumlah 4.952 (4) Golongan Pengusaha/Pedagang Warung Asing 60, WNI Keturunan 167, dan Pribumi 6, jumlah 233.

Kegiatan untuk menggalakkan sektor perdagangan dalam hal ini, baik pasar umum maupun pasar hewan, telah menghadapi hambatan penyediaan tanahnya di samping kondisi, lokasi jumlah pasar yang ada pada umumnya belum memenuhi syarat plabologis yang baik. Untuk Kotamadya Bandung masih diperlukan tanah seluas 13.62 ha untuk pasar. (Evaluasi Pelita I, 1969/1970-1973/1974 : 24).

Di samping itu keadaan pasar yang ada sudah tidak memadai lagi untuk menampung para pedagang sehingga pembuatan pasar baru tidak dapat ditangguhkan lagi. Peremajaan beberapa pasar belum dapat melaksanakan masalah pedagang kaki lima yang ada di sekitar pasar tersebut. Selain itu biaya yang tinggi untuk menempati tempat berdagang/pasar-pasar yang telah diremajakan, sehingga mendapat kesulitan dalam penerbitannya. Pembangunan dan pemugaran pasar yang dibiayai dari dana Inpres tahun anggaran 1976/1977, yaitu : Pasar Cicaheum, pa-

sar Dago Atas, pasar Pamoyanan, pasar Sederhana, pasar Gegerkalong, pasar Situsaur, pasar Palasari, pasar Sedangserang, pasar Cihaurgeulis, pasar Karapitan, pasar Sukajadi. Biaya untuk pembangunan pasar tersebut seluruhnya berjumlah Rp. 799.995.000,00 dengan status pinjaman/kredit, yang pada akhirnya Pemerintah Daerah harus mengembalikan secara berangsur-angsur atau mencicil melalui Bank Rakyat Indonesia dan APBD.

Pasar Moch. Toha, yang terletak di daerah Bandung sebelah selatan, termasuk pasar yang penting artinya karena lokasi pasar tersebut berdampingan dengan terminal, sehingga secara ekonomis sangat menguntungkan bagi orang-orang yang akan berbelanja. Mengingat kondisi pasar tersebut sudah rusak sehingga memerlukan adanya perbaikan dan untuk itu pada tahun anggaran 1974/1975 merupakan tahun pertama dari Pelita II, untuk pasar tersebut telah dilakukan perbaikan berat yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 2.700.000,00. Dengan perbaikan pasar tersebut diharapkan akan menambah income yang telah ditargetkan oleh Kotamadya Bandung.

5.2. *Masalah Pedagang Kaki Lima*

Pada umumnya kegiatan perdagangan di wilayah Kotamadya Bandung, kalau dilihat dari status para pedagangnya terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor Formal yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang yang sudah jelas statusnya, telah memiliki tempat berjualan yang tetap dan ramai, dan telah mempunyai izin sesuai dengan kegiatan usahanya. Untuk sektor ini pengamanan maupun penertiban bilamana ada perubahan mudah dilaksanakan, karena sudah tercatat pada instansi-instansi yang mempunyai kewenangan dalam bidang ini. Sektor Informal yaitu kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang, yang termasuk ke dalam katagori pedagang liar, karena pada umumnya para pedagang ini tidak mempunyai tempat berjualan yang tetap, begitu juga surat izin yang ada kaitannya dengan kegiatan usahanya tidak mereka miliki, seperti mi-

salnya para pedagang kaki lima, para pedagang di luar pasar, dan perusahaan dagang yang belum memiliki legalitas perusahaannya. (Evaluasi Pelita II, 1974-1979 : 20).

Pada pedagang yang tergolong sektor informal ini banyak menimbulkan masalah, yang perlu segera diambil kebijaksanaan di dalam menanggulangnya. Karena masalah pedang kaki lima yang semakin lama semakin bertambah di tiap-tiap kota besar, begitu juga di Kotamadya Bandung masalah pedagang kaki lima ini belum bisa ditertibkan.

Walaupun telah ditingkatkan sarana-sarana perdagangan tetapi masih belum bisa menampung kegiatan-kegiatan masyarakat yang bercorak informal sektor di bidang perdagangan, karena penyediaan sarana-sarana tersebut secara fisik masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.

Di samping itu tidak terjangkaunya sarana tersebut oleh tenaga beli masyarakat yang bergerak di bidang sektor informal disebabkan oleh :

- 1). Penyebaran prasarana perdagangan terutama pasar-pasar, telah cukup baik merata di seluruh wilayah kota, tetapi masih dirasakan kurang jelas mengenai spesifikasi (grosier, eceran, jenis) dari pasar-pasar tersebut.
- 2). Masih kurang sinkronnya pembangunan sarana pasar dengan gudang dan pengaturan lalu lintas.
- 3). Belum terlihatnya sarana-sarana perdagangan, berupa pembangunan pusat-pusat kantor dagang di mana pada waktu ini masih menggunakan rumah/daerah perumahan.
- 4). Masih adanya sarana perdagangan/pasar yang menggunakan sarana lalu lintas baik secara permanen maupun temporer. (Monografi Pemda Tk. II Kotamadya Bandung, 1981 : 20).

Untuk menanggulangi pedagang-pedagang informal ini, terutama pedagang kaki lima, maka Kotamadya Bandung telah

melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dibiayai dari APBD, INPRES, maupun kerja sama dengan swasta, yaitu :

- a). Pembuatan kantor keamanan pasar, dengan dibuatnya kantor keamanan ini, maka para pedagang akan merasa aman dari gangguan-gangguan yang akan merusak ketenangan usaha mereka, dengan demikian memungkinkan income yang diperoleh akan meningkat.
- b). Dalam rangka menunjang pengembangan perdagangan telah dibangun pasar Kosambi pada Pelita I. Pembangunan pasar ini sangat membantu para pedagang lemah, di mana kios-kiosnya dapat dipeoleh/dibeli secara langsung dari CV. Jasa Bakti (Monografi Pemda Tk. II Kotamadya Bandung, 1981 : 20).

Keuntungan dari hal ini yaitu meningkatkan income Pemerintah Daerah khususnya pendapatan retribusi pasar. Sedangkan dalam rangka penyediaan sarana tempat berjualan, Kotamadya telah mengadakan pembelian tanah untuk pasar sederhana sebesar Rp. 2.380.000,000.

Dengan direalisirnya pusat perbelanjaan di wilayah Bojonegoro ini di samping dapat memenuhi sarana tempat berjualan, juga mempunyai impact terhadap masalah lainnya. Antara lain dalam rangka penertiban pedagang-pedagang kaki lima yang berada di sepanjang jalan Sukajadi, walaupun secara keseluruhan belum dapat ditampung. Hal yang sangat positif dengan direalisasinya pembangunan Bank pasar dalam lokasi pasar-pasar tersebut, sehingga secara langsung dapat membantu para pedagang ekonomi lemah.

Begitu juga dalam penertiban para pedagang kaki lima di sepanjang jalan Kopo, terutama yang berjualan di depan Rumah Sakit Imanuel. Pemerintah Kotamadya Bandung telah mengadakan usaha penertiban untuk para pedagang tersebut, dengan jalan memindahkan lokasi pasar tersebut ke jalan Leuwipanjang/Situsaeur. Pembebasan tanah untuk pendirian pasar tersebut seluas 3.000 m² dibiayai dari APBD tahun 1975/1976, dengan

menghabiskan biaya sebesar Rp. 13.171.000,00, sedangkan untuk pembangunannya sendiri dilaksanakan melalui dana Inpres Pembangunan dan Pemugaran Pasar tahun anggaran 1976/1977 (Evaluasi Pelita II, 1974-1979 : 104).

Pada awal tahun 1978 lokasi pasar tersebut selesai dibangun dan diharapkan pusat perdagangan ini dapat membantu kelancaran dalam bidang ekonomi pada umumnya dan penerbitan pedagang-pedagang liar (pedagang kaki lima) pada khususnya. Di samping sebagai rangsangan untuk pembangunan sekitar daerah tersebut. Pada waktu pendirian pasar itu, pada umumnya daerah sekitar lokasi merupakan daerah yang masih belum berkembang. Sarana perdagangan yang ada di Kotamadya Bandung, yaitu jumlah pasar yang tersebar di seluruh wilayah Kotamadya Bandung sebanyak 60 pasar dan pusat perbelanjaan yang sebagian besar berlokasi di pusat kota sebanyak 20 buah.

Usaha-usaha Pemerintah Kotamadya Bandung dalam rangka membantu para pedagang ekonomi lemah, selain memberikan fasilitas-fasilitas perdagangan berupa pembangunan pasar-pasar Inpres, juga bantuan dalam bidang permodalan, misalnya pangieujeuh gubernur sebesar Rp. 30.000.000,00, dimana setiap pedagang mendapat bantuan sebesar Rp. 10.000,00 dan kredit dengan syarat dan prosedur yang diatur melalui Bank-bank Pasar Kotamadya Bandung (Evaluasi Pelita II, 1974-1979 : 107).

Jumlah perusahaan dagang di Kotamadya Bandung pada akhir tahun 1981 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 6 JUMLAH PERUSAHAAN DAGANG DI
KODYA BANDUNG PADA AKHIR TAHUN 1981**

Jenis Perusahaan Dagang	Banyaknya
I. FORMAL SEKTOR	
1. Perusahaan revelansir, pemborong bangunan,	567
2. Jasa konsultan	
3. Perusahaan dagang/jasa lainnya (toko, warung, salon kecantikan)	603
4. Kios dalam pasar-pasar	9.763
II. INFORMAL SEKTOR	
1. Pedagang kaki lima	10.000
2. Pedagang di luar pasar	1.808
3. Perusahaan liar lainnya	4.000

Sumber : Monografi Pemd Tk. II Kotamadya Bandung. *op. cit.* :

Usaha untuk meningkatkan kehidupan dan kegiatan ekonomi kota serta lebih meningkatkan dan pemeratakan pendapatan warga kota dengan memberikan kesempatan atas tersedianya fasilitas ekonomi kota.

Kota Bandung bila dilihat dari segi historisnya, fungsional maupun kedudukan geografisnya mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai kota utama di daerah Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena adanya interelasi yang dekat secara fungsional antara Bandung dengan hinter-land di sekitarnya seperti Cima-hi, Padalarang, Lembang, Ujungberung, Daeyuhkolot, Soreang, memberikan kemungkinan untuk mengembangkan kota ini menjadi suatu "Kota Raya" dengan suatu sistem Kota Bandung bersama-sama hinter-land di sekitarnya.

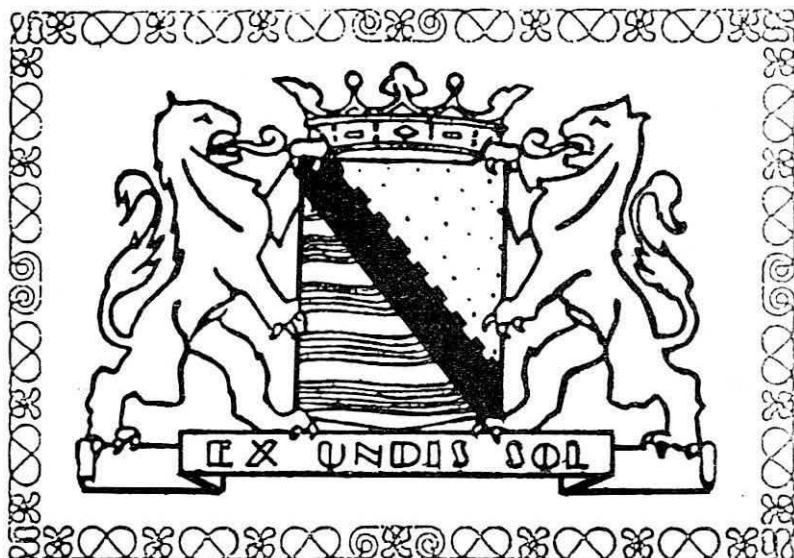
DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Kotapradja Bandung. 1956.
- Bandoeng de Stad op de Hoogvlakte*. Bandoeng, 1918.
- Bapeda Kotamadya Daerah Tk. II Bandung. *Monografi Pemerintahan Daerah Tk. II Kotamadya Bandung*. Bandung, 1981.
- Basoeni. *Buku Peringatan 50 Tahun Berdirinya Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom*. Bandung, 1956.
- *Perdjoangan Kemerdekaan Dalam Kota Bandung Sela-jang Pandang*. Bandung, 1957.
- Bayce, J. *Modern Democracies*. New York, The Mac Millan.
- Bemmelen, R.W. van. "De Geologische Geschiedenis van Bandoengs Omgeving". *Bandoeng Vooruit*. Seri No. 6, 1934.
- Day, Clive. *The Dutch in Java*. Kuala Lumpur, Oxford Union Press, 1966.
- Deenink, A. C. *Aanvullengen op Babad Pasoendan Djeung Ringkesan Babad Hindia*. Groningen, Walter's, 1929.
- Evaluasi Pelita I, 1969/1970-1973/1974*. Pemda Tk. II Kotamadya Bandung.
- Evaluasi Pelita II, 1978-1979*. Pemda Tk. II Kotamadya Bandung.
- Evaluasi Pelita III, 1978-1982*. Pemda Tk. II Kotamadya Bandung.

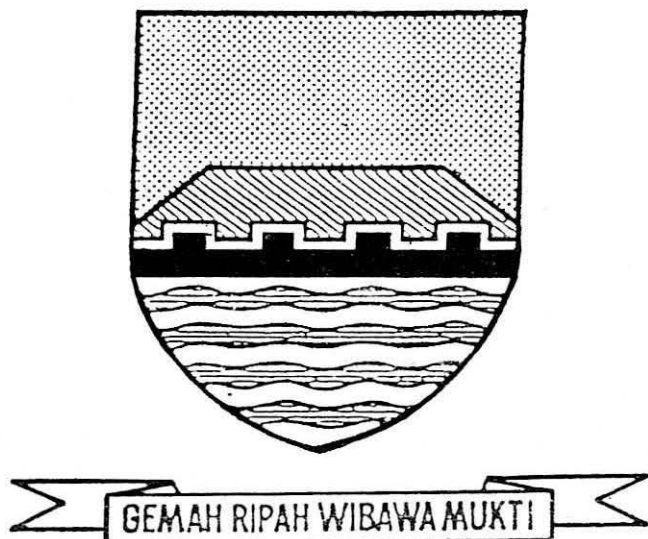
- Evaluasi Pelita III, 1978–1982*. Pemda Tk. II Kotamadya Bandung.
- Groote Bandoeng*, 11, 2de jrf. 1 November 1922.
- Haryady, Eddy. *Konsep Dasar Pemikiran Rencana Induk Kota Kotamadya Bandung*. Yayasan Karya Dharma, Jakarta, 1976.
- Jawa Barat. BKPD. *Sedjarah Perkembangan Pembangunan Daerah Djawa Barat Tahun 1945–1965*. Bandung, 1965.
- Kartaatmadja, Toto dan Nara Sukirna. *Pedoman Kota Besar Bandung*. Djawatan Penerangan Kota Besar Bandung, 1956.
- Kern, R.A. *Geschiedenis der Preanger–Regentschappen: Kort Overzicht*. De Vrijs en Fabricus Boekhandel, 1898.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. *Peranan Kota Dalam Pembangunan Ditinjau Secara Historis, Yuridis, Komparatif, Sosiologis, Ekonomis dan Politis*. Binacipta, Bandung, 1978.
- Kunto, Haryoto. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Marbun. *Kota Masa Depan*. Erlangga, Jakarta, 1979.
- Mingguan Sunda*, 2, 1, 27 Februari 1965.
- Mooi Bandoeng*, Agustus 1933.
- Natanegara, Asik. "Sadjarah Soemedang Ti Djaman Koempenni Toeg Nepi Ka Kiwari". *Volksalmanak Soenda*, 1939.
- Pagoejoeban Pasoendan. *Poesearna Pasoendan*. Vorkink, Bandoeng, 1925.
- Pemda Daerah Tk. II Kotamadya Bandung. *Mari Kita Wujudkan Bandung Bersih Hijau Berbunga*. Bandung, 1984.
- Pikiran Rakyat*, 20 April 1979 1 Februari dan 8 Mei 1985.
- Regeeringsalmanak voor Nederlandsch–Indie*, 2, 1894.
- Reitsma, S.A. & W.H. Hoogland. *Gids van Bandoeng en Omstreken*. Vorkink, Bandung, 1921.
- Sejarah Kota Bandung Periode Revolusi Kemerdekaan (1945–1950)*. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Kerjasama Dengan Universitas Padjadjaran. Bandung 1981.

- Sewaka. *Tjorat-tjaret Dari Zaman Ke Zaman*. Visser, Bandung, 1955.
- Short Guide Bandung and Environs*. (1955).
- Suhandi, Handi. *Tindjauan Sedjarah Terbentuknya Kota Bandung*. (Skripsi). IKIP. FKIS. Bandung, 1970.
- Stuart, A.B. Cohen. *25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie 1905-1930*. Vereeniging voor Locale Belangen en Kerchman. 5. 5h.
- Verslag van den Toestand der Gemeente Bandoeng 1906-1918*. 1919.
- Volksalmanak Soenda*, 1936.
- Wertheim, W.F. *The Indonesia Town*. The Hague, 1958.

Lampiran 1



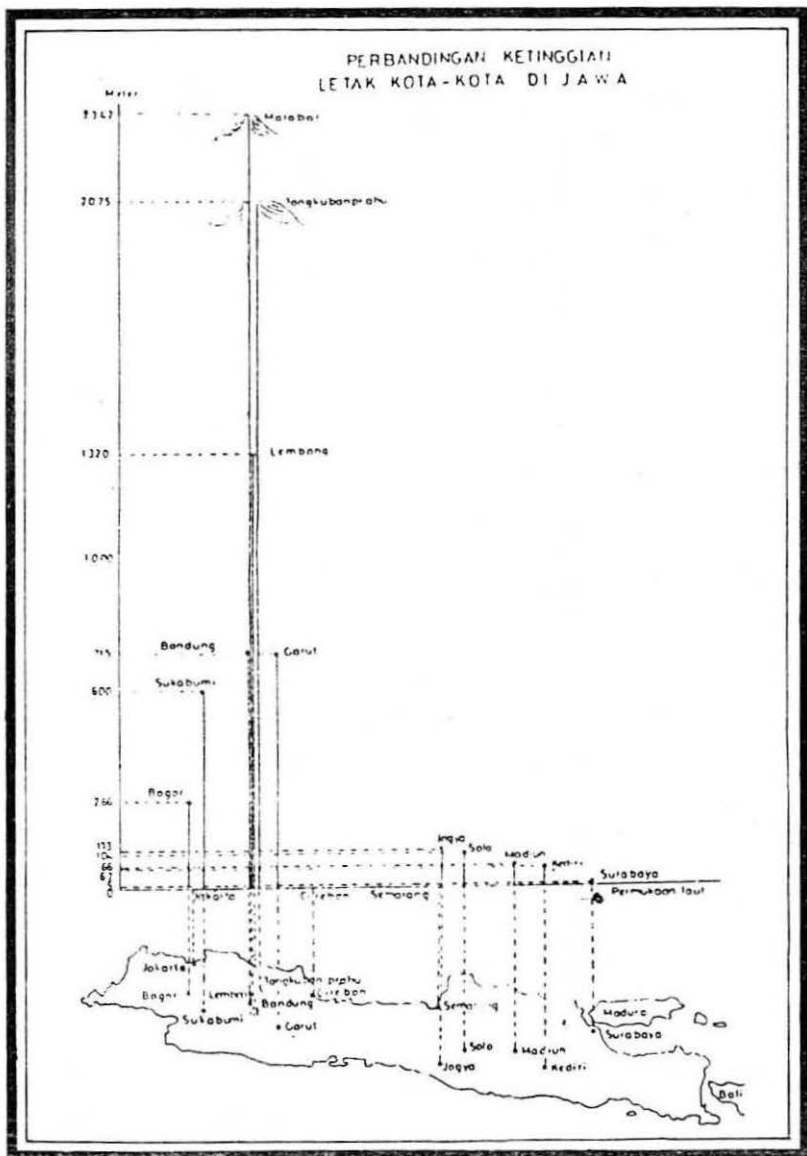
Lambang Gemeente Bandoeng tempo doeloe dengan motto "Ex Undis Sol".



Lambang Pemda Dt. II Kotamadya Bandung

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984.

Lampiran 2

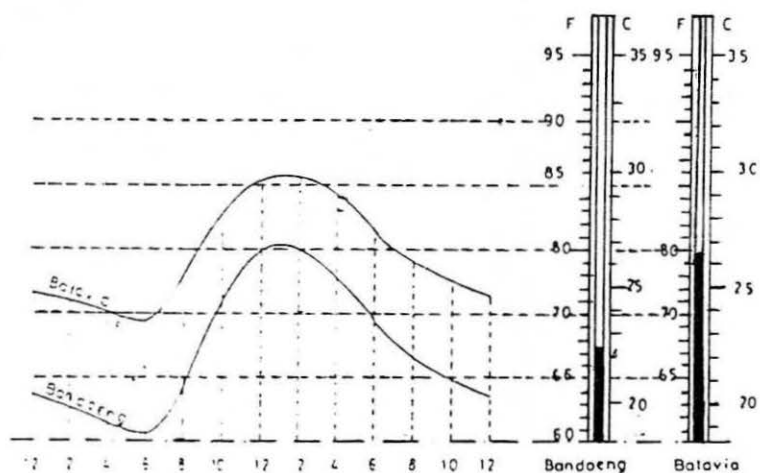


Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984

Overzichtkaartje van Priangan



PERBANDINGAN GRAFIS SUHU UDARA RATA RATA
DI KOTA BANDOENG DAN BATAVIA



Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984

Lampiran 5



Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984



Sumber : Museum Geologi Bandung, 1981

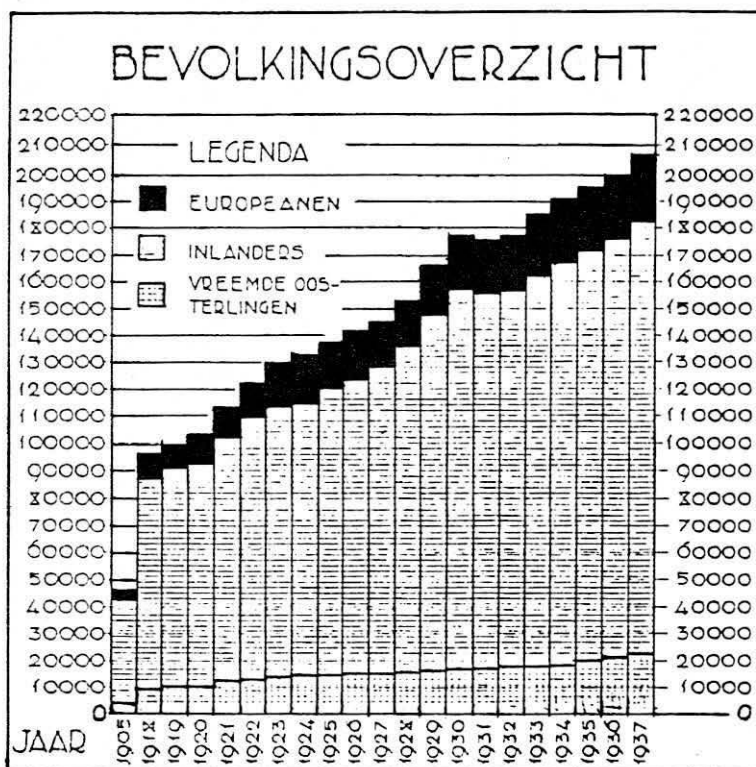


Di abad 19 wilayah Tatar Bandung masih hutan terbilang "terra - incognita". Gambar menunjukkan tepian Sungai Citarum (Dayeuhkolot) menurut lukisan Paijen (1835).

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984

Lampiran 8

Statistik
Perkembangan Penduduk Kota Bandung
Tahun 1905 – 1937

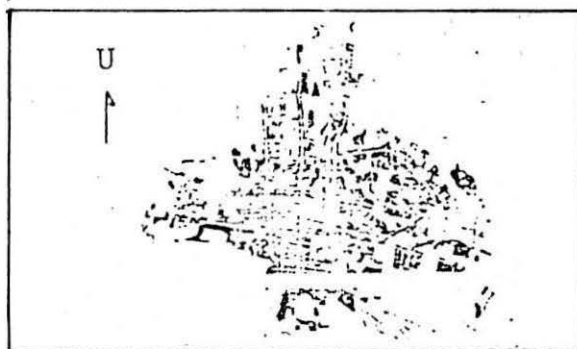


Sumber : Mooi Bandoeng, 4, 1938.

Peta Pemekaran Kota Bandung 1906-1937



Bandoeng in 1906



Bandoeng in 1926



Bandoeng in 1911



Bandoeng in 1931



Bandoeng in 1916



Bandoeng in 1937



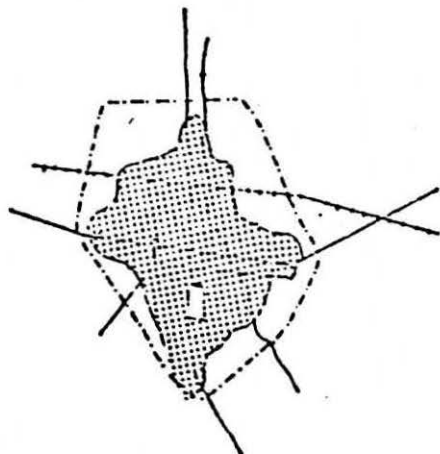
Bandoeng in 1921

*Sumber :
Mooi Bandoeng, 4, 1938.*

Lampiran 10

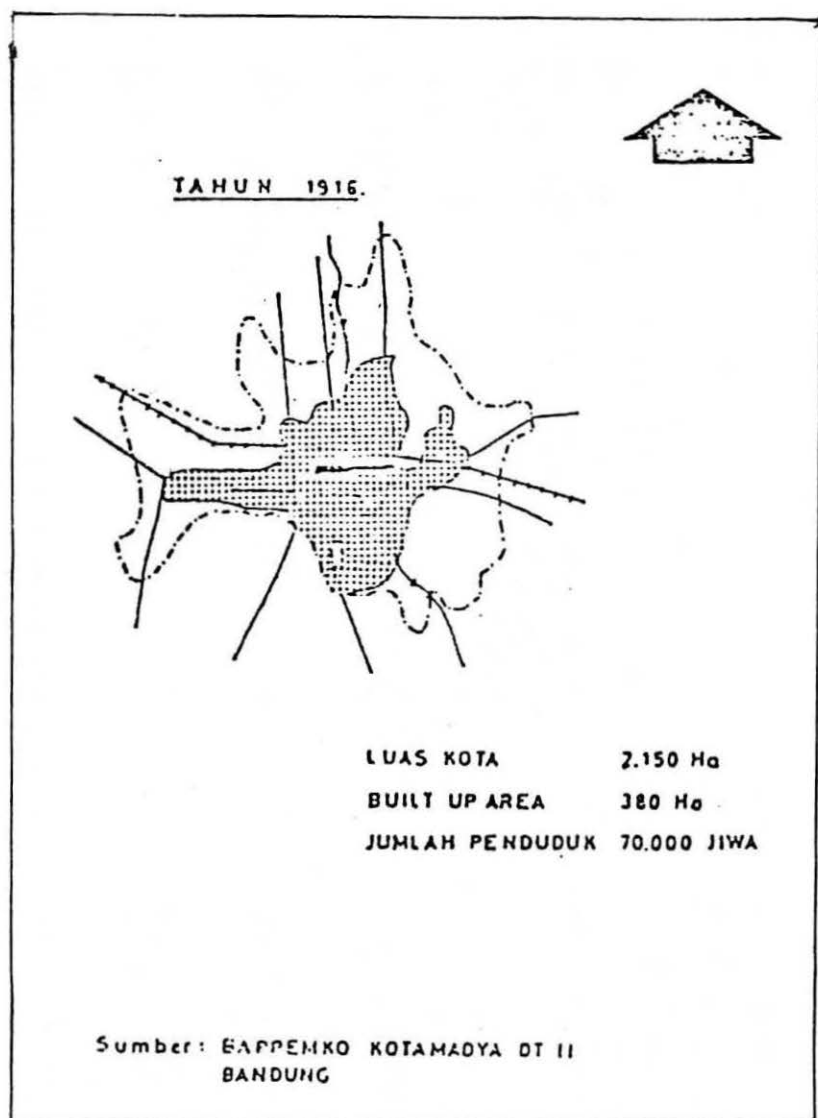
GAMBAR II.2
PETA PERKEMBANGAN KOTA BANDUNG
TAHUN 1906 - 1978

TAHUN 1906



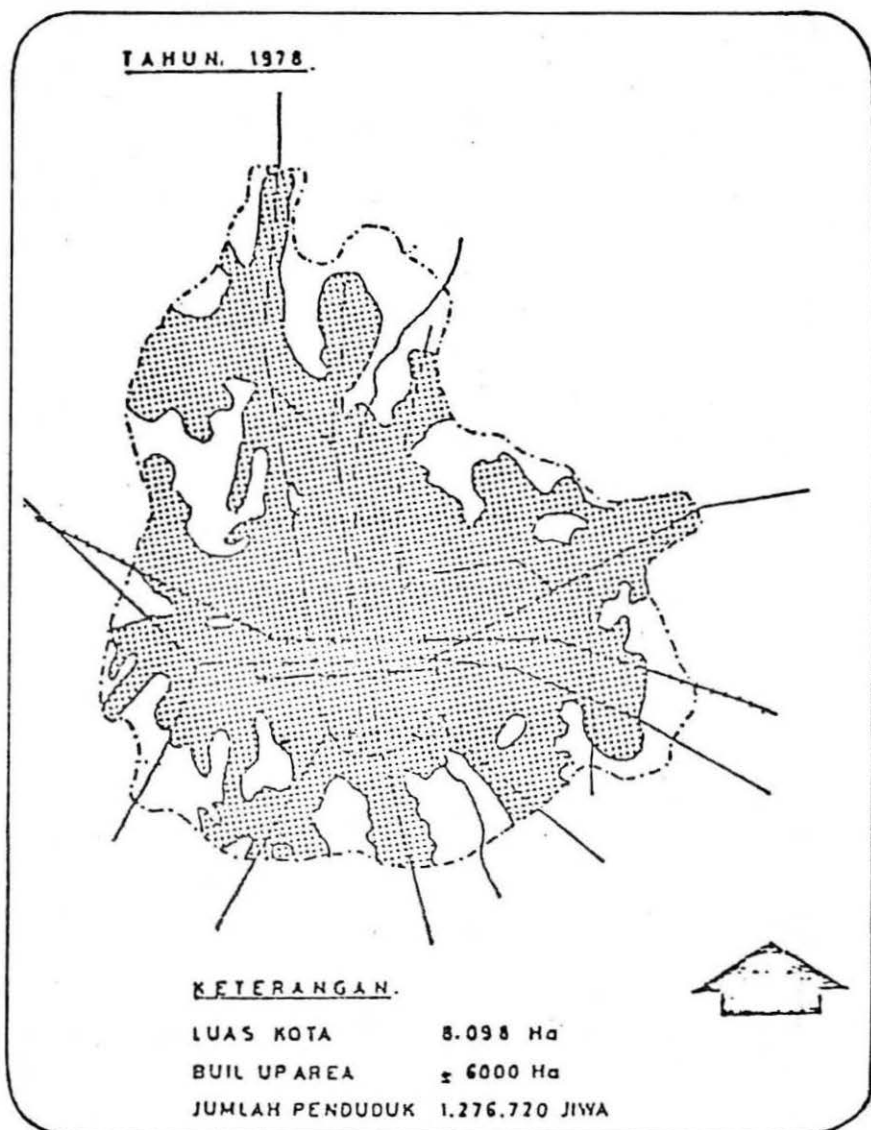
KETERANGAN.

LUAS KOTA	900 Ha
BUILT UP AREA	240 Ha
JUMLAH PENDUDUK	38.403 jiwa



Basoeni, Peringatan 50 Tahun Berdirinya Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom, 1956.

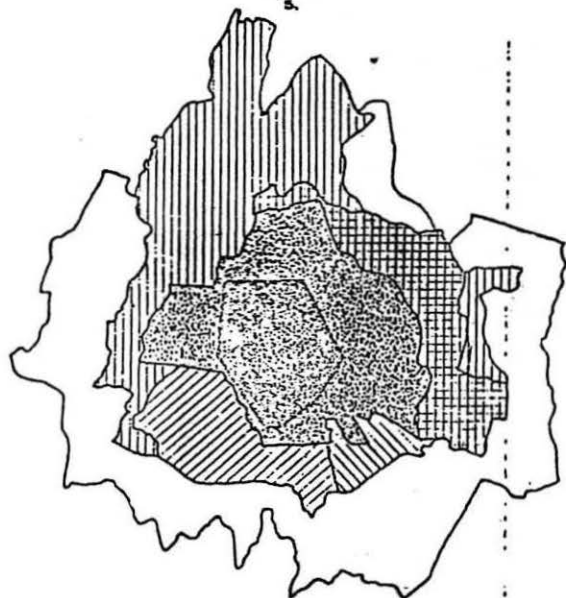
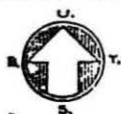
Lampiran 12



Basoeni, Peringatan 50 Tahun Kota Bandung Sebagai Daerah Otonom, 1956.

Lampiran 13

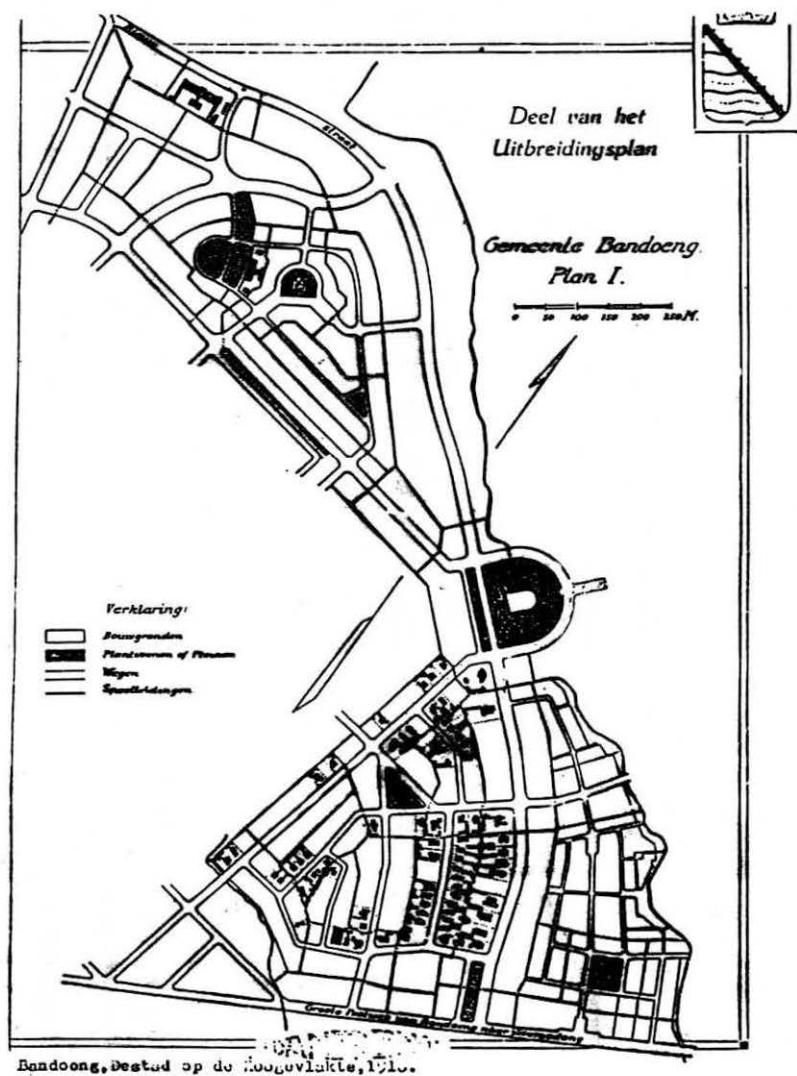
PERLUASAN KOTA BANDUNG
SELAJANG PANDANG



LEGENDA:

	PERMUKAAN ASAL (1 APRIL 1906)	= 4922 HA
	PERLUASAN ZAMAN BELANDA (12 OKTOBER 1917)	= 2171 "
	PERLUASAN ZAMAN DJEPANG (1 OKTOBER 1942).	= 3876 "
	IDEN (1 APRIL 1943)	= 4117 "
	IDEN (24 MEI 1943)	= 3413 "
	PERLUASAN ZAMAN NEGARA PASUNDAN (19 FEBRUARI 1949)	= 2092 "
	PERLUASAN MENURUT RENTJANA KARSTEN	= 1275K "

Lampiran 14

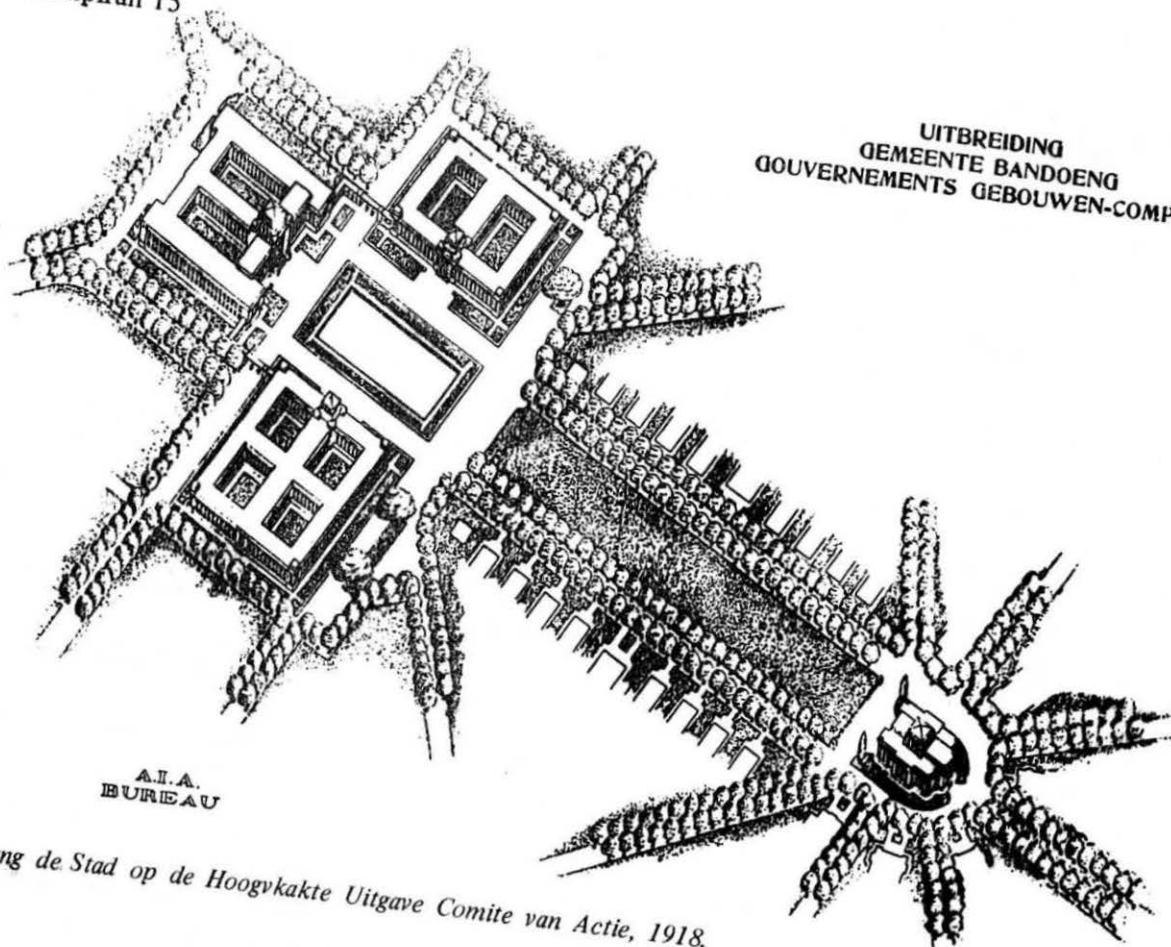


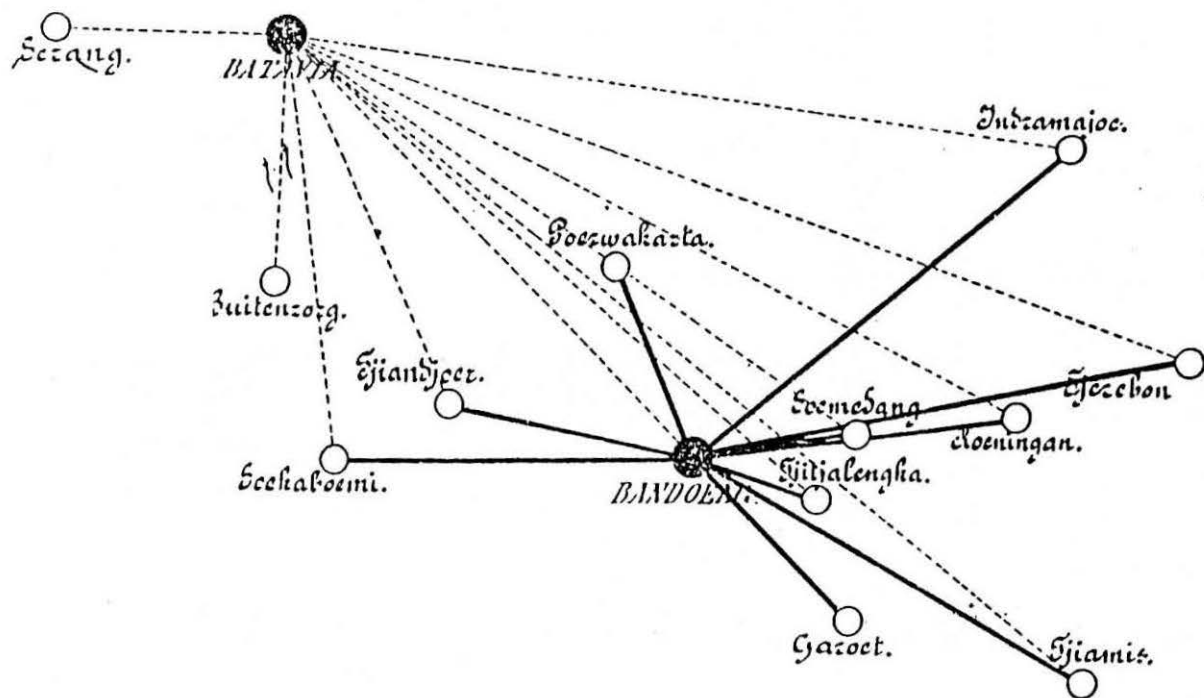
UITBREIDING
GEMEENTE BANDOENG
GOUVERNEMENTS GEBOUWEN-COMPLEX

124

A.I.A.
BUREAU

Bandoeng de Stad op de Hoogvkakte Uitgave Comite van Actie, 1918.







PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

5 FUNGSI KOTA BANDUNG

1. PUSAT PEMERINTAHAN
JAWA BARAT
IBUKOTA KABUPATEN BANDUNG
KOTAMADYA. BANDUNG
2. PUSAT PERDAGANGAN REGIONAL
JAWA BARAT
3. PUSAT INDUSTRI
4. PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN
5. PUSAT KEBUDAYAAN & PARIWISATA



PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

PERMASALAHAN POKOK KOTA
BANDUNG

1. KEPADATAN PENDUDUK YANG SANGAT
TINGGI (182 jiwa / ha)
2. KEPADATAN / PEMBAURAN JASA PRO
DUKSI YANG TERPUSAT PADA SATU
LOKASI (PUSAT KOTA)
3. TIDAK ADANYA SISTIM JARINGAN
JALAN YANG BERKESINAMBUNGAN
4. PERMASALAHAN LAPANGAN KERJA
5. DISIPLIN MASYARAKAT YANG RENDAH



PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

KEBIJAKSANAAN STRATEGI PENATAAN
KOTA BANDUNG SECARA TERPADU

1. FISIK

2. NON FISIK

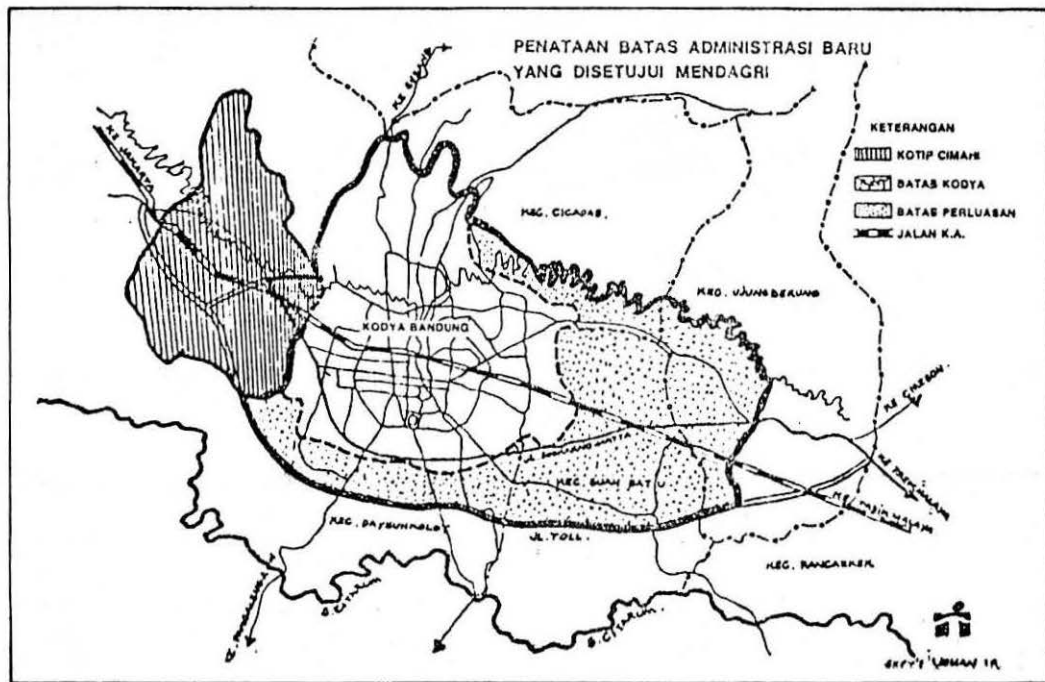
DENGAN SASARAN
KEHIDUPAN PERKOTAAN
YANG ATLAS

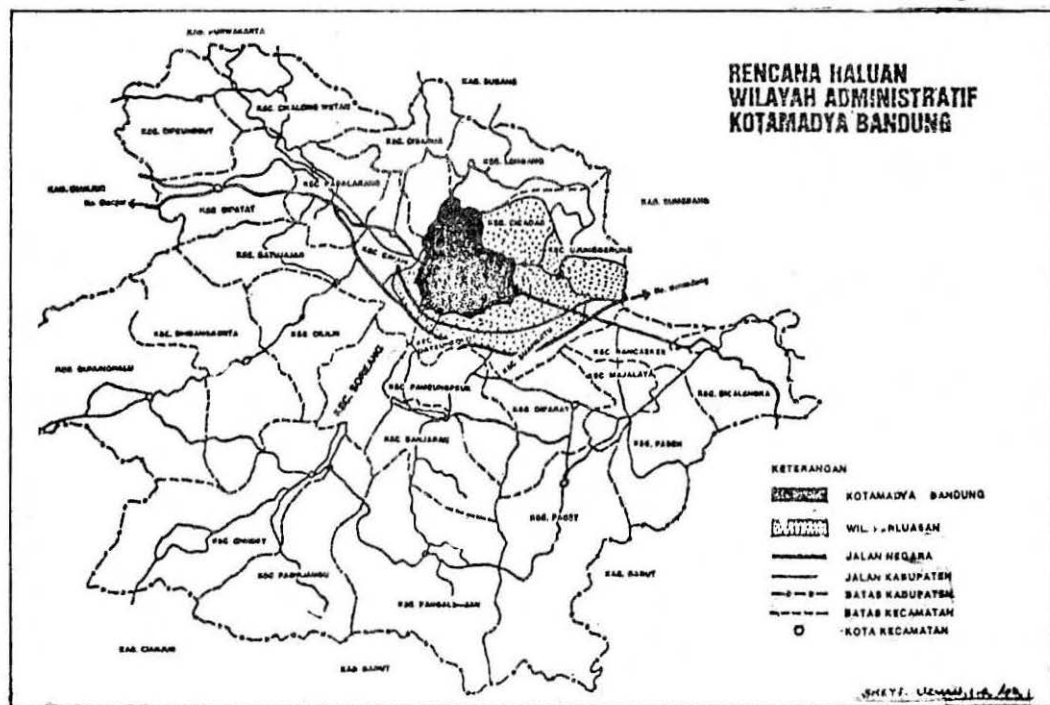


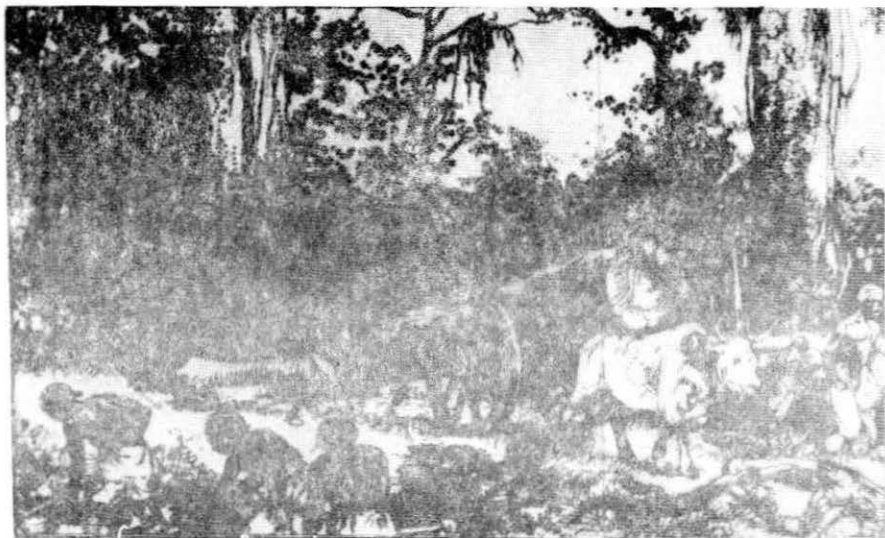
PEMERINTAH KOTAMADYA DT. II BANDUNG

FISIK

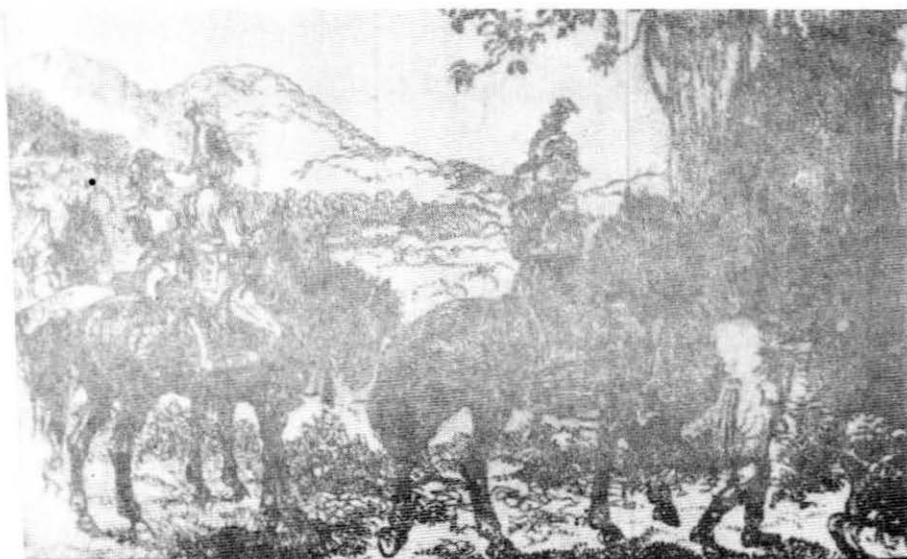
1. PROGRAM STRATEGI P U.
BIDANG KEBINAMARGAAN
DALAM RANGKA PENATAAN
WILAYAH INTI BANDUNG RAYA
2. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
SANITASI KOTA BANDUNG (B.U.D.P)
'DEWI SARTIKA'
3. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
AIR MINUM
4. PROGRAM PERLUASAN WILAYAH
ADMINISTRATIF KOTA BANDUNG
5. PROGRAM KEBERSIHAN & KEINDAHAN
KOTA
6. PROGRAM KELESTARIAN ALAM
DAN LINGKUNGAN HIDUP





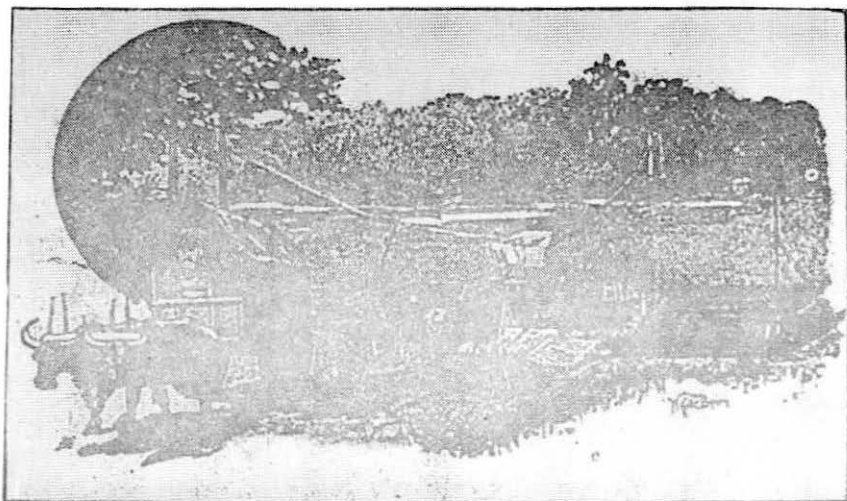


"Coba usahakan, bila aku datang kembali, di tempat ini telah dibangun sebuah kota", kata Daendels.



Gubernur Jenderal Daendels membangun Jalan Raya Pos di Pulau Jawa tahun 1809.

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984.



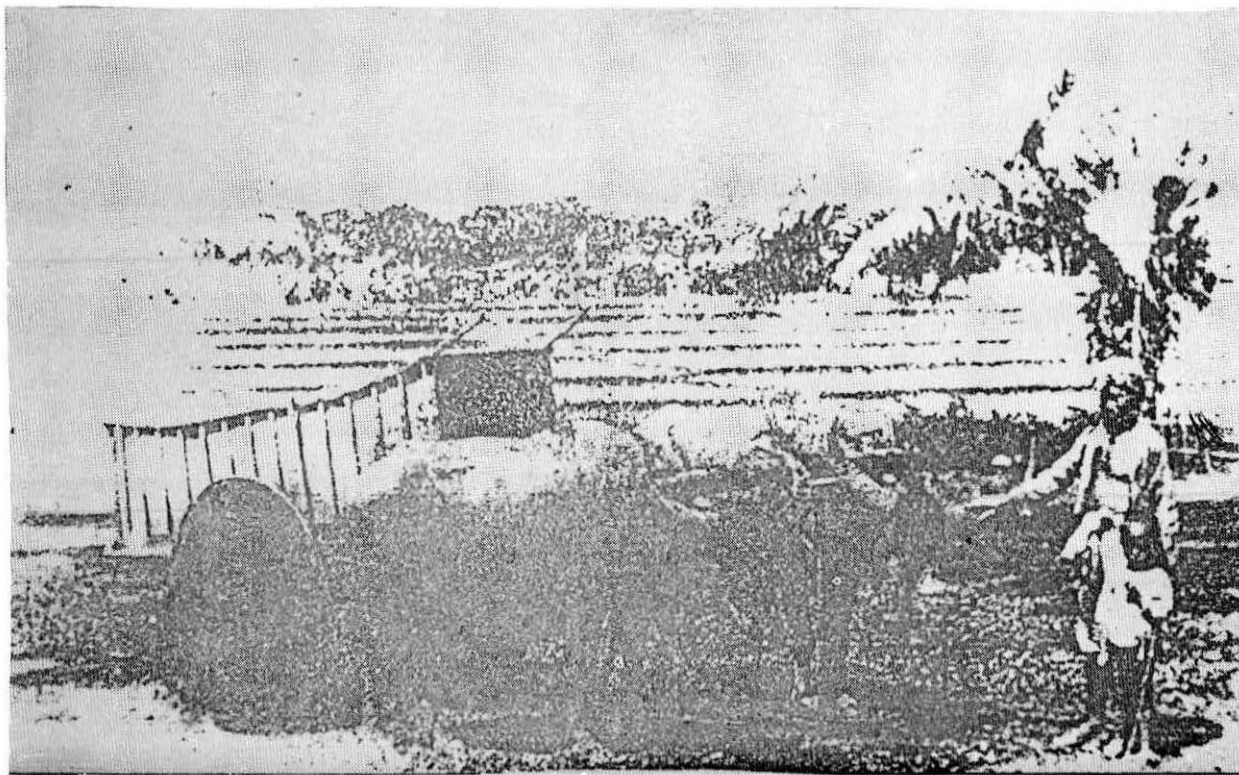
Pedati Kerbau menyeberangi Sungai Citarum. Dua perahu penyeberangan yang berpasangan disebut "Perahu Bandungan".

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984.

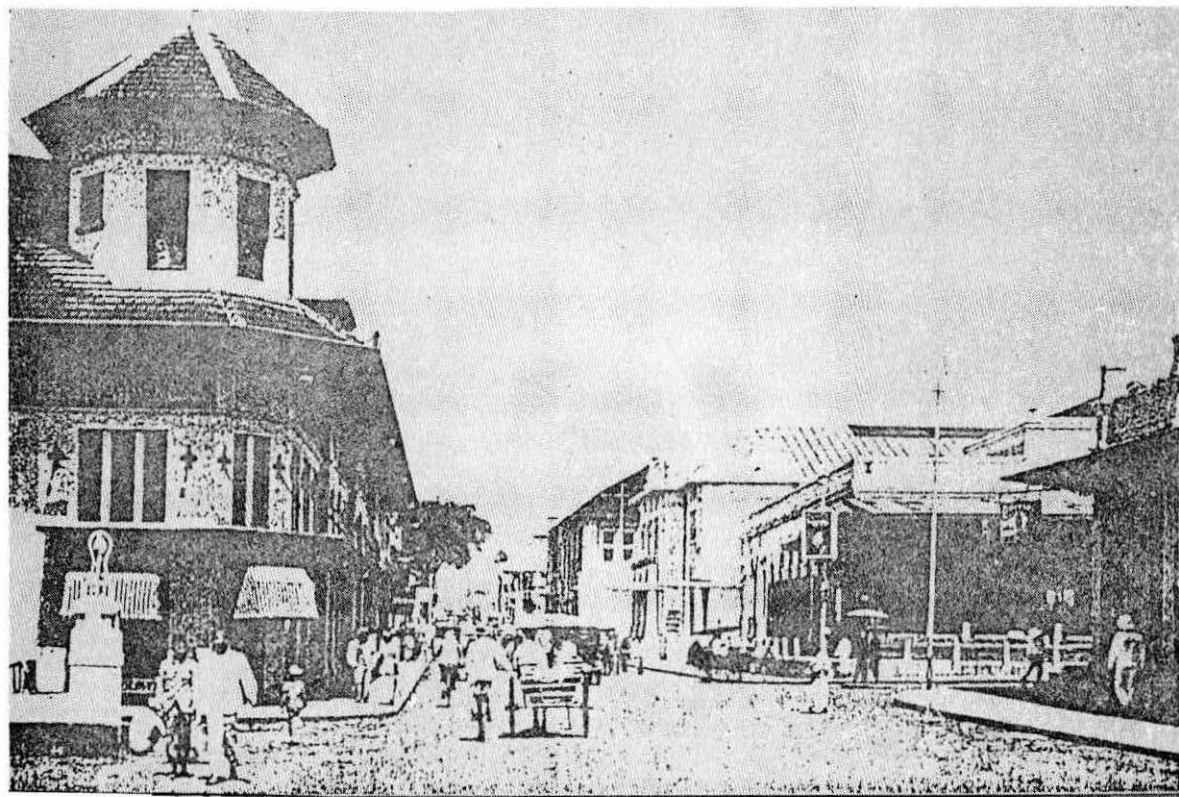


Berbondong-bondong para Pengusaha Gula (Suikerplanters) datang ke kota Bandung pada tahun 1896.

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1956.



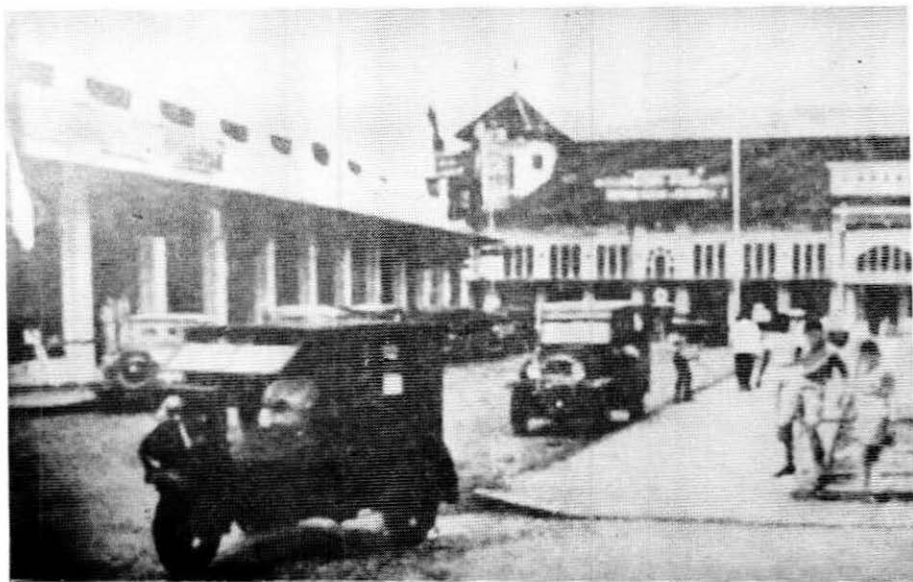
Pedati Kerbau dari Priangan di abad 19 yang lalu. Perhatikan roda pedati tanpa jari-jari.



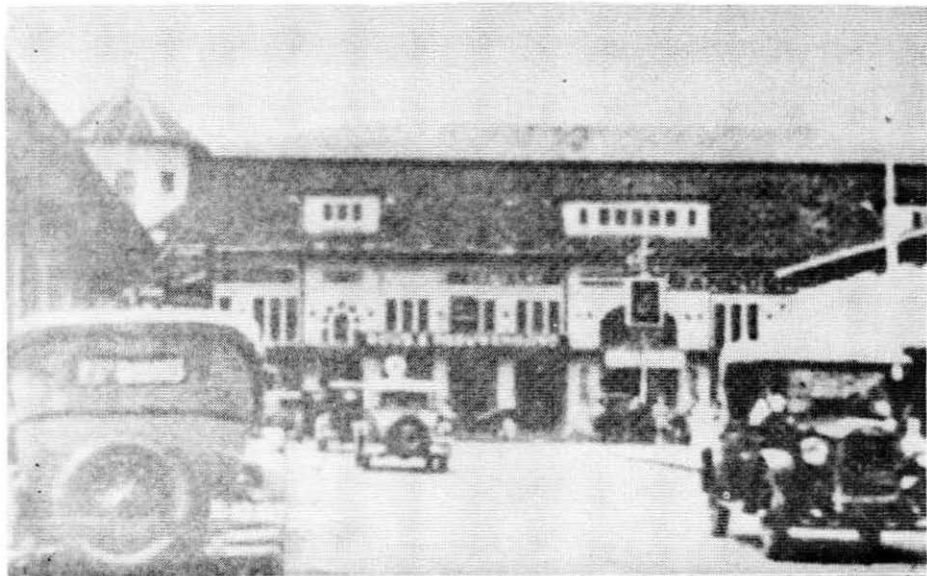
In Het Hartje van Bandoeng – Groot Postweg Bij De Soos.



Jl. Braga pada tahun 1913, dilihat ke arah utara.



Ujung selatan Jl. Braga tahun 1920



Jl. Braga tahun 1931.



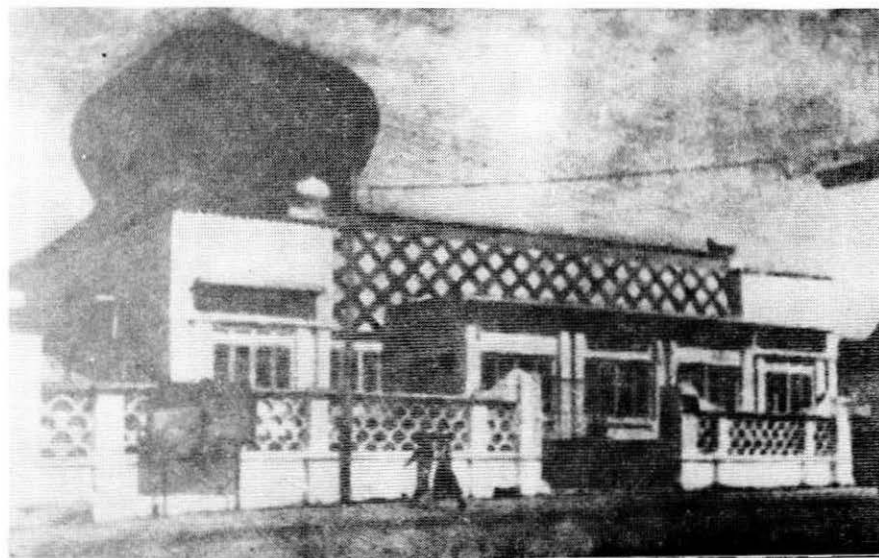
Lokasi yang sama (depan Bioskop Mejestic) pada tahun 1984. Haryoto Kunto, 1984.



In de Chineesche Wijk – Passar Baroe.



Mesjid Agung Bandung sebelum tahun 1955. Terlihat asri, asli tradisionil bentuknya. Beberapa tukang cukur "O.D.B." (Onder de Boom) masih praktek di latar Alun-alun.



Mesjid Agung Bandung tahun 1957

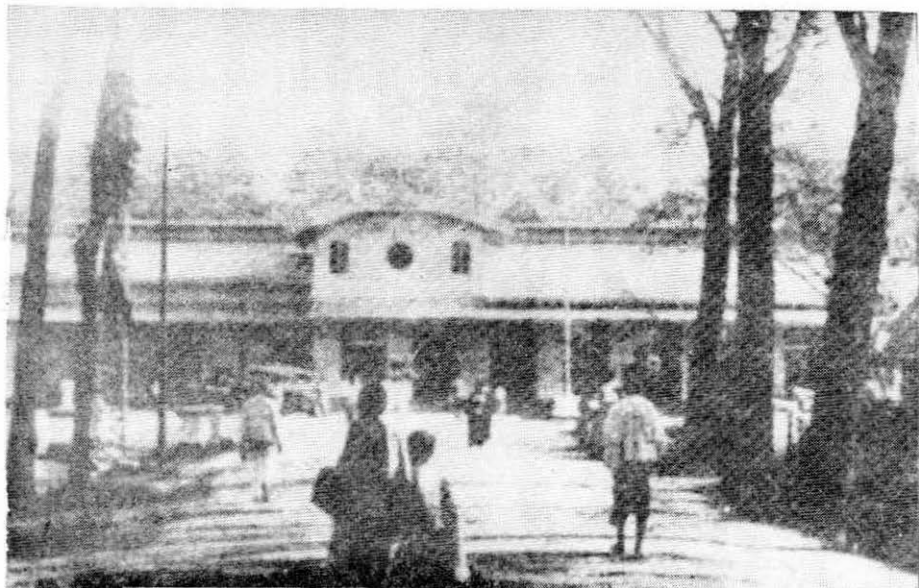
Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984.



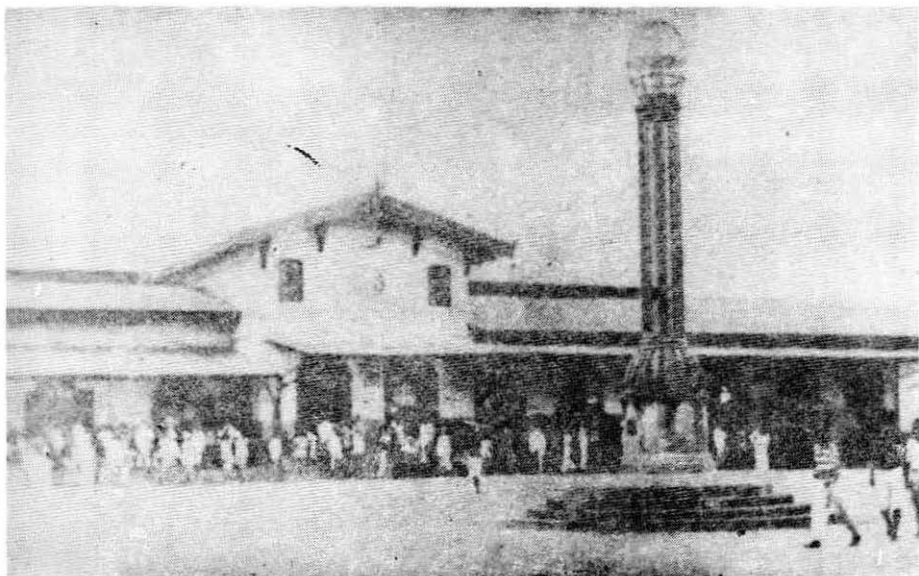
Hell centrum van Het Inlandsche Leven — Aloon-aloon Met Missigit.



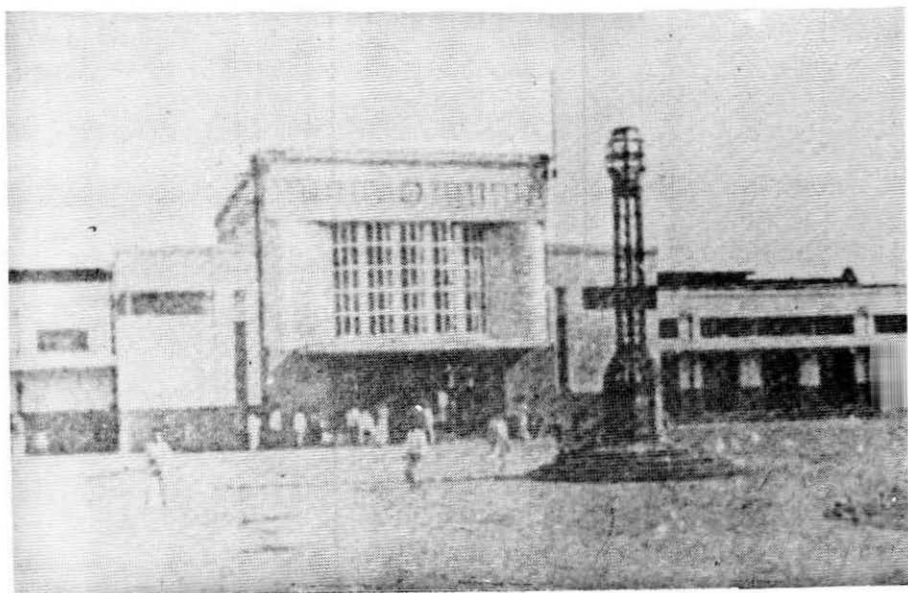
Stasion Kereta Api Bandung tahun 1887.



Stasion Kereta Api Bandung tahun 1920.

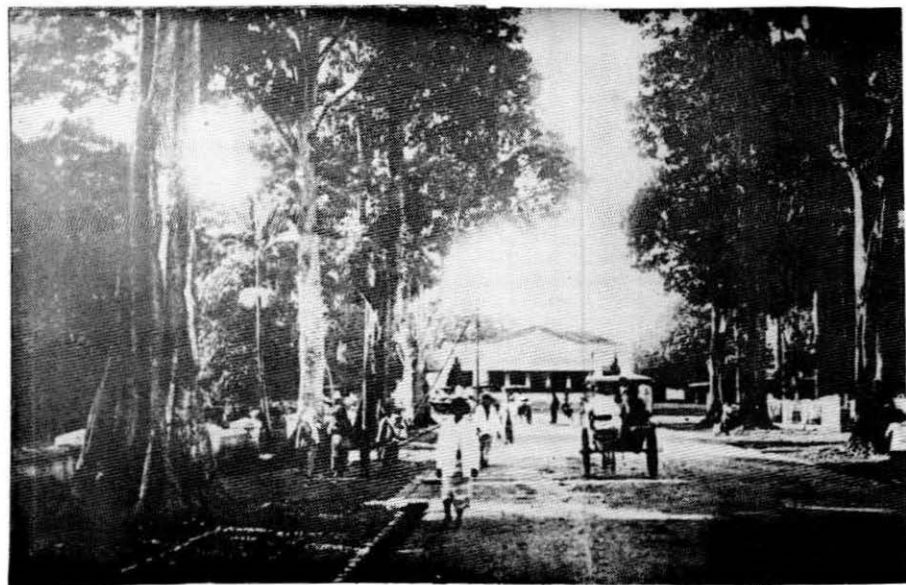


Stasion Kereta Api Bandung tahun 1926.

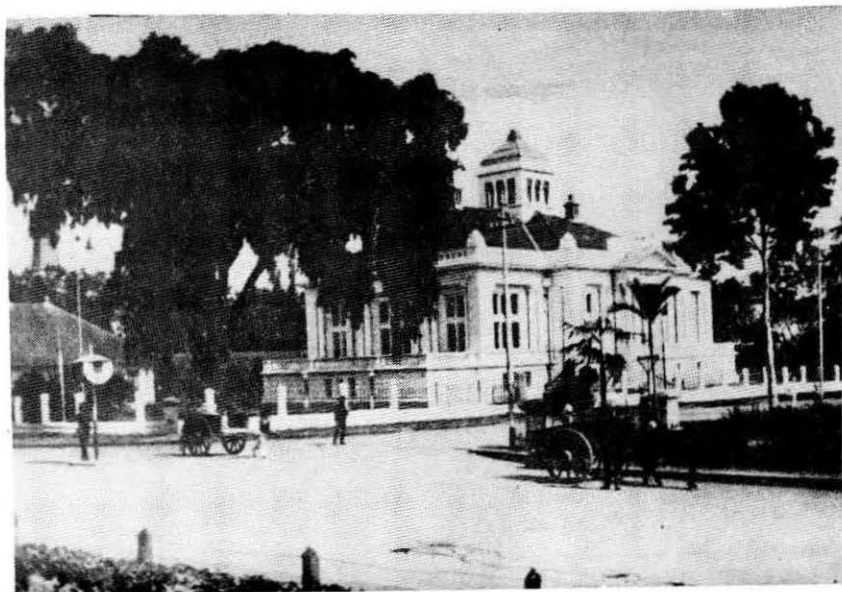


Stasion Kereta Api Bandung tahun 1931.

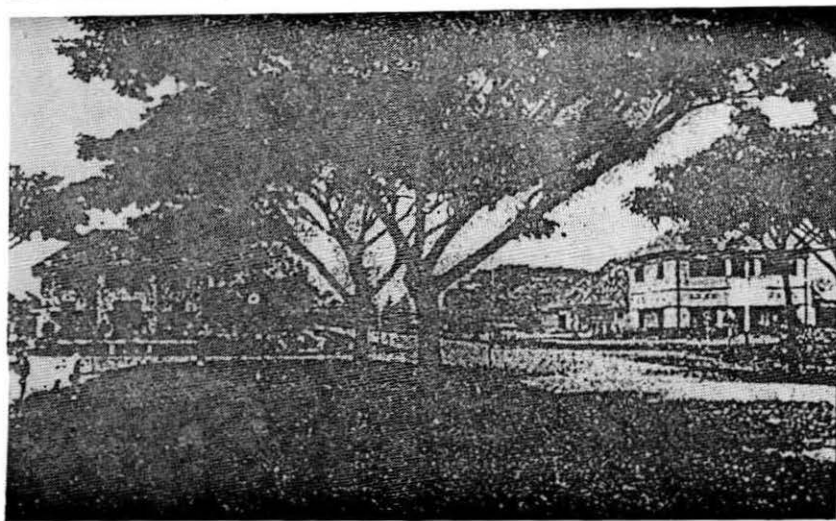
Haryoto Kunto, 1984.



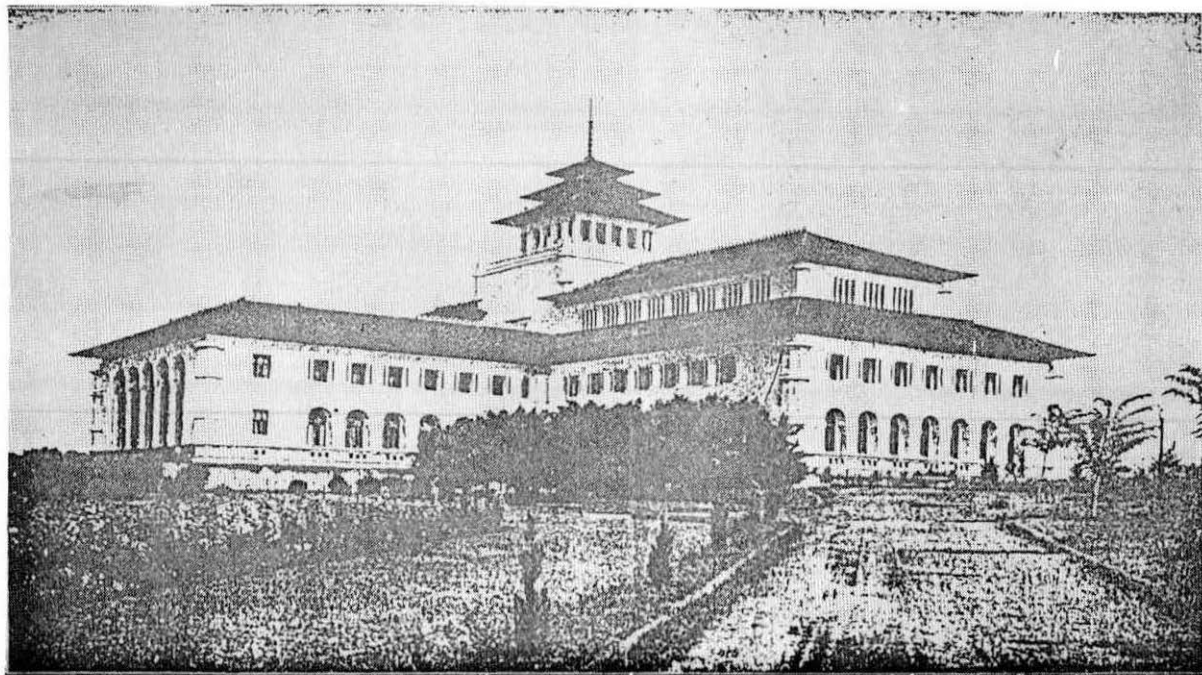
Oud Bandoeng – Residentshuis.



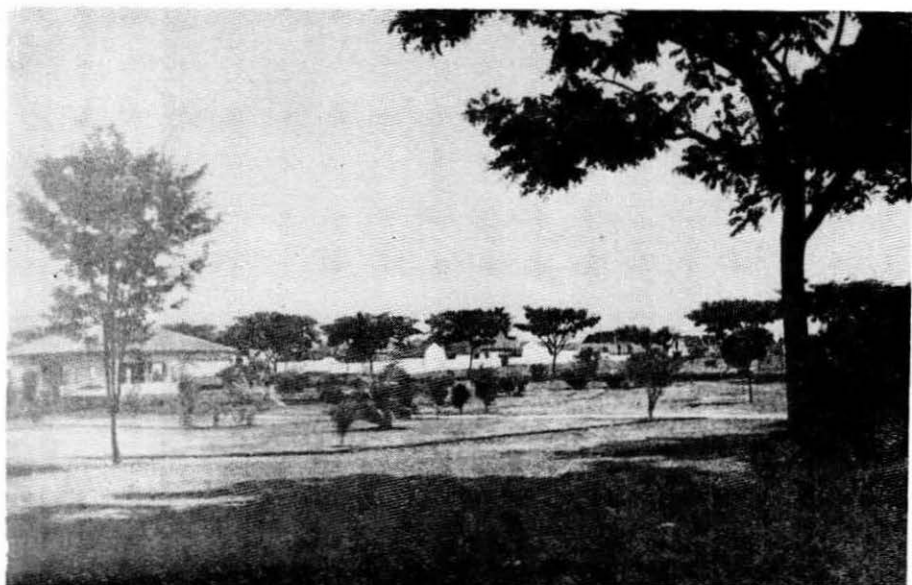
De Javasche Bank.



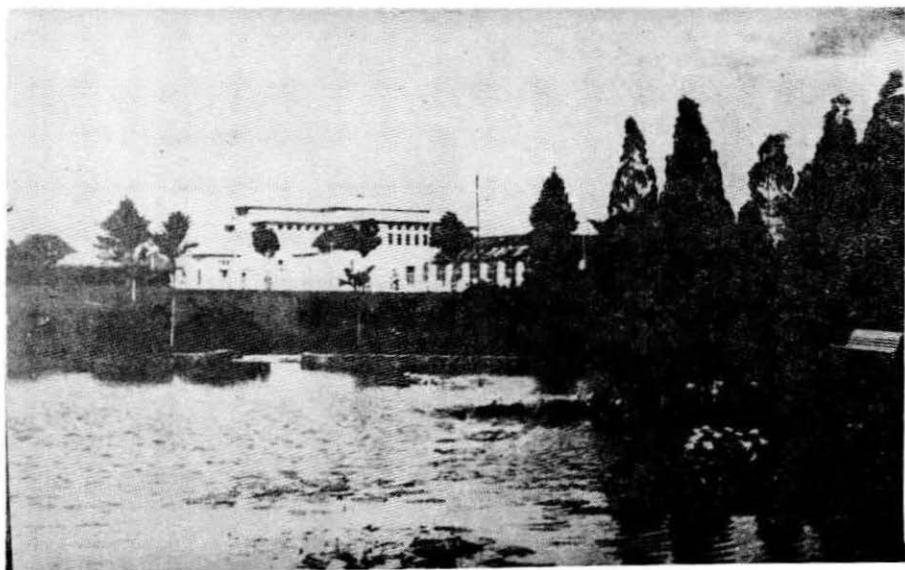
Kompleks perumahan pegawai kecil ("kleine luijden") dibangun oleh "B.O.W." di daerah Cipahit, Bandung.



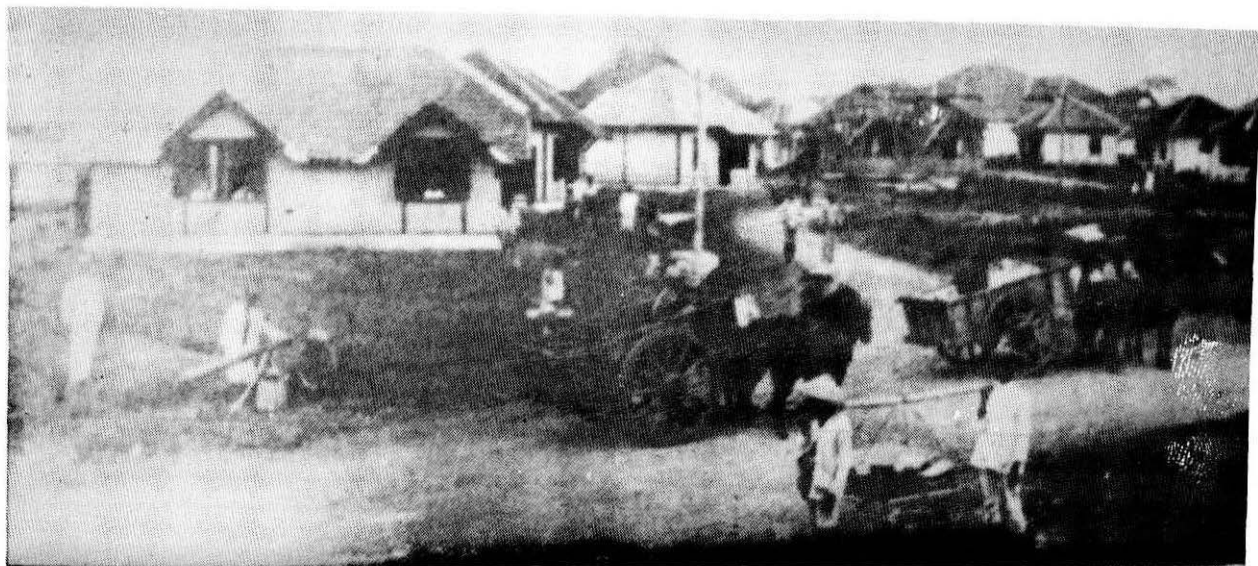
Departemen van Gouvernements—Bedrijven.



Nieuw Bandoeng – Oranjeplein Met Muziekkoepel.



De Jaarbeurs Vanuit Molukkenpark.



Perumahan bertingkat dibangun oleh Meneer D.H. Ton di daerah "Oranje Plein" (sekarang Taman Pramuka) Jl. Riau. Kompleks perumahan ini dulu disebut "Kapitein Hill".

Haryoto Kunto, Wajah Bandoeng Tempo Doeloe, 1984.

**Perpustakaan
Jenderal**